

"TRIBUTE TO AKBAR TANDJUNG" APRESIASI KIPRAH MAESTRO AKTIVIS INDONESIA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN

EDISI NO.06/TH.XVIII/VI/2024



Menjelang Akhir Masa Jabatan

MPR MASA JABATAN 2019-2024 Menyiapkan Berbagai Legacy

ISSN 0854-6371



9 770854 637158

29 **Nasional**
HNW: Menyampaikan Aspirasi
Pengakuan Spanyol atas Palestina

32 **Kajian MPR**
MPR Gelar FGD
di Ranah Minang

39 **Selangan**
Keraton Majapahit
Jakarta

64 **Sosialisasi**
Bamsoet: Ingatkan Ancaman
Kemajuan Teknologi

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



PANCASILA



Daftar Isi

EDISI NO.06/TH.XVIII/VI/ 2024



08 BERITA UTAMA

Legacy MPR Masa Jabatan 2019-2024

MPR RI periode 2019-2024 sudah dan sedang mempersiapkan berbagai legacy (peninggalan). Antara lain, Forum MPR se-Dunia, Rancangan UU MPR, Pembentukan Badan Kehormatan MPR, Tata Tertib MPR RI yang baru, serta Bentuk Hukum dan Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).



16 Nasional

Rapat Pimpinan MPR RI: Bahas Perubahan Tatib MPR



70 Sosialisasi

Implementasi Nilai-nilai Empat Pilar Harus Ditingkatkan



39 SELINGAN

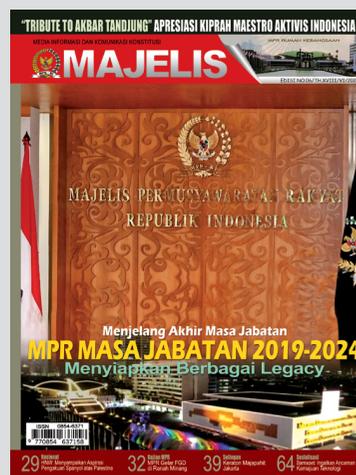
Keraton Majapahit Jakarta



82 Profil

Anna Ruswan Latuconsina

Pengantar Redaksi	04
Perspektif	06
Kolom	36
Aspirasi Masyarakat	47
Gema Pancasila	50
Varia	72
Wawancara	76
Figur	78
Ragam	80
Dari Rumah Kebangsaan	86
Rehal	88



COVER

Edisi No.06/TH.XVIII/VI/ 2024

Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

Pengantar Redaksi

Legacy MPR Periode 2019 - 2024

MASA jabatan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019 - 2024 sebentar lagi akan berakhir. MPR sendiri akan menggelar Sidang Akhir Masa Jabatan yang menandai berakhirnya masa jabatan 2019 - 2024 pada akhir September 2024. Setelah itu anggota MPR baru hasil Pemilu 2024 akan memulai masa jabatan 2024 - 2029 dengan Sidang Awal Masa Jabatan pada awal Oktober 2024.

Hari-hari ini Pimpinan dan anggota MPR berupaya merampungkan dan menuntaskan program-program di sisa waktu sekitar empat bulan lagi. Sekaligus Pimpinan dan anggota MPR mempersiapkan hasil kerja sebagai legacy (peninggalan atau warisan) MPR periode 2019 - 2024. Legacy ini akan ditindaklanjuti Pimpinan dan anggota MPR yang baru pada periode 2024 - 2029.

Dalam Rapat Pimpinan MPR pada 29 April 2024, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan, legacy yang dipersiapkan itu antara lain Forum MPR Se-Dunia, RUU MPR, pembentukan Badan Kehormatan, Tata Tertib MPR yang baru, serta bentuk hukum dan substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Khusus mengenai RUU MPR, dalam Rapim itu, Bamsuet mengatakan, kehadiran UU MPR sangat penting bagi lembaga keparlemen seperti MPR, DPR, dan DPD, mengingat masing-masing lembaga memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Sehingga perlu ada UU MPR, UU DPR, dan UU DPD, yang masing-masing berdiri sendiri, tidak seperti saat ini yang tergabung dalam UU MD3.

Bahkan, Bamsuet menyebukan, UUD NRI Tahun 1945 sudah mengamankan agar kelembagaan MPR, DPR, dan DPD diatur dengan undang-undang tersendiri. Amanah ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C Ayat (4). MPR sendiri, melalui Badan Pengkajian, sudah melakukan kajian naskah akademik dan Rancangan UU tentang MPR.

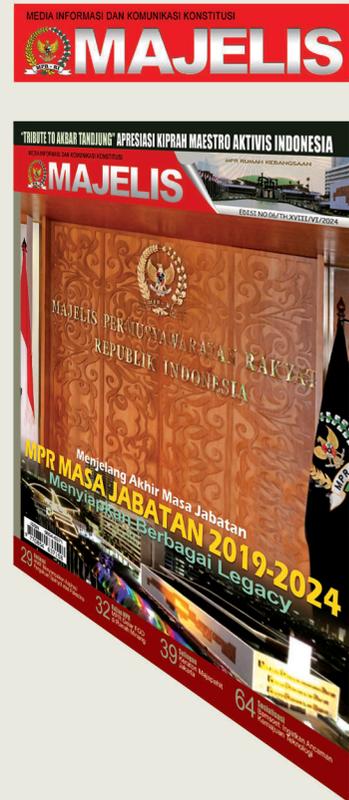
Pertemuan antara Pimpinan MPR dengan

Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan pada Kamis, 16 Mei 2024, juga membahas salah satunya tentang Rancangan UU MPR. Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan menyampaikan laporan hasil kajian terhadap Rancangan UU MPR. Tindak lanjut dari pertemuan ini, Pimpinan MPR menggelar pertemuan dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD pada Kamis, 30 Mei 2024. Ragab membahas hasil kajian Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan.

Di depan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD dalam Ragab ini, Pimpinan MPR menyampaikan bahwa MPR periode 2019 - 2024 akan berupaya meninggalkan warisan (legacy) berupa naskah Pokok-Pokok Haluan Negara, naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) MPR, perubahan Tata Tertib MPR, dan pembentukan Badan Kehormatan MPR.

Pimpinan MPR menyerahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD untuk mengkaji atau memperdalam kembali naskah akademik tentang RUU tentang MPR, Rancangan Perubahan Tata Tertib MPR, dan konsep pembentukan Badan Kehormatan MPR, yang telah disiapkan oleh Badan Pengkajian MPR. Pimpinan MPR akan kembali mengundang Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD dalam Rapat Gabungan (Ragab) pada awal Juli 2024 sebelum Sidang Tahunan MPR.

Dari semua legacy MPR itu, Rancangan PPHN yang paling siap. Ragab sepakat untuk membawa rancangan PPHN ini ke Sidang Paripurna MPR akhir masa jabatan pada 27 September 2024. Rancangan PPHN yang disiapkan Badan Pengkajian MPR tinggal menyisakan persoalan bentuk hukum (payung hukum), apakah diatur dalam UUD, melalui Ketetapan MPR, atau dalam bentuk undang-undang. MPR periode 2024 - 2029 akan memutuskan bentuk hukum tersebut sehingga pada tahun 2025 atau 2026, PPHN sudah digunakan sebagai road map pembangunan nasional. □



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

REDAKTUR PELAKSANA

Anies Mayangsari Muninggar

KOORDINATOR REPORTASE

Djarot Widiarto

FOTOGRAFER

Tim Medvis

TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,
Ardi Winangun, Budi Sucahyo,
Derry Irawan, M. Budiono

STAF DISTRIBUSI

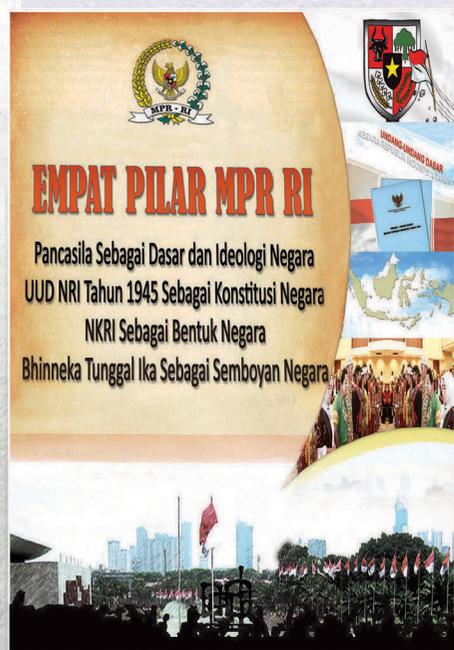
Amelia Rubinta, Ikhwani Bimo F

ALAMAT REDAKSI

Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi,
Sekretariat Jenderal MPR-RI
Gedung Nusantara III, Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,
Senayan, Jakarta 10270.
Telp. (021) 57895237, 57895238,
57895251 Fax.: (021) 57895237
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



Peringatan
Hari Lahir Pancasila: 1 Juni 2024



Tetaplah Berhati-hati dan Bijaksana Mengelola Pertumbuhan Ekonomi

KEMENTERIAN Keuangan bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (6/5), merilis kabar gembira. Dua institusi negara itu melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia per triwulan I-2024 tetap tinggi, yakni mencapai 5,1% secara tahunan (year-on-year/yoy). Kecenderungan positif ini patut dikelola dengan penuh kebijaksanaan dan kehati-hatian, terutama karena dunia masih sarat ketidakpastian.

Lebih dari itu, kabar dan fakta ini menjadi modal yang lebih dari cukup bagi negara-bangsa melakukan transisi pemerintahan; dari administrasi pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo ke administrasi pemerintahan baru, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagai pemenang Pilpres 2024. Tentu saja tim transisi Prabowo-Gibran diharapkan menjadikan kabar dan fakta dimaksud sebagai modal, sekaligus pijakan, untuk menjalankan manajemen pemerintahan baru.

Sudah pasti bahwa tantangannya adalah bagaimana merawat dan mempertahankan pertumbuhan yang tinggi itu. Berangkat dari tantangan itulah menjadi sangat penting bagi tim transisi Prabowo-Gibran untuk pro aktif membangun komunikasi yang intens dengan tim ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Setelah mendalami permasalahan dan tantangannya tidak salah juga jika tim transisi mengajukan proposal atau strategi kebijakan untuk merawat dan mempertahankan pertumbuhan yang tinggi itu.

Pesannya sederhana saja bahwa pertumbuhan tinggi itu patut dirawat dan dipertahankan. Tentu dengan penuh kebijaksanaan dan kehati-hatian. Bijaksana dan hati-hati hendaknya digaris-bawahi karena pertumbuhan yang tinggi itu masih dibayangkan ketidakpastian global. Pertumbuhan tinggi itu bisa saja tidak kokoh atau rapuh, terutama jika dihadapkan pada fakta naiknya harga minyak mentah di pasar global, serta fluktuasi

nilai tukar rupiah-dolar AS.

Pertumbuhan tinggi triwulan pertama-2024, sebagaimana penjelasan resmi pemerintah, disumbangkan oleh konsumsi rumah tangga yang masih kuat. Selain itu, belanja pemerintah untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 pun ikut memperkuat konsumsi rumah tangga, antara lain dari pemberian honorarium petugas Pemilu. Maka, agar kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan tetap terjaga, strategi yang paling masuk akal adalah merawat kekuatan daya beli atau konsumsi masyarakat. Daya beli masyarakat itu akan terjaga kalau laju inflasi terkendali.

Sejak awal pekan ini, harga minyak mentah (crude oil) Brent masih bertengger di level 83 dolar AS per barel. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mencermati kenaikan harga minyak dunia. Sementara itu, nilai tukar rupiah-dolar AS hari-hari ini masih di kisaran Rp 16.000 per dolar AS. Semua orang tahu bahwa harga minyak mentah yang naik dan dolar AS yang terapresiasi selalu memberi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berkait dengan dua faktor itu, dunia cukup diuntungkan karena baik Iran maupun Israel yang sedang berkonflik mampu menahan diri. Sejauh ini, konflik kedua negara tidak, atau belum, tereskalasi. Jika saja konflik kedua negara berubah menjadi perang terbuka, sejumlah indikator ekonomi pasti akan berubah dengan sangat ekstrim dan tentu saja mencemaskan. Namun, demi kebaikan bersama, komunitas global tentu berharap dan terus mendorong agar Iran-Israel lebih memilih pendekatan dialog untuk menyelesaikan perselisihan mereka.

Berpijak pada situasi global yang demikian itu, rumusan dan strategi kebijakan Indonesia hendaknya bernuansa antisipatif. Bahkan tidak salah juga kalau rumusan strategi kebijakan saat ini sampai pada

Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.
Ketua MPR RI



antisipasi skenario terburuk terhadap dinamika global. Tim transisi pemerintahan baru disarankan untuk mencermati kecenderungan itu. Soalnya, baik skala maupun durasi konflik Iran-Israel tidak mudah diprediksi. Tim transisi harus berani membuat prediksi tentang dinamika global di waktu-waktu mendatang; apakah setelah Oktober 2024 dinamika global semakin positif, atau sebaliknya.

Sebagian masyarakat sudah tahu bahwa APBN tahun berjalan sedang mengalami tekanan yang lumayan berat, karena naiknya harga minyak mentah di pasar global maupun karena faktor melemahnya rupiah terhadap dolar AS. Nilai atau belanja impor minyak menjadi mahal. Demikian pula subsidi bahan bakar minyak (BBM) ikut membengkak. Menguatnya nilai tukar dolar AS di tengah suku bunga acuan yang tinggi menyebabkan pengeluaran untuk membayar pokok dan bunga utang luar negeri menjadi lebih besar dari sebelumnya.

Sebagian publik pun tahu bahwa pemerintah saat ini memilih kebijakan menahan harga BBM bersubsidi yang dijual Pertamina pada tingkat yang sekarang, walaupun di saat yang sama produsen BBM lainnya sudah menaikkan harga jual. Kementerian ESDM memang sudah menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM, kendati kenaikan harga minyak mentah berdampak pada anggaran subsidi energi. Juga dipastikan bahwa pemerintah tidak menaikkan harga BBM

hingga Juni 2024 nanti.

Pemerintah baru bersama semua elemen masyarakat tentu berharap transisi pemerintahan nantinya tetap menghadirkan rasa nyaman bagi semua orang. Dalam konteks ini, tim transisi Prabowo-Gibran hendaknya semakin pro aktif untuk berkoordinasi dengan tim ekonomi Presiden Jokowi. Agenda penting yang patut menjadi perhatian adalah merumuskan strategi bersama untuk merawat dan memperkuat daya beli atau konsumsi masyarakat; kemudian merawat dan menjaga laju inflasi agar tetap terkendali; serta mencari strategi yang lebih efektif untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi dalam jangka dekat ini.

Masyarakat selalu gelisah kalau harga energi atau BBM bersubsidi dinaikkan. Agar harga energi tetap terjangkau, bukanlah aib jika pemerintah mengubah skala prioritas. Tidak ada salahnya jika program-program yang tidak relevan dengan masalah atau tantangan terkini ditunda, sehingga semua sumber daya yang masih ada digunakan untuk mempertahankan harga energi.

Soalnya, ketika harga energi dinaikkan, dampaknya sangat signifikan. Biaya produksi naik. Otomatis harga barang dan jasa ikut naik. Laju inflasi menjadi sulit dikenalkan. Kenaikan harga barang dan jasa akan memperlemah daya beli atau konsumsi masyarakat. Maka, sulit untuk mengharapkan pertumbuhan ekonomi nasional akan kuat seperti halnya pertumbuhan triwulan pertama-2024. □

Menjelang Akhir Masa Jabatan

MPR Masa **Jabatan** 2019-2024 Menyiapkan Berbagai Legacy



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MPR RI periode 2019-2024 sudah dan sedang mempersiapkan berbagai legacy (peninggalan). Antara lain, Forum MPR se-Dunia, Rancangan UU MPR, Pembentukan Badan Kehormatan MPR, Tata Tertib MPR RI yang baru, serta Bentuk Hukum dan Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

PIMPINAN Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar rangkaian tiga rapat pimpinan (Rapim) secara berturut-turut. Rangkaian Rapim itu digelar untuk mempersiapkan Sidang Tahunan MPR pada Agustus 2024, dan Sidang Akhir Masa Jabatan MPR periode 2019 – 2024 pada September 2024. Masa jabatan Pimpinan dan anggota MPR periode ini menyisakan beberapa bulan lagi, tepatnya empat bulan lagi. Pada awal Oktober, saat Sidang Awal Masa Jabatan periode 2024 – 2029, sidang sudah diikuti anggota MPR yang baru hasil Pemilu 2024.

Rangkaian tiga Rapim ini membahas program MPR di sisa waktu terakhir dan mempersiapkan *legacy* (peninggalan) untuk MPR periode berikutnya. Ketiga Rapim itu adalah: Rapim bersama Badan Pengkajian MPR pada Senin, 29 April 2024; Rapim bersama Komisi Kajian Ketatanegaraan pada Kamis, 16 Mei 2024; Dan, Rapim bersama Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD (Rapat Gabungan atau Ragab) pada Kamis, 30 Mei 2024. Pokok bahasan ketiga Rapim itu hampir sama, yaitu mempersiapkan *legacy* MPR untuk MPR periode berikutnya.

Dalam Rapim pada Senin, 29 April 2024, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa MPR RI periode 2019 – 2024 sudah dan sedang mempersiapkan berbagai *legacy* (peninggalan), antara lain Forum MPR Se-Dunia, UU MPR, pembentukan Badan Kehormatan MPR, Tata Tertib MPR RI yang baru, serta bentuk hukum dan substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Di antara *legacy-legacy* itu

sudah ada yang terbentuk (yaitu Forum MPR Se-Dunia) dan ada yang sedang dalam proses pembahasan lebih mendalam.

Pimpinan MPR menggelar Rapim berikutnya dengan mengundang Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan di Ruang Delegasi, Komplek Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 16 Mei 2024. Rapim MPR bersama Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR ini dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo dan diikuti Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Amir Uskara, Syarifuddin Hasan, dan Lestari Moerdijat, Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR Agun Gunandjar Sudarsa dan Ajbar. Hadir pula Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan Daryatmo Mardiyanto, Wakil Ketua Rambe Kamarul Zaman, Martin Hutabarat, Dossy Iskandar Prasetyo, Masrifah, dan Djamal Aziz.

Dalam Rapim bersama Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan ini, Pimpinan MPR menerima laporan kajian yang dilakukan Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan tentang sejumlah isu yang akan menjadi *legacy* MPR periode 2019 – 2024, yaitu soal pembuatan UU MPR, perubahan Tata Tertib MPR, bentuk hukum PPHN, pembentukan Badan Kehormatan, dan tata cara pelantikan presiden.

Hasil kajian dari Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan ini kemudian dibahas dalam Rapat Gabungan Pimpinan



MPR bersama Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di Ruang GBHN Bawah, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis, 30 Mei 2024. Ragab dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan diikuti Wakil Ketua Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Amir Uskara, dan Fadel Muhammad.

Selain itu, Ragab diikuti para pimpinan fraksi seperti Ketua Fraksi Partai Golkar Idris Laena, Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman, Ketua Fraksi PKS Tifatul Sembiring, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan TB. Hasanuddin, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ferdiansyah, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Elnino M. Husein, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Syarif Abdullah, Sekretaris Fraksi PKB Neng Eem Marhamah, Sekretaris Fraksi PAN Ahmad Rizki Sadig, Sekretaris Fraksi PPP Muhammad Iqbal, Bendahara Fraksi Partai Nasdem Fadholi, dan Bendahara Fraksi Partai Demokrat Aliyah Mustika.

Ragab menghasilkan satu kesepakatan, yaitu membawa Rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk diambil keputusan dalam Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan pada 27 September 2024. Badan Pengkajian dan Komisi Kajian

Ketatanegaraan telah mempersiapkan Rancangan PPHN ini. "Setelah diperdalam oleh Fraksi dan Kelompok DPD, kemudian akan dibahas kembali dalam Ragab pada awal Juli 2024 dan pertengahan Agustus 2024, selanjutnya dibawa dalam Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan pada akhir September 2024," ujar Bamsoet usai Ragab.

Selain Rancangan PPHN, lanjut Bamsoet, MPR periode ini juga akan berusaha meninggalkan warisan berupa naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) MPR, Perubahan Tata Tertib MPR, dan Pembentukan Badan Kehormatan MPR. "Untuk itu Fraksi dan Kelompok DPD akan memperdalam kembali berbagai naskah akademik RUU tentang MPR, Rancangan Perubahan Tata Tertib MPR, dan konsep Pembentukan Badan Kehormatan MPR yang telah disiapkan oleh Badan Pengkajian MPR," tuturnya.

Dari Forum MPR Se-Dunia Hingga Rancangan UU MPR

Mengacu pada rangkaian Rapim MPR tersebut, di antara *legacy-legacy* yang disiapkan MPR periode 2019 – 2024, ada *legacy* yang sudah ada atau terbentuk, yaitu

Forum MPR Se-Dunia, dan ada *legacy* yang masih memerlukan pendalaman, yaitu Rancangan PPHN, Rancangan Perubahan Tata Tertib MPR, pembentukan Badan Kehormatan MPR, dan naskah akademik RUU tentang MPR. Berikut sekilas uraian dari *legacy-legacy* yang disiapkan MPR tersebut.

Pertama, *legacy* yang sudah terbentuk adalah Forum MPR Se-Dunia (*Forum for World Consultative Assembly*). MPR RI menginisiasi pembentukan Forum MPR Se-Dunia ini. Forum ini lahir dari Konferensi Internasional yang diikuti Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, atau lembaga sejenis MPR (*Consultative Assembly*) di Bandung, Jawa Barat, pada 24-26 Oktober 2022. Dalam Konferensi Internasional itulah disepakati nama yang sebelumnya Forum Majelis Syuro Se-Dunia menjadi Forum MPR Se-Dunia.

Konferensi Internasional itu diikuti Pimpinan dan Anggota MPR, Majelis Syuro atau lembaga sejenis MPR, dari 15 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), serta *Parliamentary Union of the OIC Members States/PUIC* (Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam/OKI),

dan *Muslim World League* (Liga Muslim Dunia), menyepakati dibentuknya Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia (Forum MPR Se-Dunia) yang digagas MPR RI dan akan bekerjasama dengan Perhimpunan Parlemen Negara-Negara Anggota OKI (PUIC). Kesepakatan diambil melalui musyawarah secara mufakat dalam sidang yang berlangsung hingga dini hari setelah masing-masing delegasi menyampaikan berbagai pandangan dan pendapatnya.

Kedua, legacy Rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). MPR periode 2019 – 2024 melalui Badan Pengkajian MPR telah menyelesaikan draf PPHN. PPHN menjadi salah satu *legacy* MPR guna memastikan pembangunan bangsa berkelanjutan dan berkesinambungan. Namun, pengesahan PPHN tidak mungkin rampung dalam sisa masa jabatan MPR periode saat ini yang hanya tinggal empat bulan lagi. Karena itu, MPR periode 2024 – 2029 diharapkan dapat mengesahkan PPHN ini.

Seperti diketahui, salah satu rekomendasi MPR Periode 2014 – 2019 adalah mengkaji lebih komprehensif PPHN. Menindaklanjuti rekomendasi itu, MPR periode 2019 – 2024 telah menyelesaikan kajian dalam bentuk draf PPHN. Nanti, MPR periode 2024 – 2029 hanya tinggal memilih bentuk hukumnya, apakah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, atau diatur melalui undang-undang.

Jika MPR periode 2024 – 2029 bisa menyelesaikan di awal tahun masa jabatan (Sidang Paripurna Awal Masa Jabatan pada Oktober 2024) maka pada tahun 2025 atau setidaknya tahun 2026, Indonesia sudah memiliki PPHN yang memiliki kekuatan hukum sebagai *road map* (peta jalan) pembangunan bangsa. Sebab, Indonesia membutuhkan perencanaan pembangunan jangka panjang yang holistik, konsisten, berkelanjutan, dan berkesinambungan dari satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya, antara pusat dan daerah.

Ketiga, legacy berupa Rancangan Perubahan Tata Tertib MPR. Pimpinan MPR berpandangan Tata Tertib MPR perlu diubah untuk menyesuaikan beberapa ketentuan. Antara lain, mengenai kewenangan MPR untuk mengeluarkan Tap MPR yang bersifat *beschikking* (penetapan) dan bukan *regeling* (mengatur) untuk menetapkan

Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Keputusan KPU; penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR untuk memfasilitasi penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara secara langsung; dan perubahan substantif dan redaksional. Perubahan yang bersifat substantif dengan mengubah klausul yang ada dalam pasal maupun ayat tertentu sesuai dengan dinamika kenegaraan, antara lain terkait jenis keputusan, pelaksanaan wewenang dan tugas MPR.

Keempat, legacy tentang pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR. Sesuai Tap MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, MPR perlu menjalankan etika kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis. Seharusnya, MPR

DPR maupun DPD telah memiliki Dewan atau Badan kehormatan sendiri. Karena itu, Badan Pengkajian memandang tidak perlu lagi MPR membentuk Mahkamah Kehormatan Majelis. Namun, soal Badan Kehormatan Majelis ini diserahkan kepada Fraksi dan Kelompok DPD untuk mengkaji dan memperdalam.

Rancangan UU MPR

Kelima, legacy berupa Rancangan Undang-Undang MPR (RUU MPR). “*Legacy* yang sedang berjalan adalah mengenai kehadiran UU MPR. Sangat penting bagi lembaga keparlemen seperti MPR, DPR, dan DPD untuk menjalankan amanat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Khususnya, Pasal 2 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C Ayat



Bambang Soesatyo

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

membentuk Mahkamah Kehormatan Majelis sebagaimana DPR mempunyai Mahkamah Kehormatan Dewan, dan DPD memiliki Badan Kehormatan Dewan. Memang semua anggota MPR adalah anggota DPR atau DPD, tetapi ada berbagai kegiatan khas di MPR yang diikuti anggota MPR, dan itu tidak terdapat di DPR atau DPD, misalnya kegiatan terkait Sosialisasi Empat Pilar MPR, kegiatan di badan-badan, kegiatan pengkajian atau perubahan terhadap UUD.

Namun, terkait Mahkamah Kehormatan Majelis ini, Badan Pengkajian MPR berpendapat bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, padahal baik

(4), yang mengamanatkan bahwa kelembagaan MPR, DPR, dan DPD diatur dengan undang-undang tersendiri,” kata Bamsuet dalam Rapat Pimpinan pada Senin, 29 April 2024.

Menurut Bamsuet, pemisahan UU MPR, UU DPR, dan UU DPD sangat penting mengingat masing-masing lembaga memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. “Sehingga perlu ada UU MPR, UU DPR, dan UU DPD yang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Tidak seperti saat ini yang bergabung dalam UU MD3. MPR RI melalui Badan Pengkajian sudah menyelesaikan usulan naskah akademik dan rancangan UU



Sjarifuddin Hasan

MPR,” jelasnya. Seperti diketahui, pengaturan kelembagaan MPR, DPR, dan DPD melalui UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Jauh sebelumnya, pada Oktober 2022, Bamsoet sudah melempar wacana pembentukan UU tentang MPR. Bahkan, MPR sendiri sudah menggulirkan wacana pembentukan UU MPR sejak tahun 2018 – 2019. Malah, MPR sudah menerbitkan dua buku berkaitan dengan dengan pembentukan UU MPR. Buku pertama adalah buku hasil kajian Badan Pengkajian dengan judul “Pembentukan Undang-Undang MPR” yang terbit pada tahun 2017. Buku tersebut berisi himpunan pemikiran mengenai urgensi dan analisis perlunya pembentukan Undang-Undang tentang MPR.

Pada tahun 2018, MPR kembali menerbitkan buku dengan judul “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Buku ini merupakan dokumentasi dari kegiatan lomba Academic Constitutional Drafting dengan tema “Pembentukan Undang-Undang MPR Tersendiri”. Dokumentasi ini merupakan presentasi Academic Constitutional Drafting dari para finalis, yaitu Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Jambi, dan Universitas Pelita Harapan (lihat tulisan bagian kedua “Ruang Lingkup Materi dan Muatan RUU MPR”).

Jadi, MPR sebenarnya sudah mempunyai berbagai naskah akademik untuk penyusunan Rancangan UU tentang MPR. Bahkan, MPR terus menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk merumuskan naskah akademik UU tentang MPR. Pada November 2023, misalnya, MPR menjalin kerjasama dengan FISIP Universitas Brawijaya untuk penyusunan naskah akademik pembuatan RUU tentang MPR. Karena itulah, dalam Ragab dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, Bamsoet meminta Fraksi dan Kelompok DPD memperdalam kembali berbagai naskah akademik RUU tentang MPR.

Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., mengungkapkan, RUU tentang MPR masih dalam pembahasan dan kajian lebih lanjut. Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan sedang bekerja keras mempersiapkan draf RUU tentang MPR. “Sehingga pada saat Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan mendatang kita sudah memiliki draf RUU tentang MPR. Di sidang paripurna itulah kita akan meminta persetujuan dan mengambil keputusan,” katanya kepada *Majelis*.

Menurut Sjarief Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan, UU tentang MPR dirasakan penting dan mendesak karena menyangkut soal penguatan kelembagaan MPR. “Penguatan kelembagaan MPR ini sangat penting. Untuk menguatkan kelembagaan MPR, salah satu caranya adalah dengan menghadirkan UU tentang



Idris Laena



Daryatmo Mardiyanto

MPR. Dengan kehadiran UU tentang MPR maka keberadaan lembaga MPR pasti akan lebih baik lagi dibanding saat sekarang,” ujarnya.

Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan, Daryatmo Mardiyanto, juga mengungkapkan hal serupa, bahwa RUU tentang MPR masih dalam pembahasan dan kajian. “Kita ditugaskan untuk mengkaji, dan kita sedang melaksanakan kajian. Saya sedang menuju rapat di Komisi Kajian Ketatanegaraan,” ujarnya singkat kepada *Majelis*. Daryatmo mengaku, belum bisa menjelaskan lebih banyak Rancangan UU tentang MPR, baik soal naskah akademik maupun draf RUU MPR ini karena masih dalam kajian dan pembahasan di Komisi Kajian Ketatanegaraan.

Sementara itu, dalam sebuah wawancara, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Idris Laena, menilai, wajar apabila MPR diatur dengan UU tersendiri. Pasalnya, secara filosofis MPR memiliki kewenangan tertinggi di antara lembaga-lembaga negara yang lain. Antara lain kewenangan mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan/atau wakil presiden, serta dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden pada masa jabatannya.

“Jadi, secara filosofis MPR memiliki kewenangan tertinggi di antara lembaga-lembaga negara yang lain. Maka, untuk melaksanakan wewenang, tugas, dan fungsinya, wajar bila MPR diatur dengan undang-undang tersendiri, atau UU tentang MPR,” katanya. □

MBO/BSC

Ruang Lingkup Materi Muatan RUU MPR

Rancangan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki arah pengaturan yang memperkuat kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat serta mengoptimalkan pengaturan mengenai pelaksanaan wewenang dan tugas MPR.

KETUA MPR Bambang Soesatyo dan Pimpinan MPR lainnya pada periode 2019 – 2024 ingin meninggalkan *Legacy* di akhir masa jabatan. *Legacy* (warisan) itu di antaranya Forum MPR Se-Dunia, UU MPR, Pembentukan Badan Kehormatan MPR, Tata Tertib MPR RI yang baru, serta Bentuk Hukum dan Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Rancangan UU MPR merupakan salah satu *legacy* MPR periode 2019 -2024 yang saat ini masih berjalan. Pada akhir masa jabatan diharapkan penyusunan UU MPR ini

Jakarta, Senin, 29 April 2024.

Sesungguhnya dalam hal pembuatan UU MPR, ide dan gagasan penyusunan UU tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukanlah hal yang baru. Ide itu sebenarnya sudah muncul dalam kegiatan serap aspirasi masyarakat sosialisasi Empat Pilar MPR pada periode 2014 – 2019. Sejak Badan Pengkajian dibentuk tahun 2014, sudah dilakukan kajian-kajian soal penambahan tugas MPR yang diatur dalam undang-undang. Hasilnya, pada tahun 2017, Badan Pengkajian MPR menerbitkan sebuah

tugas konstitusi MPR.

Langkah untuk pembentukan Undang-Undang tentang MPR adalah membuat terlebih dulu naskah akademik. Pada tahun 2018, MPR menggelar kegiatan lomba Academic Constitutional Drafting dengan tema “Pembentukan Undang-Undang MPR Tersendiri”. Finalis lomba Academic Constitutional Drafting yang telah dinilai dan melakukan presentasi berasal dari Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Jambi, dan Universitas



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sudah rampung dan diwariskan kepada MPR periode berikutnya.

“*Legacy* yang sedang berjalan, yakni mengenai kehadiran UU MPR. Sangat penting bagi lembaga keparlemen seperti MPR, DPR, dan DPD unuk menjalankan amanat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Khususnya, Pasal 2 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22 Ayat (4) yang mengamankan bahwa kelembagaan MPR, DPR, dan DPD diatur dengan undang-undang tersendiri,” ujar Bamsuet dalam Rapat Pimpinan MPR RI, di Ruang Rapat Pimpinan Gedung Nusantara III Lantai 9, Komplek Parlemen

buku berjudul: “Pembentukan Undang-Undang MPR”.

Buku tersebut merupakan himpunan pemikiran mengenai urgensi dan analisis perlunya pembentukan Undang-Undang tentang MPR. Sebagai sebuah lembaga kedaulatan rakyat, MPR memiliki tugas dan kewenangan yang sangat penting. Karena itu, perlu penguatan terkait dengan tugas dan kewenangan konstitusionalnya. Maka, sepantasnya apabila MPR diatur secara lebih khusus dalam undang-undang tersendiri. Dengan kata lain, perlu instrumen atau perangkat hukum yang mendukung pelaksanaan wewenang dan

Pelita Harapan. Laporan akhir penyelenggaraan kegiatan lomba Academic Constitutional Drafting ini kemudian didokumentasikan dalam bentuk buku yang diberi judul: “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Naskah Akademik biasanya menjadi acuan dalam penyusunan sebuah undang-undang. Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan

rancangan undang-undang. Buku “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat” menjadi dasar dalam penyusunan UU tentang MPR.

Mengacu pada buku naskah akademik tersebut, pembentukan UU tentang MPR dilatarbelakangi keterbatasan pengaturan UUD dan UU MD3 berkaitan dengan penjabaran tugas, fungsi, wewenang, pengaturan hak dan kewajiban anggota MPR, serta alat kelengkapan MPR. Sebagai salah satu lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, namun tidak semua hal yang berkaitan dengan MPR diatur dalam UUD. Atas keterbatasan materi muatan UUD tersebut, maka UUD menyebutkan pengaturan MPR dijabarkan lebih lanjut dalam sebuah undang-undang.

Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyebutkan “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Jadi, pada dasarnya, pengaturan terhadap lembaga MPR dalam sebuah undang-undang tersendiri merupakan perintah UUD NRI Tahun 1945.

Apalagi frasa “diatur dengan undang-undang” dalam lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diartikan sebagai perlu adanya undang-undang tersendiri yang dibentuk untuk kepentingan itu. Dengan kata lain, rumusan yang terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dapat diartikan bahwa diperlukan adanya undang-undang tersendiri yang mengatur tentang MPR.

Selama ini pengaturan terhadap lembaga MPR dijadikan satu paket dengan lembaga lain, yaitu DPR, DPD, dan DPRD, dalam UU MD3 (UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Akibatnya, pengaturan terhadap lembaga MPR menjadi terbatas. UUD MD3 tidak mengatur, misalnya, soal pembentukan kelembagaan alat pendukung (alat kelengkapan) MPR, seperti badan keahlian semisal Badan Pengkajian atau Komisi Kajian Ketatanegaraan, dan lainnya. Dengan demikian, perencanaan, penyusunan,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi MPR secara kelembagaan dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya pun menjadi terbatas.

Atas dasar itulah maka berkembang pemikiran tentang perlunya undang-undang tersendiri mengenai kelembagaan MPR, sebagaimana amanat konstitusi serta guna mengoptimalkan pengaturan mengenai pelaksanaan wewenang dan tugas MPR dalam menjalankan misinya sebagai lembaga yang dianggap sebagai penjelmaan rakyat.

Ruang Lingkup Materi Pengaturan

Lalu apa saja yang diatur dalam RUU MPR? Mengacu pada Naskah Akademik itu, Rancangan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki arah pengaturan yang memperkuat kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Termasuk dalam hal ini, antara lain merumuskan dan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) secara konstitusional, mengeluarkan



Tap MPR dalam hal pelantikan Presiden, mengembalikan perwakilan golongan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Berikut ini beberapa pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang MPR mengacu pada buku Naskah Akademik itu. *Pertama*, pengaturan mengenai keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat: Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan Perwakilan Golongan. Dalam Undang-Undang ini, keanggotaan MPR tidak hanya berasal dari DPR dan DPD, melainkan terdapat pula anggota MPR yang

berasal dari golongan-golongan yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting, karena DPR dan DPD hanya merepresentasikan kepentingan politik dan daerah, sementara golongan-golongan yang ada di masyarakat lebih dinamis yang merepresentasikan kepentingan-kepentingan lain yang ada di masyarakat, seperti kepentingan agama, pendidikan, profesi, dan lain-lain.

Kedua, pengaturan mengenai menghidupkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui instrument peraturan MPR. Sejatinya, pengaturan kembali mengenai PPHN sebagai kewenangan MPR dalam tataran normatif tidaklah menyalahi konstitusi. MPR-lah yang paham kemana pembangunan Indonesia harus berjalan sesuai dengan pedoman, arah, tujuan konstitusi. MPR mengetahui apa yang harus ditetapkan dalam rangka melakukan pembangunan dan mencapai tujuan konstitusi.

Ketiga, pengaturan mengenai kewenangan menerbitkan Ketetapan MPR terkait pelantikan presiden. Dalam Pasal 44 UU MD3 disebutkan bahwa “Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (1) ditetapkan dengan Ketetapan MPR.” Dalam RUU tentang MPR, MPR berwenang mengeluarkan Ketetapan MPR untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dibutuhkan demi menyediakan sebuah legitimasi yuridis penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih menindaklanjuti Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.

Keempat, pengaturan mengenai tugas menyelenggarakan Sidang Tahunan dan Sidang Istimewa MPR. Sidang Tahunan MPR tidak memiliki dasar hukum yang kuat, maka dalam RUU ini akan diatur secara normatif mengenai Sidang Tahunan MPR agar lebih kuat dan mengikat umum.

Kelima, pengaturan mengenai penormaan Badan Kelengkapan MPR. MPR membentuk badan untuk melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanatkan MPR. MPR memiliki tiga badan utama, yaitu Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran. Namun, ketiga badan tersebut belum diatur dalam tataran normatif dalam bentuk undang-undang. □

BSC



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., Wakil Ketua MPR RI

UU Tentang MPR Untuk Memperkuat Kelembagaan MPR

MASA jabatan Pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019 – 2024 akan berakhir pada September 2024. Pada akhir September 2024, MPR akan menggelar Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan. Pada sidang paripurna itulah, MPR menyampaikan hasil kerja selama masa jabatan 2019 – 2024. Pimpinan MPR menyebutkan, MPR masa jabatan 2019 – 2024 membuat beberapa legacy (peninggalan atau warisan) yang diberikan kepada MPR periode yang akan datang.

Dalam Rapat Pimpinan MPR pada akhir April 2024, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan, MPR sedang mempersiapkan beberapa legacy, antara lain Forum MPR Se-Dunia, UU MPR, pembentukan Badan Kehormatan MPR, Tata Tertib MPR RI yang baru, serta bentuk hukum dan substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

“Legacy yang sedang berjalan, yakni mengenai kehadiran UU MPR. Sangat penting bagi lembaga keparlemen seperti MPR, DPR, dan DPD masing-masing memiliki UU yang terpisah dan berdiri sendiri, tidak seperti saat ini yang bergabung dalam UU MD3,” katanya usai Rapim MPR, pada Senin, 29 April 2024.

Wacana Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang MPR bukanlah sesuatu yang baru. Wacana ini sudah muncul sejak MPR periode 2014 – 2019. Bahkan, Badan Pengkajian MPR sudah menerbitkan buku kajian berjudul “Pembentukan UU MPR” pada tahun 2017, dan buku dengan judul: “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang MPR”. Kini, Badan Pengkajian MPR sudah menyelesaikan usulan naskah akademik dan Rancangan UUMPR.

Dalam waktu dekat, MPR akan membicarakan RUU Tentang MPR ini dengan pimpinan lembaga parlemen

lainnya, yaitu Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD. MPR berharap, pada akhir masa jabatan 2019 – 2024, MPR telah meninggalkan legacy berupa RUU Tentang MPR kepada MPR periode berikutnya. Selanjutnya MPR periode 2024–2029 akan mengupayakan RUU Tentang MPR masuk dalam pembahasan legislasi di DPR.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang RUU Tentang MPR ini, berikut perbincangan Majelis dengan Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA. Petikannya.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan MPR sedang mempersiapkan legacy berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang MPR, bisa dijelaskan sejauh ini bagaimana proses dan tahapan yang sudah dilalui untuk mempersiapkan pembentukan RUU MPR ini?

Proses dan tahapan yang sedang kita lalui

untuk pembentukan RUU MPR ini masih dalam pembahasan dan kajian lebih lanjut. Secara intensif kita melakukan diskusi dengan berbagai kalangan, sebelum pada akhirnya RUU MPR ini diajukan dalam Sidang Paripurna MPR yang akan datang. Untuk memutuskan persoalan penting RUU MPR ini maka tidak ada forum lain kecuali pada Sidang Paripurna MPR. Dalam Sidang Paripurna yang dihadiri seluruh anggota MPR itulah nanti kita akan meminta persetujuan dari anggota dan mengambil keputusan.

Masih banyak waktu sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR nanti. Karena itulah, sebelum Sidang Paripurna, Badan Pengkajian MPR bersama Komisi Kajian Ketatanegaraan sedang bekerja keras untuk mempersiapkan draf RUU tentang MPR. Sehingga pada saat Sidang Paripurna MPR kita sudah memiliki draf RUU tentang MPR. Bila disetujui Sidang Paripurna, kita tinggal mengesahkan usulan RUU tentang MPR ini, dan tidak lagi tegopoh-gopoh atau mulai menyusun RUU tentang MPR.

Menurut Bapak, apa urgensi MPR untuk memiliki UU tersendiri (UU tentang MPR). Apakah UU tentang MPR ini memang diperlukan? Apa yang menjadi latar belakangnya?

Berkaitan dengan urgensi MPR untuk memiliki UU tersendiri, kita merasakan hal yang paling penting dan mendesak saat ini adalah soal penguatan kelembagaan MPR. Penguatan kelembagaan MPR ini sangat penting. Untuk menguatkan kelembagaan MPR, salah satu caranya adalah dengan menghadirkan UU tentang MPR. Jadi, kalau nanti sudah ada UU tentang MPR, maka adanya kekhawatiran tentang kelembagaan MPR dan anggota MPR bisa dieliminir. Sebab, semua hal yang berkaitan dengan kelembagaan MPR dan anggota MPR sudah diatur dengan sangat jelas. Selain itu, dengan kehadiran UU tentang MPR ini maka keberadaan lembaga MPR pasti akan lebih baik lagi dibanding saat sekarang.

Selama ini, pengaturan tentang lembaga legislatif, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sudah diatur dalam UU MD3 (UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD)

yang telah beberapa kali mengalami perubahan. Selama itu pula, pengaturan tentang lembaga negara tidak mengalami permasalahan. Mengapa sekarang diperlukan UU tersendiri yang mengatur tentang lembaga legislatif?

Benar bahwa pengaturan lembaga legislatif, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dimasukkan dalam satu paket, yaitu UU No. 17 Tahun 2024 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang telah beberapa kali mengalami perubahan atau revisi. Tapi, perlu dicatat, UU MD3 itu bukan hanya untuk MPR saja, tetapi juga lembaga legislatif lainnya. Bahkan, dalam UU MD3, paling banyak diatur tentang DPR. Pertanyaannya, bagaimana

hukum untuk mengatur hal ihwal berkaitan dengan kelembagaan MPR?

Karena itu kita memang memerlukan kehadiran UU tentang MPR. Artinya, kita membutuhkan UU yang khusus mengatur tentang kelembagaan MPR, yang tidak digabung dalam pengaturan tentang DPR, DPD, dan DPRD dalam satu undang-undang.

Sejauh ini bagaimana tanggapan dari fraksi-fraksi di MPR dan anggota DPR pada umumnya?

Saya kira semua fraksi merasakan adanya kebutuhan tentang UU MPR. Jadi, mudah-mudahan tidak ada kendala dalam pengusulan RUU tentang MPR ini. Ke depan, dengan UU tentang MPR ini maka kelembagaan MPR menjadi semakin kuat dan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

hal-hal lain tentang MPR yang tidak diatur dalam UU MD3, misalnya kesalahan yang dilakukan Pimpinan atau anggota MPR? Apakah ada jalan keluarnya? Soal ini memang belum banyak diatur dan belum ada jalan keluarnya.

Oleh karena itu, kita memang memerlukan UU yang secara khusus mengatur tentang MPR. Dengan adanya UU tentang MPR maka ketika Pimpinan MPR atau anggota MPR melakukan kesalahan ada jalan keluar dan tata caranya. Itulah yang mendorong kita berkeyakinan perlunya UU tentang MPR.

Apakah UU MD3 bisa dikatakan sudah tidak lagi memadai sebagai payung

bisa bekerja lebih baik lagi dibanding saat sekarang.

Apakah ada tenggat waktu penyelesaian UU tentang MPR?

Pada MPR periode saat ini sudah akan berakhir. MPR periode 2019–2024 ini hanya mempersiapkan RUU tentang MPR. Selanjutnya, MPR periode berikutnya (2024–2029) yang berkerja dan berupaya untuk menyelesaikan RUU tentang MPR menjadi undang-undang. Saya yakin dalam pengusulan RUU tentang MPR dan pembahasan RUU MPR nanti tidak menghadapi kendala dan masalah yang berarti. □

Rapat Pimpinan MPR RI

Bahas **Perubahan** Tatib MPR, Rancangan UU MPR Hingga Bentuk Hukum PPHN



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menurkan, rapat pimpinan (Rapim) MPR RI memutuskan akan menggelar rapat gabungan pimpinan MPR RI dengan pimpinan fraksi DPR dan kelompok DPD pada tanggal 30 Mei 2024. Selain itu, Rapim MPR juga memutuskan Sidang Paripurna MPR akhir masa jabatan yang akan diikuti seluruh anggota MPR dari unsur DPR dan DPD diselenggarakan tanggal 27 September 2024.

“Rapat gabungan pimpinan MPR akan membahas sejumlah hasil dari Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR untuk hasilnya dibawa ke Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan. Beberapa hal yang akan dibahas, antara lain perubahan Tata Tertib (Tatib) MPR RI, bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), perubahan UUD NRI Tahun 1945, pembuatan UU MPR, tata cara pelantikan presiden dan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden serta jenis putusan MPR setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945,” ujar Bamsoet usai memimpin Rapim MPR bersama Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR di Gedung Parlemen Jakarta, Kamis (16/5/24).⁹

Hadir, antara lain Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Amir Uskara, Sjarifuddin Hasan dan Lestari Moerdijat, Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR Agun

Gunandjar Sudarsa dan Ajbar.

Hadir pula Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan Daryatmo Mardiyanto, Wakil Ketua Rambe Kamarul Zaman, Martin Hutabarat, Dossy Iskandar Prasetyo, Masrifah dan Djamal Aziz.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menurkan, materi perubahan Tatib MPR yang diusulkan terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Materi perubahan bersifat substantif dan redaksional. Perubahan yang bersifat substantif dengan mengubah klausul yang ada di dalam pasal maupun ayat tertentu dengan dinamika ketatanegaraan. Antara lain terkait jenis keputusan, pelaksanaan wewenang dan tugas MPR.

“Perubahan secara redaksional dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan substansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menyempurnakan redaksi agar sesuai kaedah bahasa Indonesia dan bahasa hukum. Rumusan pasal yang diubah keseluruhan berjumlah 88 pasal,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, selama ini perubahan Tata Tertib MPR dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan MPR RI setelah usul perubahan disetujui dalam rapat gabungan MPR. Berdasarkan hasil kajian Badan Pengkajian MPR, hal tersebut dinilai kurang tepat, sebab perubahan atas suatu peraturan dilakukan dengan aturan yang



sejenis atau setingkat di atasnya dalam hal ini peraturan MPR tentang Tata Tertib MPR.

Karena itu, diusulkan sebaiknya bentuk hukum perubahan Tatib MPR juga dengan Peraturan MPR yang bersifat pengaturan (regelling) dan tidak dengan Keputusan Pimpinan MPR yang berada di bawah Peraturan MPR dan bersifat penetapan (beschikking).

“Sebelum dilakukan perubahan atas Tatib yang pertama perlu dilakukan adalah perubahan atas pasal tentang tata cara perubahan Tatib dan pasal tentang tata cara pembentukan Panitia Ad Hoc. Dalam hal ini perlu dibedakan antara pembentukan Panitia Ad Hoc untuk mengkaji usul perubahan UUD dengan pembentukan Panitia Ad Hoc untuk mengkaji selain perubahan UUD, semisal perubahan

atau pembuatan Tatib baru,” urai Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini menambahkan, Rapat Gabungan MPR juga akan membahas lebih lanjut tentang perlu tidaknya pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR RI. Badan Pengkajian MPR berpendapat bahwa mengingat MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, yang masing-masing lembaga baik DPR maupun DPD telah memiliki Dewan atau Badan kehormatan tersendiri. Karena itu Badan Pengkajian memandang tidak perlu lagi MPR membentuk Mahkamah Kehormatan MPR.

“Rapat gabungan juga akan membahas Rancangan UU MPR yang terpisah dari UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) serta PPHN. Nantinya, MPR periode sekarang akan menghasilkan rekomendasi terkait PPHN dan UU MPR disertai draf materi Rancangan PPHN dan UU MPR untuk dilaksanakan pada MPR berikutnya,” pungkas Bamsuet. □

SILATURAHIM KEBANGSAAN

Bertemu Wakil Presiden RI Ke-6 Try Sutrisno

Terkait Kajian Mendalam Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Secara Menyeluruh



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengungkapkan bahwa Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno menekankan bahwa sistem pemerintahan Indonesia yang dibuat oleh Presiden Soekarno dan para pendiri bangsa bukanlah parlementer ataupun presidensial ala barat. Melainkan sistem tersendiri yang diambil dari Pancasila sebagai jati diri bangsa. Yakni, dengan menempatkan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara yang merumuskan dan menetapkan haluan negara.

Selesai dilantik menjadi Pimpinan MPR RI

pada tahun 2019, Bamsoet bersama pimpinan MPR RI lainnya langsung melakukan Silaturahmi Kebangsaan bertemu Try Sutrisno untuk meminta nasihat dan arahan. Kini, menjelang akhir masa jabatan, Pimpinan MPR RI kembali bertemu Try Sutrisno untuk menyampaikan bahwa MPR RI 2019-2024 sudah menyelesaikan draf rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai road map pembangunan bangsa, sekaligus dengan rekomendasi bentuk hukumnya.

Draf tersebut, lanjut Bamsoet, akan diserahkan kepada MPR RI periode 2024-2029 agar bisa ditelaah lebih lanjut. Jika

lancar, pada awal tahun 2025, Indonesia sudah bisa memiliki PPHN agar pembangunan bangsa bisa berjalan berkelanjutan dan berkesinambungan, sesuai cita-cita pendiri bangsa serta para sesepuh dan guru bangsa.

“Melalui PPHN, para Capres-Cawapres serta calon yang maju dalam Pilkada Serentak 2029 tidak akan kesulitan merumuskan visi dan misinya, karena tinggal menyesuaikan dengan PPHN,” ujar Bamsoet usai melakukan Silaturahmi Kebangsaan dengan Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, di Kediaman Try Sutrisno, Jakarta, Senin (20/



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

5/24). Turut hadir dalam pertemuan itu, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dan Amir Uskara. Serta hadir mendampingi Try Sutrisno, antara lain Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, dan Letjen (Purn) Bambang Darmono.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, MPR RI juga sedang menyiapkan kajian tentang perbaikan sistem politik dan ketatanegaraan sesuai jiwa Pancasila, khususnya sebagaimana tercantum dalam Sila ke-empat, “kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.” Sehingga politik dan ketatanegaraan, termasuk dalam hal penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tidak lagi seperti saat ini yang terkesan karut marut.

MPR RI juga sedang menyelesaikan kajian terkait usulan Try Sutrisno bersama berbagai kalangan purnawirawan tentang pentingnya Indonesia kembali ke UUD 1945 yang asli untuk kemudian dilakukan penyempurnaan melalui adendum. Di dalam kajian tersebut, juga akan dimuat tentang ketentuan

peralihan, sehingga berbagai lembaga negara yang keberadaannya eksis karena dihasilkan dari proses amandemen ke-satu hingga ke-empat, mereka akan tetap ada dan tidak hilang begitu saja lantaran kembali ke UUD 1945 yang asli.

“Berbagai kajian tentang PPHN maupun kembali ke UUD 1945 yang asli, tidak lain juga untuk menyukseskan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mengingat dalam berbagai statementnya, beliau juga seringkali menyampaikan pentingnya Indonesia memiliki perencanaan pembangunan dan juga semangat kembali ke UUD 1945. Jika Presiden dan MPR sudah memiliki kesamaan pandangan, proses menghadirkan PPHN dan amandemen terbatas konstitusi menjadi lebih mudah. Bisa dilakukan di tahun 2025, di awal masa pemerintahan Pak Prabowo. Terlebih berbagai kajiannya sudah dipersiapkan sejak saat ini oleh MPR RI 2019-2024,” jelas Bamsuet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, setelah dengan Try Sutrisno, Silaturahmi Kebangsaan MPR RI selanjutnya akan bertemu dengan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Haz, Wakil Presiden RI ke-10, dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden RI ke-11 Boediono. Puncaknya bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo serta Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Secara khusus, pimpinan MPR RI juga akan melakukan Silaturahmi Kebangsaan dengan Ketua MPR RI ke-10 Amien Rais yang memimpin MPR RI pada tahun 1999-2004, untuk meminta pandangan beliau terkait hasil proses amandemen konstitusi yang dilakukan MPR RI sejak amandemen ke-satu tahun 1999 hingga amandemen ke-empat tahun 2002, terhadap cerminan kehidupan kebangsaan saat ini. Apakah sudah sesuai dengan cita-cita awal pada saat melakukan amandemen, ataukah masih ada hal lain yang perlu disempurnakan,” pungkas Bamsuet. □



Bertemu Wapres RI ke-11 Boediono

Tegaskan Pentingnya Indonesia Miliki Haluan Negara



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi berbagai pandangan, saran, dan masukan Wakil Presiden RI ke-11 Prof. Boediono kepada MPR RI dalam proses penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ada tiga hal penting yang disampaikan, yakni: pembangunan ekonomi dan politik harus berdampingan dan tidak saling bertentangan; pembangunan manusia dengan mengedepankan sektor pendidikan dan kesehatan; pembangunan institusi dan state building sebagai soft infrastructure, dengan memaksimalkan kinerja birokrasi sebagai pelaksana program pembangunan, serta penegakan hukum dalam menjamin pelaksanaan tata negara, pemerintahan, dan masyarakat.

Prof. Boediono menyampaikan pentingnya Indonesia memiliki haluan negara sebagai program perencanaan pembangunan jangka panjang yang bersifat implementatif. Artinya, bukan rencana di awang-awang yang enak dibaca, namun sulit diwujudkan.

Implementatif, yakni harus dapat diwujudkan dalam jangka waktu 5, 10, hingga 15 tahun, berkesinambungan dari satu pemerintahan ke pemerintahan penggantinya.

“Prof. Boediono menekankan, dalam penyusunan pembangunan jangka panjang yang implementatif harus dilandasi

perhitungan yang sistematis, objektif, dan teknokratis. Hal ini sedang dilakukan oleh MPR RI dalam proses penyusunan rancangan PPHN dengan melibatkan banyak pakar, termasuk meminta pandangan dari para mantan Presiden dan Wakil Presiden RI,” ujar Bamsuet usai melakukan Silaturahmi



Kebangsaan dengan Wakil Presiden RI ke-11 Prof. Boediono, di Jakarta, Rabu (22/5/24). Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dan Syarif Hasan.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Prof. Boediono mencontohkan keberhasilan Indonesia dalam melakukan perencanaan jangka panjang yang implementatif. Pada tahun 1974 dan 1979, Indonesia mendapatkan berkah 'oil boom'. Hasil ekspor minyak untuk APBN meningkat drastis dari Rp 118,2 miliar pada tahun 1969 menjadi Rp 4.404,2 miliar pada tahun 1979 atau tumbuh 3.296%. Jumlah tersebut melampaui pajak dan investasi.

Tahun 1990, World Bank membuat studi tentang perbandingan negara-negara yang mendapatkan berkah dari 'oil boom', seperti Indonesia, Meksiko, Nigeria, dan Venezuela, dalam mengelola keuntungan yang didapat. Hasilnya, Indonesia menjadi yang terbaik.

"Indonesia mampu memaksimalkan pemasukan negara dari ekspor minyak dalam berbagai program pembangunan yang tersusun rapi melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pemanfaatan 'oil boom' dilaksanakan pada akhir Repelita I, Repelita II, dan awal Repelita III. Salah satu hasilnya, Indonesia bisa swasembada pangan, produksi beras meningkat dari 19,3 juta ton pada tahun 1970 menjadi 32,7 juta ton di tahun 1981," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, kini Indonesia mendapatkan berkah dari berbagai kekayaan sumber daya alam. Antara lain, terdiri dari nikel terbesar di dunia, timah terbesar kedua di dunia, batubara termal/lignit terbesar ketiga dunia, bauksit terbesar keenam dunia, emas terbesar keenam di dunia; serta tembaga terbesar ketujuh dunia.

"Jika tidak didukung perencanaan jangka panjang, maka berkah pemasukan dari kekayaan sumberdaya alam kita bisa jadi malah akan menjadi sia-sia. Melalui perencanaan, kita bisa kembali swasembada pangan, meningkatkan akses anak-anak terhadap pendidikan, serta mengentaskan kemiskinan. Sebagaimana pernah terwujud pada saat kita mendapatkan berkah oil boom," jelas pungkas Bamsoet. □

Syarief Hasan: Soal Perekonomian Bisa Dijadikan Preferensi Pemerintah Mendatang



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., yang akrab disapa Syarif Hasan, termasuk salah satu Pimpinan MPR—selain Ketua MPR RI Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA., dan Wakil Ketua MPR RI Dr. Ahmad Basarah, SH., MH.— yang hadir dalam acara Silaturahmi Kebangsaan di kediaman Wakil Presiden RI ke-11 Prof. Dr. Boediono, di Kisanan Menteng, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

Dengan didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM., para Pimpinan MPR RI ini disambut langsung oleh tuan rumah yang tak lain adalah Wapres RI yang menjabat sejak 20 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014. Selanjutnya, rombongan Pimpinan MPR RI dipersilahkan masuk ke ruangan untuk dialog.

Di sesi akhir dialog, Boediono secara khusus memberikan cendera mata kepada para Pimpinan MPR dan Plt. Sesjen MPR, berupa buku karyanya setebal 312 halaman berjudul 'Ekonomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah'.

Usai dialog, kepada awak media, Syarif Hasan menyampaikan bahwa dialog dengan mantan Wapres Boediono berlangsung akrab dan hangat. "Beliau (Boediono) adalah seorang ekonom, banyak bercerita tentang situasi ekonomi di era tahun 50-an, 60-an hingga sekarang. Kami tidak membicarakan politik, sepanjang dialog, hanya soal ekonomi Indonesia," ungkapnya.

Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini menyebut bahwa pandangan Boediono terkait

perekonomian sangat bagus dan bisa dijadikan preferensi untuk pemerintahan mendatang.

"Ternyata beliau sangat memerhatikan laju perekonomian dan berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah selepas beliau menjadi Wapres. Banyak pandangan serta analisa beliau yang kami catat dan mudah-mudahan bisa menjadi masukan dalam kebijakan bidang perekonomian pemerintahan mendatang," ujar Syarif Hasan.

Disinggung seputar agenda-agenda besar MPR RI yang akan datang, dan beberapa di antaranya akan mengundang tokoh-tokoh bangsa, termasuk mantan Presiden dan mantan Wapres RI, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Republik Indonesia di era pemerintahan Presiden Ke-6 SBY ini, menyatakan, belum sampai membicarakan hal tersebut.

"Belum, kita belum sampai ke sana. Demikian juga untuk gelar acara kenegaraan seperti HUT Ke-79 Kemerdekaan RI dan Peringatan Hari Konstitusi juga belum diputuskan, sebab kami harus membuat aturan Tata Tertib MPR-nya dahulu, baru kita bisa putuskan bagaimana penyelenggaraan dan di mana lokasinya," jelas Syarif Hasan.

Seperti diketahui, saat ini para Pimpinan MPR RI sedang giat menggelar Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai elemen dan tokoh bangsa. Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, kegiatan ini dilakukan untuk menyerap berbagai pandangan dan aspirasi, untuk disusun dalam bentuk rekomendasi kepada MPR periode akan datang, termasuk rekomendasi kepada pemerintahan baru yang akan datang. □

DER

Bertemu Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla

Dukung Gagasan Prabowo Bentuk BLPN dan Haluan Negara



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi dukungan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla tentang pentingnya Indonesia melakukan pemisahan Kementerian Keuangan dan Badan Layanan Penerimaan Negara (BLPN) yang membawahi Pajak, Bea Cukai, dan PNPB serta sudah saatnya Indonesia kembali memiliki haluan negara sebagai perencanaan pembangunan nasional. Sekaligus menaruh harapan besar kepada pemerintah baru yang dipimpin Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo - Gibran dalam lima tahun ke depan untuk melakukan berbagai langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah yang lebih konkret demi kesejahteraan masyarakat.

"Pak JK mendukung rencana Pak Prabowo membentuk Badan Layanan Penerimaan Negara, sebagaimana mengacu berbagai negara maju, seperti Amerika. Melalui Badan Penerimaan Negara secara bertahap diharapkan dapat mendorong capaian tax ratio hingga menembus 23%," ujar Bamsot

usai bertemu Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, di Jakarta, Rabu (22/5/24).

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dan Syarif Hasan, Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Jusuf Kalla juga memberikan pandangan tentang

pentingnya penataan sistem Pemilu agar ke depannya lebih efektif, murah, mudah, dan efisien. Karenanya, perlu evaluasi menyeluruh sejak penyelenggaraan Pemilu langsung pada tahun 2004 hingga tahun 2024 agar bisa ditemui plus dan minus, kekurangan dan kelebihannya. Sehingga bisa dilakukan perbaikan secara menyeluruh.



“Kita sudah mengalami pasang surut dinamika berbagai Pemilu. Tidak ada salahnya jika pada pemerintahan akan datang, eksekutif dan legislatif dengan melibatkan berbagai pihak bisa segera duduk bersama. Pemilu sebagai pengejawantahan pemberian kedaulatan rakyat kepada para wakilnya di Parlemen maupun kepada Presiden-Wapres, tak boleh dinodai dengan praktik-praktik transaksional biaya tinggi dan money politic, yang ujungnya hanya akan membuat korupsi

menjadi merajalela,” jelas Bamsuet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, pekerjaan rumah lain yang harus menjadi perhatian, yakni tentang masih adanya ketidakpastian hukum. Padahal dalam pengelolaan perekonomian, kepastian hukum adalah yang utama.

“Sebagai contoh, saat ini saja ada sekitar 42 ribu peraturan di Indonesia, mulai dari undang-undang, peraturan presiden,

peraturan pemerintah, hingga peraturan gubernur, bupati, dan walikota yang diduga saling tumpang tindih. Hiper regulasi, disharmonisasi regulasi, hingga multi interpretasi regulasi tersebut berdampak pada terhambatnya kemajuan perekonomian, di antaranya iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia. Karenanya, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh melalui program legislasi review,” pungkas Bamsuet. □

Bertemu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono

Pimpinan MPR RI Terima Dukungan Usulan Kaji Ulang UUD NRI 1945 dan Sistem Pemilu



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mendukung usulan dilakukannya kaji ulang terhadap UUD NRI Tahun 1945, yaitu UUD hasil amendemen sebanyak empat kali serta sistem demokrasi pemilihan langsung. Pengkajian ulang terhadap UUD NRI Tahun

1945 harus dilakukan secara menyeluruh, hingga benar-benar didapati pasal mana saja yang sudah tepat dan mana yang belum tepat dengan kondisi saat ini.

“Pak SBY tadi menyampaikan meng-amandemen UUD NRI Tahun 1945 bukanlah hal ytabu, selama ada alasan yang tepat. Karenanya, sebelum mengamandemen UUD NRI Tahun 1945 perlu dilakukan kajian yang

mendalam dan menyeluruh, sehingga perubahan yang dilakukan tidak bersifat tambal sulam. Apa yang sudah benar dipertahankan, apa yang masih dianggap kurang diperbaiki,” ujar Bamsuet usai melakukan Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, di Cikeas, Bogor, Rabu (28/5/24).

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Wakil



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Syarif Hasan, dan Hidayat Nur Wahid itu, Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak empat kali. Namun, masih ditemukan inkonsistensi, kontradiksi, dan ketidakselarasan antara pasal dan ayat. Empat kali amandemen UUD 1945 juga tidak ada memuat 'pintu darurat' dalam konstitusi. Akibatnya, jika ada kedaruratan konstitusi, bangsa Indonesia tidak dapat melakukan apapun.

"Semisal tidak ada ketentuan dalam

konstitusi tentang tata cara pengisian jabatan publik, yang pengisian jabatannya dilakukan melalui Pemilu. Seperti jabatan presiden dan wakil presiden, anggota MPR RI, DPR RI, DPD RI, hingga DPRD Kabupaten/Kota, apabila Pemilu tidak bisa dilaksanakan tepat waktu karena gempa bumi megathrust, perang, kerusuhan massal, ataupun karena pandemi, sementara masa jabatannya telah berakhir," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, dalam hal sistem demokrasi

pemilihan langsung yang dihasilkan melalui empat kali amandemen konstitusi, justru menimbulkan berbagai persoalan moral hazard, seperti money politic. Akibatnya, para Caleg yang maju dalam Pileg membutuhkan dana kampanye yang tidak sedikit, sehingga seringkali terikat pada sponsor dan kekuatan oligarki.

"Pak SBY merasakan langsung parahnya money politic pada Pemilu 2024 lalu. Biaya yang dikeluarkan para Caleg pada saat pemilu cenderung mahal. Bahkan, disebut ada Caleg yang sampai mengeluarkan uang Rp 40 miliar hingga Rp 100 miliar untuk menjadi anggota DPR RI," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini menambahkan, untuk itu SBY menyarankan perlu dilakukan kajian mendalam apakah sistem demokrasi langsung lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Bisa jadi hasil kajian menemukan sistem demokrasi langsung justru memiliki efek negatif yang lebih besar dibandingkan sistem perwakilan, seperti yang telah dilakukan jauh sebelum reformasi.

"Kita semua tentu tidak ingin sistem demokrasi Indonesia ke depan terus berdasarkan NPWP atau nomor piro wani piro. Akibatnya, nanti negara terjebak pada kekuasaan oligarki dan plutokrasi. Karena itu, kita perlu merefeksi kembali pelaksanaan sistem demokrasi pemilihan langsung di Indonesia," pungkas Bamsoet. □



Bertemu Ketua MPR RI ke-13 Amien Rais

Bamsoet: Seharusnya 'Democracy is King,' bukan 'Cash is King.'

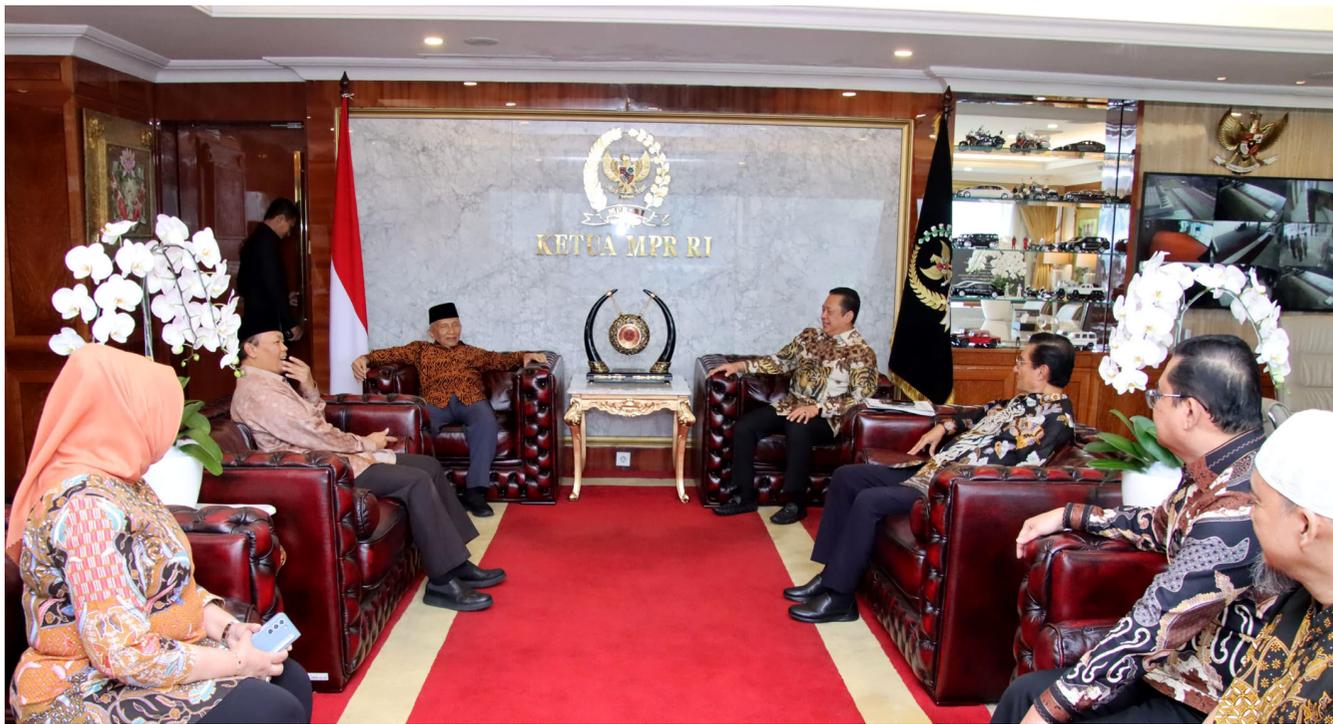


FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi dukungan Ketua MPR RI ke-13 Amien Rais terhadap rencana MPR RI periode 2019-2024 dan akan dilanjutkan MPR RI periode 2024-2029 untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi, UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945. Sekaligus mendukung pengembalian marwah MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara.

MPR RI sendiri, ujar Bamsoet, jika seluruh Ketua Umum Partai Politik dan mayoritas anggota DPD RI setuju, MPR siap menggelar amandemen ke-5 untuk melakukan penyempurnaan UUD 1945 secara menyeluruh dengan menata ulang sistem politik dan sistem demokrasi yang lebih sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.

Amien Rais menekankan bahwa pada prinsipnya konstitusi dibuat untuk kebutuhan manusia, bukan manusia yang menghambat konstitusi. Sehingga selalu ada ruang bagi

konstitusi untuk mengalami perubahan sesuai kebutuhan zaman.

"Pada saat memimpin MPR, Pak Amien memimpin empat kali perubahan konstitusi untuk menjawab permasalahan yang ada

pada saat itu. Beliau tidak keberatan dan bahkan mendukung jika konstitusi hasil empat kali amandemen yang dipimpinnya tersebut akan mengalami perubahan kembali. Mengingat tantangan permasalahan yang



dihadapi bangsa saat ini sudah berbeda dengan yang dihadapi pada beberapa puluh tahun lalu,” ujar Bamsuet dalam Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Ketua MPR RI ke-13 Amien Rais, di MPR RI, Jakarta, Rabu (5/6/24).

Hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid, Amir Uskara, dan Fadel Muhammad.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Amien Rais juga menyoroti tentang kondisi demokrasi dan politik pada saat ini, yang menurutnya, sudah keablasan dan jauh dari cita-cita reformasi. Di masa awal reformasi, para reformis mencita-citakan ‘democracy is king’, namun kini kondisi realitasnya malah menjadi ‘cash is king’.

“Sebagaimana disampaikan Pak Amien, semangat awal membuat pemilihan langsung oleh rakyat adalah karena dianggap calon yang maju dalam pemilihan tidak akan bisa menyuap ratusan juta pemilih dengan nominal rupiah yang besar. Namun, realitasnya ternyata hal yang dianggap mustahil tersebut justru malah menjadi kenyataan. Karena itu, mengembalikan demokrasi perwakilan sesuai jati diri bangsa sebagaimana terdapat dalam Sila ke-4 Pancasila, bisa jadi pilihan terbaik untuk menyelamatkan masa depan bangsa,” jelas Bamsuet.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, melalui empat kali amandemen, konstitusi menempatkan MPR RI sejajar dengan lembaga negara lainnya sebagai lembaga tinggi negara. Kini setelah 20 tahun berjalan, Amien Rais juga menilai perlunya MPR RI dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara.

Idealnya memang MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara sebagaimana pernah disampaikan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati

Soekarnoputri saat Hari Jadi ke-58 Lemhannas, 23 Mei 2023 yang lalu. Maupun berbagai tokoh yang ditemui pimpinan MPR dalam Silaturahmi Kebangsaan, antara lain mantan Wapres Try Sutrisno, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan mantan Ketua MPR RI Sidarto.

“Karena itu, setelah 26 tahun memasuki era Reformasi sejak tahun 1998, kini tidak ada salahnya jika kita merenungkan kembali penataan lembaga-lembaga negara, termasuk dengan mengembalikan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara,” pungkas Bamsuet. □



Peringatan Hari Kebangkitan Nasional

Basarah: Demokrasi Jadi Tantangan Kebangkitan Indonesia Lima Tahun Mendatang

Kepentingan bangsa di atas kelompok mesti terus diutamakan dan harus menjadi landasan bagi setiap pemimpin, berbagai elemen bangsa, organisasi maupun partai politik.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan, Indonesia menghadapi tantangan yang sangat berat menuju cita-cita Indonesia Emas tahun 2045 atau tepat pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kata Basarah, pemimpin mendatang harus dapat menjawab berbagai problem bangsa yang akhir-akhir ini banyak mendapatkan sorotan masyarakat.

"Masalah politik, terutama demokrasi, sangat tajam mendapat sorotan publik akhir-akhir ini. Ditambah problem kesejahteraan dan hubungan sosial. Itu mengapa, berbagai problem bangsa tersebut harus bisa diselesaikan atau dijawab oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Pemilu 2024 lalu," ujar Basarah dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/5).

Basarah sepakat, perbedaan pendapat dalam pesta demokrasi lima tahun atau pemilihan umum jangan sampai kembali memicu polarisasi di masyarakat, yang pada

akhirnya berimbas pada keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Namun, pemimpin terpilih ditantang harus dapat merekonstruksi kebangkitan dan menjalankan sistem kepemimpinan nasional kuat yang melibatkan partisipasi rakyat dalam kerangka sistem demokrasi kerakyatan. Indonesia bukan milik suatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik suatu suku, bukan juga milik suatu golongan adat-istiadat," ujar Basarah.

Menurut Basarah, dinamika politik, sosial dan ekonomi jangan juga sampai mengancam persatuan dan kesatuan bangsa yang sudah diperjuangkan selama ini. Sebab, lanjut Basarah, masih banyak persoalan bangsa saat ini yang membutuhkan soliditas dan persatuan seluruh elemen bangsa untuk bisa bangkit kembali.

"Oleh karena itu, kepentingan bangsa di atas kelompok mesti terus diutamakan dan harus menjadi landasan bagi setiap pemimpin, berbagai elemen bangsa,

organisasi maupun partai politik. Prinsip-prinsip itu harus ada dijalankan dalam kehidupan sehari-hari," ujar Basarah yang juga Dosen Pancasila pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta.

Basarah kemudian menjelaskan, penetapan Hari Kebangkitan Nasional oleh Bung Karno melalui Keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 dilandasi dinamika politik yang terjadi pada masa-masa awal pasca-kemerdekaan. Ketika itu, banyak tokoh nasional yang bermusuhan satu sama lain. Situasi diperparah dengan agresi yang masih dilakukan Belanda.

"Kita harus terus menggelorakan semangat rasa cinta tanah air dalam konteks kekinian. Memahami ajaran-ajaran Bung Karno untuk mencintai tanah air dan menghidupkan semangat kebangsaan diperlukan agar setiap pemimpin dan insan di Republik ini memiliki semangat *Dedication of Life*," ujar Basarah. □

Revisi UU Polri

Yandri Susanto: Tuntaskan Revisi UU Polri

Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susanto mengharapkn, revisi RUU Polri bisa memberikan landasan hukum yang lebih baik sebagai upaya peningkatan pelaksanaan fungsi, peran, tugas dan wewenang Polri.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Yandri Susanto menyatakan bahwa usulan Revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat layak menjadi RUU inisiatif DPR. “Revisi UU Polri sangat layak menjadi RUU inisiatif DPR,” kata Yandri Susanto kepada media di Jakarta, 29 Mei 2024. Karenanya, Yandri berharap, pemerintah bersama-sama dengan DPR dapat segera menuntaskan pembahasannya,” ujar Yandri Susanto kepada media di Jakarta 29 Mei 2024.

Salah satu substansi yang diatur dalam

RUU ini, yaitu terkait perubahan usia pensiun anggota Polri.

“Bagi bintang dan tamtama batas usia pensiun 58 tahun, bagi perwira 60 tahun. Kemudian bagi anggota Polri yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun,” lanjut Yandri.

Yandri yang juga anggota Baleg DPR ini menjelaskan, selain perubahan usia pensiun, substansi lain yang baru dalam RUU ini, yaitu diaturnya perluasan wilayah hukum polri yang meliputi wilayah negara,

wilayah yuridiksi, wilayah perwakilan Indonesia di luar negeri yang memiliki kekebalan diplomatik, kapal laut berbendera Indonesia di wilayah laut Internasional, pesawat udara yang teregistrasi, dan berbendera Indonesia, serta ruang siber.

“Kemudian substansi lainnya juga adalah penyesuaian jabatan PNS menjadi ASN di lingkungan Polri yang menyesuaikan dengan undang undang ASN,” jelas Yandri, seraya berharap, revisi ini bisa memberikan landasan hukum yang lebih baik sebagai upaya peningkatan pelaksanaan fungsi, peran, tugas dan wewenang Polri. □

Pimpin Delegasi MPR ke Spanyol

HNW Menyampaikan Apresiasi atas Pengakuan Spanyol terhadap Negara Palestina

Selain membicarakan tentang diplomasi Parlemen untuk menguatkan demokrasi dan hubungan parlemen kedua negara, berkontribusi juga dalam menguatkan hubungan antara dua negara. Isu mengenai Palestina menjadi salah satu topik perbincangan

WAKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., sesuai spirit Pembukaan UUD NRI 1945 alinea pertama dan ke empat, menyampaikan langsung apresiasi dan dukungan atas pengakuan Spanyol terhadap Negara Palestina dalam pertemuan dengan Ketua Senat Spanyol, di gedung Parlemen Spanyol di Madrid (Rabu, 22 Mei 2024), serta berharap agar langkah positif ini diikuti oleh negara-negara lainnya.

“Sikap resmi Pemerintah Spanyol, yang diumumkan di Parlemen pada 22 Mei 2024 dan mendapat sambutan meriah dari anggota Parlemen Spanyol itu juga diumumkan bersama dengan Irlandia dan Norwegia. Ketiga negara Eropa itu akhirnya mengakui Palestina sebagai negara Merdeka. Ini merupakan peristiwa bersejarah dan bisa menjadi salah satu tonggak untuk mewujudkan Palestina benar-benar sebagai negara Merdeka yang diterima sebagai anggota penuh PBB,” kata HNW, begitu Hidayat Nurwahid biasa disapa.

Lebih lanjut HNW menyatakan, dengan pengakuan dari tiga negara Eropa itu, dan pengakuan dari empat negara di Karibia maka bertambahlah jumlah negara anggota PBB yang tadinya baru 143 negara menjadi 150 negara, itu sudah melampaui 2/3 jumlah Negara anggota Majelis Umum PBB yang mengakui Palestina sebagai negara merdeka. “Penting kiranya dukungan serupa juga segera diberikan oleh negara-negara di seluruh dunia, demi keadilan dan perdamaian,” ujarnya melalui siaran pers di Madrid, Spanyol, Kamis (23/5).

Dalam pertemuan tersebut, Hidayat bersama empat anggota MPR (Tifatul Sembiring, Jazuli Juwaini, Tamsil Linrung, dan Abdul Hakim) didampingi oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Spanyol, Dr M Najib,



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

diterima oleh Ketua Senat Parlemen Spanyol, Pedro Rollan Ojeda, yang didampingi Senator Vicente Azpitarte dll.

Selain membicarakan tentang diplomasi Parlemen untuk menguatkan demokrasi dan hubungan parlemen kedua negara, agar berkontribusi juga dalam menguatkan

hubungan antara dua negara, isu mengenai Palestina menjadi salah satu topik perbincangan. Apalagi kunjungan tersebut bertepatan dengan pengumuman sikap resmi Spanyol yang mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

HNW menuturkan bahwa pengakuan





banyak negara merupakan modal yang sangat besar bagi rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaannya dan menghentikan penjajahan yang menghadirkan tragedi kemanusiaan dalam segala bentuknya. “Ini dahulu yang dialami oleh rakyat Indonesia ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan. Adanya pengakuan awal dari sejumlah negara dan berbagai pihak lainnya, termasuk dari Palestina, merupakan modal bagi perjuangan Indonesia untuk menghentikan penjajahan Belanda, dan meraih kemerdekaan yang diakui serta diterima di dunia internasional, dan juga oleh PBB,”

tukasnya.

Selain terhadap Spanyol, HNW juga mengapresiasi dua negara Eropa lainnya, Irlandia dan Norwegia, yang menyampaikan secara bersama-sama pengakuannya terhadap Negara Palestina. Ia juga berharap, negara-negara lain segera mengikuti langkah Spanyol, termasuk beberapa negara Eropa lainnya yang dikabarkan akan melakukan tindakan serupa, seperti Belgia, Slovenia dan Malta.

“Pengakuan sejumlah negara Eropa dan sebelumnya juga oleh beberapa negara di Karibia, seperti Jamaika, Barbados, Trinidad

& Tobago, dan Bahamas terhadap Palestina sebagai negara merdeka diharapkan bisa menjadi penguat usaha untuk hentikan genosida, kejahatan penjajahan Israel atas Palestina, dan menghadirkan perdamaian di kawasan tersebut, serta dampak positif bisa meluas ke dunia internasional, bahkan berkontribusi menyelamatkan peradaban global juga,” ujarnya.

HNW berharap, ke depan dunia internasional perlu ditingkatkan kerja samanya untuk segera menghadirkan solusi dengan Palestina sebagai negara merdeka dengan segala haknya, dan menghentikan aksi brutal Israel yang semakin menunjukkan pelanggaran terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia (HAM).

“Dengan semakin banyak pengakuan seperti itu penting agar dunia internasional, termasuk negara-negara barat, menyadari kejahatan dan dampak buruk dari tindak laku Israel yang berulang kali mengabaikan resolusi PBB, hukum internasional, serta hal-hal yang diakui di peradaban global seperti pengakuan terhadap HAM, hukum, menghormati keputusan institusi internasional. Termasuk sikap Israel yang belakangan makin arogan menolak solusi dua negara dengan adanya negara Palestina merdeka, sebagaimana yang mereka lakukan sesudah Jaksa ICC mengumumkan perintah penangkapan terhadap beberapa pimpinan Israel, dan apa yang baru saja kembali melakukan provokasi dan klaim penguasaan atas Masjid Al Aqsa, sesudah tiga negara Eropa menyampaikan dukungan terhadap Palestina sebagai negara merdeka,” tukasnya.

“Ini semakin menunjukkan bahwa Surat Penangkapan Jaksa Internasional Criminal Court (ICC/Mahkamah Pidana Internasional) terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu dan Menhan Israel Yoav Gallant adalah benar dan karenanya semakin penting untuk segera dilaksanakan. Dan, di sisi lain menghindari terjadinya kriminalisasi terhadap para pejuang kemerdekaan Palestina seperti pemimpin Hamas yang dalam kasus ini bersama rakyat Palestina sebagai korban, karena perjuangan hadirkan Palestina Merdeka ternyata bukan makin ditolak publik tapi justru makin banyak didukung terbukti dengan makin banyaknya negara yang akui Palestina sebagai negara Merdeka,” pungkasnya. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



MPR Gelar FGD di Ranah Minang



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Akademisi Fakultas Hukum Unand Padang terkenal dengan produk dan pemikirannya terkait kajian ketatanegaraan. Di kampus ini, MPR menggelar Focus Group of Discussion (FGD) guna menampung masukan dari para pakar guna memperkuat kedudukan MPR RI.

DI KOTA Padang, Sumatera Barat, 21 Mei 2024, Badan Pengkajian MPR bersama Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) menggelar Focus Group of Discussion (FGD). Dalam FGD yang bertema: 'Pembahasan (Uji Sahih) Draf Tata Tertib MPR' ini hadir para anggota Badan Pengkajian, yakni Ajbar Abdul Kadir dari Kelompok DPD, Supriyanto dari Fraksi Partai Gerindra, Ferdiansyah dari Fraksi Partai Golkar, Sri Wulan dari Partai Nasdem, dan H. Marwan Cik Asan dari Fraksi Partai Demokrat.

Sedang dari FH Unand, hadir Dekan Dr. Ferdi, S.H., M.H.; para dosen, yakni Dr. Hengki Andora, SH., LL.M.; Dr. Syofianti, SH., MH.; Dr. Dian Bakti Setiawan, SH., MH., dan Dr. Khairul Fahmi, SH., MH.

Dalam makalahnya, Hengki Andora menyebutkan, kewenangan MPR dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 adalah mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil Pemilu, memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, melantik wakil presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, memilih Wakil

Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik.

Selanjut, Hengki memaparkan mengenai Materi Muatan Peraturan Tata Tertib MPR. Dia menyebutkan ada Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota MPR (Pasal 9), Tata Cara Pemilihan Pimpinan MPR (Pasal 15 UU No. 13 Tahun 2019), Tata Cara Pemberhentian dan Penggantian Pimpinan MPR (Pasal 19), Tata Cara Pembentukan, Susunan, dan Tugas Panitia Adhoc MPR (Pasal 23), Tata Cara Pengambilan Keputusan terhadap Usul Perubahan UUD 1945 (Pasal 32), Tata Cara Verifikasi terhadap Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Administrasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan (Pasal 51), Tata Cara Pelaksanaan Hak Anggota MPR (Pasal 60), Tata Cara Persidangan (Pasal 62), dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Sidang MPR (Pasal 65).

Hengki Andora dalam papernya mengungkapkan mengenai nomenklatur produk hukum MPR dalam UUD, yakni ada Putusan dan Keputusan. Dijelaskan soal Keputusan: anggota MPR berhak menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan (Pasal 10), pimpinan MPR ditetapkan dengan Keputusan MPR (Pasal 15 ayat (9) UU No. 13 Tahun 2019), pimpinan MPR bertugas memimpin sidang MPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

(Pasal 10 ayat (1) huruf a), penggantian Pimpinan MPR ditetapkan dengan keputusan pimpinan MPR (Pasal 17 ayat (4))

Tata Cara pengambilan keputusan terhadap usulan perubahan UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 32). "Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan," tuturnya.

Sementara Khairul Fahmi dalam makalahnya, menguraikan soal Produk

Hukum/Jenis Putusan MPR. Disebutkan, Ketetapan MPR yang bersifat mengatur, MPR memang tidak lagi dapat menerbitkan Ketetapan yang bersifat mengatur, kecuali ketetapan terkait perubahan UUD NRI Tahun 1945, Pengakuan terhadap TAP MPR dalam UU PPP adalah untuk TAP MPR sesuai Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003.

Dia juga menguraikan soal Konsep "Keputusan" dan "Putusan" MPR. Istilah "putusan" sejauh ini hanya digunakan untuk

produk keputusan pengadilan, sebaiknya istilah itu tidak digunakan untuk produk hukum MPR. Untuk menggambarkan semua jenis Keputusan MPR, sebaiknya MPR menggunakan istilah "produk hukum MPR" saja.

Dijelaskan pula soal Ketetapan MPR yang Bersifat Penetapan. Sesuai wewenang yang diberikan UUD 1945, MPR memang masih berwenang mengeluarkan ketetapan yang bersifat penetapan, seperti penetapan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih sesuai Pasal 8 UUD NRI Tahun 1945.

Dalam makalahnya, Khairul Fahmi juga menjelaskan soal Penguatan Wewenang MPR dalam PPHN. Disebutkan, UUD tidak memberikan wewenang kepada MPR untuk menetapkan Pokok-pokok Haluan Negara. Ini bisa terjadi, karena sesuai UUD NRI Tahun 1945, MPR tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan sebagai lembaga negara setingkat dengan Presiden.

Disebutkan, agenda penguatan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN perlu mempertimbangkan korelasinya dengan sistem presidensial Indonesia. "Wewenang menetapkan PPHN juga akan berkonsekuensi terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan PPHN berpotensi mengganggu

penguatan sistem presidensial”, tuturnya.

Dalam makalah, ia juga menyinggung soal perubahan UUD. Wewenang PAH Mengkaji usulan Perubahan UUD dari Pengusul. PAH sangat mungkin diberi wewenang untuk mengkaji usulan perubahan tanpa menegasikan usulan dan mengubah substansi yang diusulkan untuk diubah. Hanya saja, hasil kajian tetap perlu disampaikan kepada pengusul. Apabila terdapat keterkaitan antara pasal yang

diusulkan untuk diubah dengan pasal lainnya, PAH tidak bisa langsung menyampaikan laporan pada Sidang Paripurna, melainkan tetap perlu konfirmasi melalui pengusul.

Dalam makalahnya dikupas soal materi Perubahan UUD. Dijelaskan, jika semua pasal dalam UUD dianggap perlu dilakukan perubahan, maka yang perlu menjadi perhatian adalah: kesepakatan perubahan UUD 1945 tahun 1999, salah satunya

penguatan sistem presidensial; apa desain ketatanegaraan yang hendak dibangun? Apakah akan kembali ke desain menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara? Atau, sesungguhnya desain ketatanegaraan tidak perlu diubah, melainkan cukup melakukan sejumlah perbaikan saja untuk menutupi kelemahan yang ada saat ini; terdapat kajian DPD RI sebelumnya yang juga dapat jadi perhatian MPR. □

Mengurai Rancangan Tatib MPR

Para akademisi FH Unand menguraikan pandangannya tentang MPR. Menurut mereka banyak hal mengenai lembaga ini yang perlu diperhatikan, antara lain mengenai perlunya dilengkapi tatib yang ada.

DALAM makalah yang beredar, Dian Bakti Setiawan mengupas secara panjang mengenai *Beberapa Catatan Terhadap Rancangan Peraturan Tata Tertib MPR 2024*. Dia menyatakan, negara memiliki tujuan yang akan dicapai melalui kegiatan dari lembaga-lembaga negara sebagai organ dari organisasi negara. Dalam konteks itu, setiap organ mempunyai tugas dan wewenang. Apakah yang dimaksud dengan tugas? Tugas adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Tujuan sifatnya statis, sedang tugas sifatnya dinamis. Agar suatu lembaga dapat melaksanakan tugasnya, lembaga tersebut mesti diberi seperangkat kewenangan, yaitu hak untuk melaksanakan tugas. Tugas dan kewenangan negara disebut fungsi negara (Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.168).

Bagaimana dengan Tugas dan Wewenang MPR? Wewenang MPR terbaca dengan jelas dalam pasal-pasal UUD 1945. selanjutnya tugas dan wewenang diatur pula dalam Pasal 4 sampai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengaturan dalam undang-undang tersebut ternyata diulangi lagi dalam peraturan tata tertib ini sebagaimana terbaca pada Pasal 5 dan Pasal 6. Mungkin maksud pembentuk peraturan tata tertib ini mencantumkan pengaturan wewenang dan tugas tersebut adalah untuk menjaga kontinuitas pengaturan dalam peraturan tatib ini. Tetapi, ada dua hal yang penting untuk diingat. Pertama, Pengaturan tentang tugas dan wewenang MPR tersebut tidaklah merupakan wewenang pembentuk Tatib,

sehingga tidak merupakan materi muatan Pengaturan itu merupakan wewenang pembentuk undang-undang sehingga merupakan materi muatan undang-undang.

Kedua, peraturan tata tertib tentunya mengatur tata tertib. Dalam bahasa Indonesia “tertib” dimaknai sebagai suatu keteraturan sedemikian rupa sehingga mendahulukan apa yang harus didahulukan dan mengemudiankan apa yang harus dikemudiankan. Dengan kata lain Tata Tertib hanya berkaitan dengan soal prosedural bukan berkaitan dengan persoalan substansial.

Karena itu, pencantuman hal-hal yang bersifat substansial seperti pengaturan

tugas dan wewenang MPR ini sebaiknya dikeluarkan dari peraturan tata tertib. Mempertahankannya akan menimbulkan kekacauan pengaturan dalam sistem perundang-undangan dan menyimpang dari hakekat materi muatan dari peraturan Tata Tertib yang seharusnya.

Dalam makalah juga dikupas mengenai Perihal Macam-Macam Putusan MPR. Ditulis dalam makalah, pasal 103 Rancangan Peraturan Tata Tertib ini mengatur tentang macam-macam putusan MPR, mulai dari putusan berupa UUD sampai putusan berupa Tap MPR yang terdiri dari TAP yang bersifat regeling dan beschikking. Di samping itu diperkenalkan pula nomenklatur Peraturan MPR dan Keputusan MPR. Berkaitan dengan ketetapan yang bersifat regeling, Pasal ini mencantumkan sebagai berikut: "Ketetapan MPR yang bersifat pengaturan (regeling) adalah a. Ketetapan MPR Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Pasal 2 dan Pasal 4; b. Ketetapan MPR tentang pokok-pokok haluan negara; c. mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan d. menggunakan nomor putusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Selanjutnya, ayat (5) menentukan, "Peraturan MPR merupakan putusan MPR yang: a. berisi hal yang bersifat pengaturan (regeling); b. mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan; c. menggunakan nomor putusan MPR. Ada beberapa catatan berkaitan dengan pengaturan dalam Pasal 103 ini. Pertama, terkait penggunaan nomenklatur "putusan". Nomenklatur putusan sudah establish digunakan untuk sinonim vonis pengadilan. Menggunakan nomenklatur tersebut untuk produk MPR tentu akan berpotensi menimbulkan keraguan dan kerancuan. Kedua, pencantuman macam-macam putusan sampai menentukan Tap MPR yang bersifat regeling, kiranya sudah jauh keluar dari apa yang seyogyanya menjadi materi muatan Peraturan Tata Tertib.

Ketiga, mengatur bahwa Peraturan MPR merupakan peraturan yang mengikat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sebagai ganti rumusan sebelumnya dalam Tatib yang lama (Tatib 2019) yang menggunakan frasa mengikat ke dalam, dan ke luar, kiranya merupakan rumusan yang lebih baik dibanding Tatib tahun 2019. Tetapi, akan lebih jelas kalau dirumuskan dengan menambahkan frasa ...mengikat anggota MPR sepanjang diperintahkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam makalah juga termuat soal perihal sumpah dan janji anggota MPR. Dipaparkan, Pasal 9 ayat (1) Peraturan Tatib ini menyatakan, "Anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna MPR yang dipimpin oleh Pimpinan Sementara MPR." Selanjutnya, ayat (2) menyatakan, "Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan MPR, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dilantik sebagai anggota DPR atau anggota DPD".

Hukum administrasi mewajibkan sumpah jabatan. Tanpa sumpah jabatan tidak ada jaminan bahwa wewenang yang dimiliki seorang pejabat tidak akan disalahgunakan. MPR sebagai lembaga kolegial memiliki wewenang yang dilaksanakan melalui anggota-anggotanya. Jaminan bahwa anggota MPR tidak akan menyalahgunakan wewenang MPR yang diemban mereka dibuktikan dengan sumpah jabatan. Dalam

hukum tata negara dan hukum administrasi, sekiranya seorang pejabat tidak mengangkat sumpah jabatan maka pejabat yang bersangkutan dilarang menggunakan wewenang jabatannya. Sebab, tanpa jaminan bahwa kewenangan tidak disalahgunakan, akan berpotensi menimbulkan kerugian terhadap masyarakat banyak. Karena itu, lalu timbul pertanyaan, bagaimana kalau anggota MPR tidak mengangkat sumpah jabatan? Merujuk pada dogma dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, anggota MPR tersebut tidak boleh terlibat dalam pelaksanaan wewenang MPR.

Adalah tepat diatur pengucapan sumpah jabatan anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah jabatan secara bersama-sama, walaupun tidak begitu jelas mengapa tenggang waktu yang ditetapkan adalah 30 hari untuk mengucapkan sumpah tersebut bagi anggota MPR yang berhalangan mengucapkannya secara bersama-sama setelah pelantikan anggota DPR dan DPD. Tetapi, pengaturan ini juga menyisakan masalah, yaitu bagaimana kalau ada anggota MPR yang tetap berhalangan mengucapkan sumpah dan janji pada kesempatan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Tata tertib ini. Apakah anggota MPR yang bersangkutan tetap diperkenankan terlibat dalam pelaksanaan wewenang MPR? Pertanyaan ini tidak terjawab dalam Peraturan Tata Tertib ini. Karena itu, disarankan penambahan ketentuan yang mengatur persoalan ini. □



Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.

Ketua MPR RI

Gotong Royong dan Menghidupi Kewajiban Check and Balances

RAGAM persoalan baru yang menjadi tantangan riil, utamanya di sektor ekonomi, terus tereskalasi akibat ketidakpastian global yang berlarut-larut sekarang ini. Jika tidak ditangani dengan bijaksana, semua tantangan riil itu pada gilirannya akan menyentuh langsung aspek kesejahteraan bersama. Karena itulah semua elemen bangsa dipanggil dan diajak bergotong-royong untuk menanggapi ragam tantangan riil saat ini.

Namun, keterlibatan semua elemen bangsa untuk merespon ragam tantangan itu tentu saja tidak boleh menghilangkan fungsi dan kewajiban bersama melaksanakan check and balances. Sebaliknya, mekanisme checks and balances harus selalu hidup dan dihidupkan oleh dinamika negara-bangsa yang demokratis. Bahkan, lebih dari itu, mekanisme checks and balances harus berfungsi dan bekerja efektif. Dengan demikian, akan terwujud tata kelola negara-bangsa yang akuntabel.

Dengan mekanisme checks and balances yang efektif, tata kelola negara-bangsa yang dilaksanakan oleh tiga cabang kekuasaan, meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pun akan berjalan dengan efektif pula. Efektivitas tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) legislatif, eksekutif dan yudikatif akan terwujud karena mekanisme check and balances mewajibkan masing-masing lembaga negara saling mengawasi dan memelihara keseimbangan, sehingga kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga. Aspek pengawasan semakin diperkuat

karena juga dilaksanakan oleh publik.

Lazim jika fungsi checks and balances dijalankan oleh kekuatan oposisi. Sebaliknya, wajar juga jika pemerintah yang berkuasa mengajak semua elemen masyarakat, termasuk elemen kekuatan politik, untuk bekerjasama (koalisi) dalam tata kelola negara-bangsa. Ajakan untuk berkoalisi selalu dilandasi kebutuhan, bahkan termasuk pertimbangan atau alasan sangat strategis. Misalnya, tantangan riil yang tidak ringan yang sedang atau akan dihadapi negara. Pertimbangan strategis lainnya adalah demi terwujudnya harmoni antar-elemen masyarakat pasca pemilihan umum (Pemilu).

Dua kebutuhan dan pertimbangan strategis seperti itulah yang melandasi keputusan dan langkah politik Presiden Joko Widodo – sebagai pemenang Pilpres 2019 – mengajak lawannya, sosok Prabowo Subianto, untuk berkoalisi dalam pemerintahan sekarang ini. Berkat langkah itu, rivalitas antar-kelompok masyarakat bisa direduksi, dan stabilitas nasional serta ketertiban umum bisa dirawat dan dijaga dengan baik.

Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, anggota koalisi dari pemenang Pilpres 2024, saya memahami dan merasakan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ingin mengajak semua elemen masyarakat untuk bergotong-royong menghadapi tantangan riil yang sedang mengemuka saat ini. Indonesia pun tak bisa menghindar dari ragam tantangan itu. Kesiediaan semua elemen masyarakat untuk

bekerjasama menghadapi tantangan sekarang ini, dengan sendirinya, akan menjadi faktor pendorong bagi terwujudnya harmoni antar-elemen masyarakat pasca Pemilu.

Adalah fakta bahwa masyarakat sempat terkotak-kotak karena perbedaan pilihan politik.. Kecenderungan seperti ini tentu saja tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Untuk mereduksi potensi masalah di kemudian hari, Saya sampai pada kesimpulan bahwa tatanan politik Indonesia saat ini hingga beberapa waktu ke depan belum membutuhkan oposisi di parlemen. Sebaliknya, seluruh partai politik, termasuk Golkar, seyogyanya sepakat dan mendukung inisiatif pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, untuk mengajak semua kekuatan politik berkoalisi dan membangun kerja sama bergotong-royong melanjutkan pembangunan nasional, sambil menghadapi dan menanggapi ketidakpastian global saat ini.

Ada dua pertimbangan utama mengapa Saya sebagai Ketua MPR RI menyampaikan hal ini. Pertama, semua tokoh dan elit politik dari semua kekuatan politik idealnya fokus pada upaya bersama memulihkan harmoni di antara sesama anak bangsa. Pemilu telah usai. Kini, saatnya memulihkan silaturahmi di antara semua dan sesama elemen bangsa. Pihak-pihak yang belum dapat menerima keputusan resmi atas hasil Pemilu diberi peluang untuk mengajukan keberatan melalui jalur hukum. Pertimbangan kedua, tantangan riil di bidang ekonomi saat ini cukup berat. Demikian beratnya sehingga diperlukan kesediaan semua elemen masyarakat untuk bergotong-royong menghadapi ragam tantangan itu.

Sebagaimana telah diungkap sebelumnya, ketidakpastian global akibat konflik dan perang di beberapa kawasan menimbulkan gangguan cukup serius terhadap dinamika perekonomian dunia. Ada faktor suku bunga acuan yang naik, gangguan rantai pasok, naiknya harga minyak mentah di pasar dunia hingga faktor melemahnya nilai

tukar rupiah terhadap dolar AS. Oleh faktor utang luar negeri dan faktor ketergantungan dari impor minyak, Indonesia otomatis terdampak oleh tingginya suku bunga dan naiknya harga minyak mentah dunia, serta menguatnya nilai tukar dolar AS.

Tak hanya para ekonom, sebagian masyarakat pun sudah paham bahwa APBN tahun berjalan sedang mengalami tekanan lumayan berat karena naiknya harga minyak mentah, tingginya suku Bunga acuan dan faktor melemahnya rupiah terhadap dolar AS. Nilai atau belanja impor minyak menjadi lebih mahal. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) ikut membengkak. Menguatnya nilai tukar dolar AS di tengah suku bunga acuan yang tinggi menyebabkan pengeluaran untuk membayar pokok dan bunga utang luar negeri menjadi lebih besar dari sebelumnya.

Sebagian masyarakat pun tahu bahwa pemerintah saat ini memilih kebijakan menahan harga BBM bersubsidi yang dijual Pertamina pada tingkat yang sekarang, walaupun di saat yang sama produsen BBM lainnya sudah menaikkan harga jual. Sudah dipastikan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM hingga Juni 2024. Terkait BBM bersubsidi itu, hanya pemerintah yang tahu apa yang akan terjadi di bulan Juni ini.

Pilihannya memang tidak mudah. Pasalnya, ketika harga energi dinaikkan, dampaknya sangat signifikan. Biaya produksi naik. Mau tak mau, harga barang dan jasa ikut naik. Laju inflasi menjadi sulit dikendalikan. Kenaikan harga barang dan jasa akan memperlemah daya beli atau konsumsi masyarakat. Kalau sudah begitu, taruhannya adalah prospek pertumbuhan ekonomi.

Untuk mereduksi semua potensi masalah itulah dibutuhkan kesediaan semua elemen masyarakat untuk bergotong-royong. Bekerjasama atau koalisi tidak otomatis mengeliminasi kewajiban bersama melaksanakan fungsi checks and balances. Kritik atau koreksi kebijakan pun bisa dilakukan dari dalam organisasi satuan kerja. □

Bung Karno Milik Seluruh Rakyat Indonesia

Ahmad Basarah: PDI Perjuangan Ucapkah Terima Kasih pada Prabowo

Saya kira sudah tepat Pak Prabowo menyatakan Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia, karena memang sejatinya Bung Karno adalah seorang Bapak Bangsa Indonesia,” ujar Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut sangat tepat. Yang kurang tepat adalah ketika dia mengatakan seolah-olah Bung Karno diakui milik satu partai tertentu. Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDI Perjuangan menjawab pertanyaan media Jumat (10/5).

“Saya kira sudah tepat Pak Prabowo menyatakan Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia karena memang sejatinya Bung Karno adalah seorang Bapak Bangsa Indonesia”, ujar Wakil Ketua MPR itu.

Basarah menegaskan, pernyataan Pak Prabowo tersebut membuktikan keberhasilan perjuangan politik PDI Perjuangan selama ini untuk mengembalikan status dan peran serta nama baik Bung Karno ke tempat yang seharusnya.

“Di masa Orde Baru, Bung Karno tidak mendapatkan pengakuan dan perlakuan

seperti yang Pak Prabowo tegaskan sekarang, karena pada masa itu Bung Karno diperlakukan tidak sebagaimana mestinya sebagai seorang Pejuang Kemerdekaan, Proklamator Bangsa, Penggali Pancasila, dan Presiden Pertama Republik Indonesia,” terang Ahmad Basarah yang juga Wakil Ketua Lakpesdam PBNU itu.

Dalam misi perjuangan politik PDI Perjuangan tidak pernah memasukkan Bung Karno hanya menjadi milik satu golongan, satu kelompok apalagi milik satu partai saja, karena itu bertentangan dengan eksistensi dan jati diri Bung Karno yang bukan hanya milik bangsa Indonesia tetapi juga milik dunia. Karena jasa-jasa Bung Karno terhadap insiprasi kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika melalui penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung dan berbagai legacy Bung Karno lainnya kepada dunia.

“Semoga jika Pak Prabowo menjadi Presiden RI kelak, beliau akan menjadi

pemimpin yang adil dan bijak serta mau dan berani menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diwariskan oleh Bung Karno dan para Pendiri Bangsa lainnya,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR itu.

Basarah juga berharap, Pak Prabowo tidak menjadi pemimpin yang anti kritik dan tidak menganggap pihak-pihak yang tidak bergabung dalam pemerintahannya, serta pihak-pihak yang mengkritiknya sebagai “pengganggu.” “Karena, dalam sistem demokrasi yang diwariskan para Pendiri Bangsa serta diatur juga dalam konstitusi kita telah memberikan hak berdaulat bagi rakyat Indonesia untuk mengawasi jalannya kekuasaan politik negara agar terjadi check and balances, serta tidak menjadi negara yang otoritarian karena demokrasi Pancasila yang mengajarkan keseimbangan politik adalah pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia,” ujar Ahmad Basarah menutup keterangannya. □



Keraton Majapahit Jakarta Mengenang Masa Lalu Menjaga Masa Depan

Seribu pujian dialamatkan kepada A.M. Hendropriyono. Mantan Kepala BIN itu membangun replika Keraton Majapahit di Cipayung, Jakarta. Di kawasan itu berdiri pendopo, balairung, dan alun-alun, seperti tata kota Majapahit pada masa lampau. Diharap dari tempat itu generasi muda belajar sejarah bangsa. Kebesaran Kerajaan Hindu-Budha itu perlu dikenang bahwa bangsa ini pernah mengalami masa keemasan di Nusantara. Dengan mengenang Majapahit, diharap bangsa ini mampu menjaga persatuan hingga masa depan.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

DI JL. RAYA Mabes Hankam No. 45, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, 7 Mei 2024, berkumpul Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Presiden VI Tri Sutrisno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, mantan Menteri Perhubungan Agum Gumelar, mantan Menteri Tenaga Kerja Abdul Latief, mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi Jimly Asshiddiqie, Wakil Ketua Umum Parai Gelora Fahri Hamzah, mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung, serta politisi dan pengusaha lainnya.

Mereka hadir di sana memenuhi undangan mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono yang hari itu, minggu pertama bulan Mei 2024, punya hajatan yang fenomenal, meresmikan (replika) Keraton Majapahit Jakarta yang dia bangun di kawasan Ceger,

Cipayung, Jakarta Timur itu. Hendropriyono ingin Keraton Majapahit itu lebih fenomenal maka ia meminta Prabowo Subianto yang juga presiden terpilih dalam Pilpres 2024 untuk meresmikannya. Sebagai sesama rekan di TNI AD dan kawan dalam berbagai macam aktivitas, Prabowo Subianto dengan senang hati menyambut kemauan Hendropriyono tersebut.

Sebagai replika sebuah kerajaan masa lalu, di area tersebut menggambarkan suasana Majapahit pada masanya, yaitu pada tahun 1292-1526 Masehi. Bila berkunjung ke Keraton Majapahit yang berada di Jakarta itu, kita juga akan melihat Taman Madakaripura, Pendopo Maharaja Hayam Wuruk, Balairung Mahapatih Gajah Mada, dan Alun-Alun Wilwatikta. Gambaran yang demikian membuat pengunjung seolah-olah memasuki lorong waktu dan membayangkan hidup di masa lampau.

Setiap warga bangsa yang tentunya mengerti atau mempelajari sejarah pasti mengagumi berdirinya (replika) Keraton Majapahit Jakarta dengan berbagai fasilitas penunjang sebagai sebuah keraton, seperti pendopo, alun-alun, balairung, dan fasilitas lainnya. Suasana yang ada di sana akan

membuat orang akan membayangkan sosok Raden Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, walau pun mereka tahu kedua sosok itu dari buku sejarah. Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada adalah dua sosok yang bisa jadi ketenarannya melebihi dari Majapahit itu sendiri.

Dalam rilis berita yang beredar, Prabowo mengatakan, replika Keraton Majapahit merupakan sarana yang tepat untuk mengedukasi generasi penerus bangsa. "Pengenalan nilai-nilai budaya seperti ini harus dilakukan agar identitas bangsa tetap bertahan di tengah perkembangan zaman," ujarnya dalam siaran pers pada Rabu (8/5/2024). Dalam kesempatan itu, Jenderal yang pernah menjabat Ketua Umum HKTI ini, mengapresiasi inisiatif dan gagasan Hendropriyono.

Ditegaskan mantan Danjen Kopassus itu, kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri lalu siapa lagi. Menurutnya, tidak ada orang lain yang akan menghormati budaya kita kalau kita sendiri tidak menghormatinya.

Prabowo Subianto juga ingin abadi di keraton itu sehingga dalam peresmian, ia membubuhkan tanda tangan dalam prasasti.



Jelas tertulis dalam prasasti itu, “Replika Keraton Majapahit Jakarta ini merupakan Gelombang Kebangkitan Bangsa Indonesia di bidang Kebudayaan Demi Membangun Kepribadian Bangsa yang Berdaulat di Bidang Politik dan Mandiri di Bidang Ekonomi

Nasional”.

Membangkitkan masa keemasan nusantara dengan membangun Keraton Majapahit banyak mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Ketua MPR Bambang Soesatyo, beberapa hari sebelum

peresmian, sudah mengunjungi kawasan itu. Dalam *mpr.go.id*, 14 April 2024, pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan, keberadaan Keraton Majapahit (yang dibangun Hendropriyono) sangat dibutuhkan oleh generasi muda Indonesia untuk mempelajari sejarah bangsa Indonesia. Kejayaan Majapahit yang ditampilkan kembali melalui miniatur di Keraton Majapahit menjadi bukti bahwa kita adalah bangsa yang besar.

Lebih lanjut, Bamsoet mengajak anak bangsa menjaga serta melestarikan kebudayaan nasional. Dan, tak kalah pentingnya, juga menjaga ketahanan budaya dan memajukan kebudayaan nasional ini yang mempunyai dasar pijakan kuat, karena diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 32 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan, Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Untuk memastikan seni dan budaya bangsa tetap terpelihara, perlu dibangun literasi kebudayaan. Budaya bangsa menjadi legasi kesejarahan yang diwariskan.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Sehingga generasi muda bangsa tidak menjadi generasi yang tercerabut dari akar budayanya sendiri, karena minimnya literasi budaya,” ujarnya seperti yang termuat dalam web resmi MPR itu.

Dalam kunjungan yang langsung didampingi oleh Hendropriyono, politisi Partai Golkar itu tidak hanya mengitari keratin, namun dia juga melihat bagaimana Majapahit sesungguhnya lewat tayangan film yang ada. “Me-review pengetahuan sejarah yang pernah saya miliki ternyata banyak yang salah dan tadi diluruskan lewat tayangan film,” tuturnya.

Pujian yang disampaikan tidak hanya diucapkan Prabowo dan Bamsuet. Seluruh undangan yang hadir dalam peresmian mengatakan hal yang serupa. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam *detik.com*, 08 Mei 2024, pun juga berujar demikian. Dirinya mengatakan kagum dengan inspirasi Hendropriyono yang memberikan begitu banyak dan menggali sejarah Indonesia.

Sama seperti Prabowo Subianto dan Bamsuet yang mengaitkan pelestarian budaya dengan generasi muda. Listyo Sigit juga berharap demikian. Ia menuturkan, generasi muda harus menghargai sejarah. “Pak Hendropriyono telah memberikan inspirasi lewat pembangunan Keraton Majapahit Jakarta yang merupakan replika dari sebagian bangunan Istana Raja Majapahit di masa lalu,” ujarnya seperti dalam web itu.

Lebih lanjut dikatakan, kita yang muda



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

untuk terpanggil kemudian bisa menghargai dan melanjutkan nilai-nilai dan semangat serta inspirasi beliau (Hendropriyono) untuk kita selalu mengingat besarnya Nusantara. “Kita selalu menjaga yang namanya persatuan walaupun berbeda-beda dan tentunya ini semua menjadi semangat kebersamaan untuk Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.



Chairul Tanjung yang hadir dalam peresmian itu juga mengapresiasi apa yang dilakukan Hendropriyono. Dalam *kilat.com*, 8 Mei 2024, Chairul Tanjung mengatakan, ia mengagumi berdirinya replika Keraton Majapahit. Keraton itu disebut karya yang luar biasa. “Apalagi tujuannya agar generasi muda Indonesia mengenal sejarah Kerajaan Majapahit,” ujarnya dalam web itu. Di tempat itulah, menurutnya, generasi muda bisa belajar sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia, seperti Majapahit pernah menguasai Nusantara.

Hendropriyono merupakan salah satu pengagum keberadaan Majapahit. *Saking* mengagumi sejarah yang ada, dia mendirikan replika kerajaan itu dan disebutnya Keraton Majapahit Jakarta. Lalu bagaimana sesungguhnya besarnya Majapahit? Dalam *Wikipedia* diungkap, Majapahit adalah sebuah kemaharajaan yang berpusat di Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia, yang berdiri tahun 1293–1527 M. Kemaharajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya menantu Kertanegara, Maharaja Singhasari terakhir, dan mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350–1389.

Lebih lanjut diceritakan dalam web itu, Kemaharajaan Majapahit adalah kemaharajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai monarki terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut Negarakertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Filipina (Kepulauan Sulu), Manila (Saludung), Sulawesi, Papua, dan lainnya. Sisa-sisa peninggalan arkeologis dan reruntuhan bangunan kunonya banyak ditemukan di Kabupaten Mojokerto, karena pernah menjadi ibukota Majapahit. Situs Keraton era Kertawijaya sampai Singawardhana ditemukan di situs Kunitir selatan Trowulan, Mojokerto.

Masa akhir Majapahit juga diungkap, di *Wikipedia*, keruntuhannya berawal dari kekalahan Bhre Kertabhumi dari Ranawijaya pada tahun 1474, memicu perang antara Kerajaan Majapahit dengan Demak, karena Demak sudah menjadi penguasa pesisir Jawa yang dominan, dan mereka mengambil



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

alih daerah Jambi dan Palembang dari kekuasaan Majapahit yang telah terpukul dan berfokus di pedalaman pulau Jawa. Lebih lanjut diceritakan di web itu, sebenarnya perang Majapahit-Demak ini sudah mulai

mereda ketika Patih Udara menggantikan Girindrawardhana dan mengakui kekuasaan Demak, tetapi peperangan berkecamuk kembali ketika Patih Udara meminta bantuan Portugis untuk mengalahkan Demak,

sehingga pada tahun 1527 Demak melakukan serangan ke Majapahit yang mengakhiri sejarah Majapahit.

Dengan jatuhnya ibukota yang dihancurkan oleh Demak pada tahun 1527, pada awal abad ke-16 kekuatan kerajaan Demak akhirnya mengalahkan sisa-sisa Majapahit dan menjadi akhir dari Kerajaan Majapahit.

Disebut dalam *Wikipedia*, catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis (Tomé Pires), dan Italia (Antonio Pigafetta) mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Pati Unus, penguasa dari Kesultanan Demak, antara tahun 1518 dan 1521 M. Sisa-sisa keluarga Majapahit, keturunan Girindrawardhana, kemudian melarikan diri ke daerah Panarukan, Blambangan (sekarang daerah Kabupaten Banyuwangi). Sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluarga kerajaan mengungsi ke Pulau Bali. □

AWG/dari berbagai sumber

Replika Keraton Majapahit Jakarta Menjadi *Showcase* Kebudayaan Majapahit

BANYAK peradaban Kerajaan Majapahit yang hingga saat ini digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tata kota pemerintahan, bendera, panji, dan sesanti yang melekat pada berbagai institusi negara menunjukkan hal yang demikian. Pembangunan Replika Keraton Majapahit Jakarta, diharapkan dapat menumbuhkan nilai-nilai luhur bangsa dalam menghadapi budaya global. Bagaimana pendapat dari ahli sejarah Majapahit atas dibangunnya replika keraton yang ada di Cipayung, Jakarta, itu? Berikut jawaban dari Pemerhati Budaya dan Sejarah Jawa Timur, Deddy Endarto, atas pertanyaan yang dikirim oleh wartawan Majalah Majelis pada pria alumni Teknik Sipil, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya itu. Arek Suroboyo itu juga sebagai



Deddy Endarto

owner Wilwatikta Online Museum dan Wilwatikta Gallery Nusantara. Petikannya:

Apa pendapat Anda selaku pemerhati budaya dan sejarah atas dibangunnya “Replika Keraton Majapahit Jakarta” yang di inisiasi oleh Jenderal TNI (Purn) Hendropriyono dan banyak dikunjungi oleh pejabat negara maupun masyarakat luas?

Saya sangat mengapresiasi upaya Jenderal TNI (Purn) Hendropriyono untuk membangun Replika Keraton Majapahit di Jakarta. Pertama, karena Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya itu adalah roh kebangsaan bagi negara Indonesia modern dan menjadi landasan kesejarahan atas klaim wilayah kedaulatannya. Kedua, kita ini sedang menghadapi persaingan peradaban global sehingga banyak generasi muda kita terkikis kecintaannya pada budaya dan sejarah lokal. Maka dengan adanya hal ini, dapat dijadikan alat kampanye kebudayaan yang mampu memberikan pendidikan

kesejarahan bagi generasi muda bangsa. Ketiga, Jakarta sebagai kota pusat pemerintahan dan perdagangan banyak menerima kunjungan tamu asing luar negeri. Saya harapkan obyek tersebut juga bisa dipakai sebagai diplomasi kebudayaan lintas bangsa bagi tamu asing yang ingin belajar dan mengenal lebih dekat dengan Majapahit serta Indonesia.

Dari bangunan yang ada di lokasi Replika Keraton Majapahit Jakarta, apakah sudah bisa dianggap mewakili dari bangunan keraton aslinya yang ada di Trowulan, Jawa Timur? Dan, elemen apa yang menurut pakem adat Majapahit harus ada bagi suatu bangunan Keraton?

Mohon maaf sebelumnya, karena saya belum pernah hadir langsung di Replika Keraton Majapahit Jakarta yang dikelola pak Hendropriyono. Tapi dari pengamatan saya lewat video media sosial, kalau tidak salah ada Pendopo Emas Maharaja Hayam Wuruk, Tanaman buah Mojo, Replika Candi Brahu, Balairung Mahapatih Gajah Mada, Replika Mahkota Raja, Replika Kereta Kencana, Alun-alun Wilwatikta, Arca Gajah Mada, Arca Tribhuanatunggadewi, Arca Hayam Wuruk, Diorama Fauna Endemik Nusantara, Tamansari dengan berbagai koleksi tanaman langka, Replika Air Terjun Madakaripura, Arca Dewi Laksmi, Arca Dewa Syiwa, Arca Budha, Replika Gapura Wringinlawang, dan lainnya.

Saya kira pengelola dari Keraton Majapahit Jakarta sudah berupaya keras untuk memasukkan beberapa ciri khas kebesaran Majapahit, tetapi memang masih banyak hal lain dari lokasi aslinya yang mungkin karena keterbatasan luasan lokasi belum ditampilkan disana. Jujur kita tidak bisa memaksakan diri untuk mengakomodasi seluruh elemen Majapahit di area yang luasnya hanya beberapa ribu meter persegi, sedangkan luasan asli Keraton Majapahit mencapai beberapa hektar. Bangunan monumental semacam Kolam Segaran, Gapura Bajang Ratu, dan banyak lagi belum terakomodir di sana.

Elemen yang menjadi pakem adat Keraton Majapahit asli meliputi Pendopo Utama, beberapa pendopo pendukung, tempat tinggal keluarga raja, puri kaputren yang dilengkapi taman, puri ksatryan, halaman luas di area depan, tengah dan tempat pemujaan

keagamaan dibagian belakang, menara penjaga, dan banyak hal lagi.

Apakah tata kota Keraton Majapahit mempunyai arsitektur dan landscape yang sama dari wangsa ke wangsa berikutnya?

Tidak, Majapahit dikenal sebagai kerajaan dengan kebudayaan yang sangat dinamis. Dari peninggalan arkeologis terjejak senantiasa ada pengembangan gaya arsitektur dan tata kota dari masa ke masa. Perlu diketahui, Kerajaan Majapahit dari berdiri hingga runtuh berusia 234 tahun, maka terdapat waktu panjang untuk budayanya berkembang sesuai zamannya.

Di ibukota Majapahit (Trowulan, Mojokerto,

seorang raja baru tidak boleh mengunggulkan pendahulunya dan harus membangun keratonnya sendiri agar tidak mengusir keluarga besarnya dari keraton lama. Hal ini yang membuat tata kota ibukota Kerajaan berkembang luas, karena 14 orang Raja Majapahit mempunyai keraton sendiri-sendiri. Negara telah menetapkan zonasi perlindungan bagi kawasan bekas ibukota Majapahit di Trowulan seluas 102,6 kilometer persegi. Suatu lokasi megapolitan di eranya.

Apakah tata kota Keraton Majapahit masih dipertahankan dalam Kesultanan Islam dan hingga era pemerintahan di Jawa saat ini?

Benar, walaupun tidak sama total. Tata

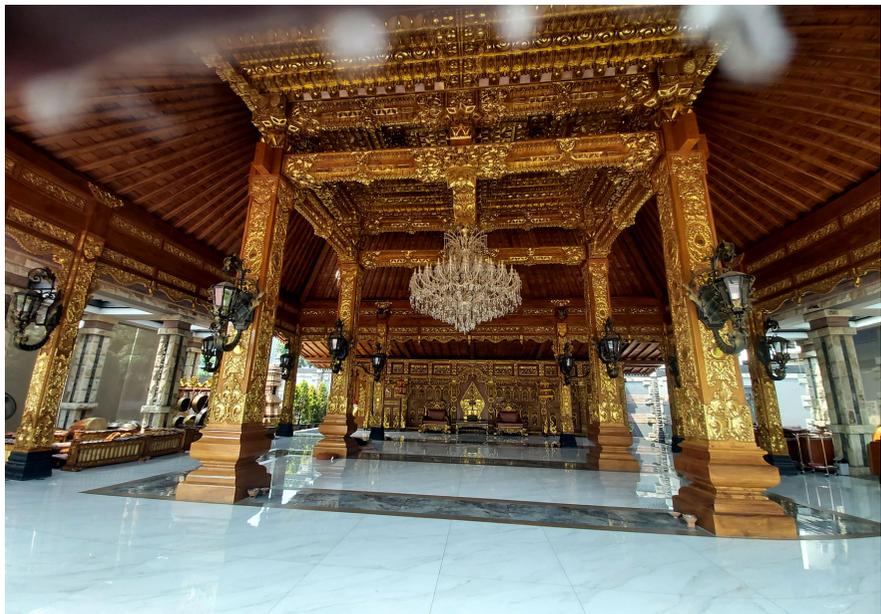


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Jawa Timur), selain Keraton Utama milik sang Raja Utama, juga terdapat 6 Keraton milik Raja Bawahan (masih keluarga Raja Utama) yang berfungsi menjadi semacam kedutaan di ibukota Kerajaan. Karena mewakili area adat lainnya, jelas mempunyai gaya arsitektural yang berbeda antara satu dengan lainnya. Luas dari Keraton Raja Utama diperkirakan 8-9 hektar, dan luas Keraton Raja Bawahan diperkirakan 6 hektar. Ke-7 orang raja ini adalah pengambil keputusan pemerintahan di Majapahit yang disebut dengan SAPTA PRABU RI WILWATIKTA.

Belum lagi adanya filosofi Matahari harus bersinar terang dari balik mega. Artinya,

kota era Majapahit pakem (aturan)-nya diadopsi dan dikembangkan oleh era berikutnya: Kesultanan Islam. Bahkan, saat era kolonial dan berlanjut ke era Indonesia modern, banyak kota tua di Jawa masih memakai aturan tata letak bangunan pemerintahan serta infrastruktur, seperti era Majapahit. Sebagai contoh era Majapahit pemusatan kegiatan dilakukan pada lapangan yang disebut dengan alun-alun.

Semua elemen utama dari pemerintahan ditempatkan mengelilingi dari alun-alun ini, missal: keraton, tempat peribadatan utama, pasar, gedung pengadilan, dan penjara. Konsep ini masih ditemukan di area Kesultanan Yogyakarta dan Kasusunanan



Surakarta maupun kota-kota tua di Jawa.

Apakah yang bisa kita pelajari tentang kebesaran Majapahit dengan mengunjungi replika Keraton Majapahit Jakarta maupun lokasi asli Keraton Majapahit di Trowulan, Jawa Timur?

Saya sangat berharap, Replika Keraton Majapahit di Jakarta bisa dioptimalkan sebagai *showcase* kebudayaan Majapahit. Dengan segala keterbatasan, terutama luasan lokasinya, bisa saja dengan teknologi maju di bidang audio visual hal tersebut bisa diatasi. Perlu dibuatkan mini theater (bioskop/cinema) berkapasitas 100-200 orang, mempertunjukkan film tentang sejarah dan budaya Majapahit yang harus dibuat secara

pemangku wilayah mewakili Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sehingga pengunjung lebih dapat mengeksklore dalam bentuk kunjungan maupun menjadikannya laboratorium lapangan bagi penelitian tentang Majapahit. Berhadapan dan menyentuh langsung peninggalan sejarah tentu memiliki kesan berbeda dengan menonton film ataupun lewat cerita saja. Dan, hal ini sangat perlu, karena ada kalangan generasi muda menganggap cerita tentang Kerajaan Majapahit adalah fiktif, dengan berinteraksi langsung mereka akan sadar akan kebesaran pendahulu kita yang pernah menjadikan Majapahit sebagai trend-setter

keluarganya), Garuda Pancasila (ilmu kepemimpinan Garudhayeksa era Majapahit), *Sesanti Negara: Bhinneka Tunggal Ika*, dan *Sesanti LEMHANAS: Tan Hana Dharma Mangrwa* (berasal dari kitab Sutasoma era Majapahit), dan banyak lagi lembaga memakai tata nilai Majapahit sebagai pondasi filosofinya. Termasuk penggunaan nama pada ruangan dan gedung di lingkungan DPR/MPR RI. Tonggak sejarah: Sumpah Palapa oleh Mahapatih Gajah Mada yang menjadi dasar penyatuan Nusantara juga merupakan bagian inti pada ketatanegaraan kita.

Bagaimana cara melestarikan nilai-nilai perilaku budaya Majapahit?

Dengan ditetapkannya Kerajaan Majapahit oleh BPUPKI sebagai salah satu roh kebangsaan Indonesia modern (Bersama Kerajaan Sriwijaya), maka kita semua rakyat Indonesia merupakan pewaris yang sah dari peradaban Majapahit. Jadi adalah suatu kewajiban bagi kita untuk bisa melestarikan budaya dan sejarah bangsa ini, tentunya tidak hanya Majapahit tetapi seluruh sejarah dan budaya milik Nusantara. Baik pada era sebelum Majapahit maupun era sesudahnya hingga terbentuknya negara modern Indonesia ini.

Kunci utamanya adalah dengan mempelajari sejarah Kerajaan Majapahit secara lebih intens, sehingga dapat mengetahui lebih banyak tentangnya. Bila diperlukan: lakukan studi banding tentang Majapahit yang juga dicatat dalam sejarah oleh kerajaan asing di wilayah Asia ketika berhubungan di masa lalu. Dari bekal tersebut akan timbul kesadaran bahwa untuk mempertahankan negara ini, kita harus punya pondasi nasionalisme yang kuat atas sejarah bangsa. Sehingga akan timbul kesadaran guna pelestarian serta pengembangannya bagi masa mendatang tanpa harus tercabut dari akar budaya aslinya.

Kekuatan masa lalu dari Kerajaan Majapahit berupa: Kekuatan sebagai Kerajaan Maritim sekaligus Kerajaan Agraris yang mampu menjadikannya sebagai kekuatan ekonomi dan trend-setter kawasan bisa menjadi dorongan semangat bagi kita untuk membangun Indonesia lebih perkasa seperti pendahulunya. □

AWG/dari berbagai sumber



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

akurat berdasarkan petunjuk ahli. Juga panggung terbuka untuk pagelaran kesenian khas Majapahit. Sehingga pengunjung mendapat informasi awal yang cukup tentang peninggalan Majapahit maupun sejarah, serta tata nilai filosofis budayanya.

Sedangkan bila informasi lengkap diperlukan, masyarakat mau atau tidak mau harus mengunjungi lokasi asli Kerajaan Majapahit di Jawa Timur, dengan bekas ibukotanya di Trowulan-Mojokerto. Lokasi ini jadi amat spektakuler karena mempunyai luasan 102,6 kilometer persegi dengan berbagai peninggalan arkeologis yang didukung oleh museum serta Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI sebagai

peradaban bagi wilayah Asia pada eranya adalah nyata dan otentik.

Apakah nilai-nilai budaya masa Majapahit masih hidup di Indonesia?

Sebagai roh kebangsaan dari negara Indonesia modern, jelas pengaruh Majapahit sangat besar dalam ketatanegaraan maupun perikehidupan kita. Banyak elemen Majapahit yang dipakai oleh Indonesia modern, misal Bendera Merah Putih (Panji Gula Kelapa Majapahit), Panji Ular-ular tempur TNI-AL (Panji Getih-Getah Samudra Majapahit), *Bhayangkara* Kepolisian RI (Pasukan *Bhayangkara* penjaga ibukota Majapahit), *Dharmaputra* Kostrad TNI-AD (pasukan *Dharmaputra* pengawal raja Majapahit dan

Merasakan Majapahit di Jakarta

Tergambar kejayaan masa lalu Majapahit di Keraton Jakarta. Berbagai infrastruktur tatakota pemerintahan kerajaan diwujudkan di sana. Berkunjung ke tempat itu mengingatkan saat berwisata di beberapa anjungan dan museum di TMII.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

BEGITU di depan Gerbang Keraton Majapahit Jakarta, Jl. Raya Mabes Hankam No. 45, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, di sisi kiri terlihat jelas papan yang bertuliskan *Dilarang Masuk Tanpa Izin*. Larangan itu diperkuat tulisan di bawahnya dengan dasar hukum Pasal 167 Ayat 1 KUHP. Dengan maklumat yang demikian menunjukkan bahwa masuk ke bangunan milik Jenderal (Purn) A. M. Hendropriyono tidak bisa sembarangan.

Meski sudah ada pernyataan tanpa kompromi, Pintu I Keraton Majapahit itu masih dijaga oleh petugas pengamanan. Terlihat ada sekitar 4 sampai 5 orang pria berkaos

dan bercelana hitam menjaga pintu gerbang itu. Pasti ditanya apa tujuan hendak masuk ke bangunan yang baru diresmikan itu.

Syukur diberi izin untuk bisa masuk ke kawasan yang berada di samping JORR East (Toll Road) itu. Begitu kita masuk, kita disambut oleh dua patung *Gupolo* atau *Dwarapala*. Orang awam menyebut dengan *Retjo Pentoeng*. Masuk lebih dalam lagi, kita akan menjumpai patung dengan sosok laki-laki dan perempuan yang menggunakan baju khas Jawa. Dua patung yang duduk bersimpuh itu seolah-olah mengatakan selamat datang kepada para tamu atau pengunjung Keraton Majapahit.

Setelah melewati arca penjaga dan patung selamat datang, terlihat kereta kencana ditarik dua ekor kuda berwarna putih dengan pengawal yang membawa tombak. Di keterangan tertulis Kereta Kencana Raja-Raja Jawa Kesultanan Mataram dan Yogyakarta.

Selepas menapaki jalan selebar sekitar dua hingga tiga meteran, pengunjung akan melihat halaman seluas lapangan bola basket. Lapangan yang dalam kawasan itu disebut Alun-Alun Wilwatikta itu memisahkan bangunan utama, yakni Pendopo Maharaja Hayam Wuruk dan Balairung Mahapatih Gajah Mada. Bila kita melihat Pendopo, nampak kemegahan. Warna kuning keemasan dan lampu kristal memancar di sana. Pendopo itu disokong oleh beberapa tiang yang kokoh. Di depan sebelah kiri terlihat patung Maharaja Hayam Wuruk dan Ratu Tribhuwana Tunggaladewi.

Bangunan yang disebut Balairung pun tak kalah megahnya. Di depan pintu bangunan ini terlihat sosok Mahapatih Gajah Mada. Masuk ke dalam Balairung, terlihat ruangan yang lapang. Di sinilah keraton itu diresmikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dinding-dinding Balairung dilapisi oleh lukisan yang memperlihatkan banyak pintu gerbang sebagai gambaran istana pada masa Kerajaan Majapahit berdiri.

Di samping Pendopo, Alun-Alun, dan Balairung, terdapat taman yang disebutnya dengan Taman Madakaripura. Di taman ini rumput hijau dan berbagai aneka pohon tumbuh subur. Selain dihiasi dengan air terjun, candi bentar, juga ada patung berbagai jenis satwa seperti beruang, gajah, singa, kambing gunung. Juga ada patung yang menggambarkan gadis-gadis yang tengah mandi di *sendang* (kolam).

Berkunjung ke Keraton Majapahit Jakarta, mengingatkan kita pada beberapa anjungan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) seperti anjungan Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, dan Museum Keprajuritan Indonesia. □

AWGI/dari berbagai sumber



Yusuf Olli

Ketua Koperasi Tani Mandiri

Berikan Akses Modal, Benih Pupuk Untuk Petani di Desa

SAYA melihat, petani di daerah harus dilindungi dengan diberikan akses kemudahan untuk mendapatkan modal, benih, pupuk, obat anti hama, termasuk di dalamnya menampung hasil-hasil pertanian. Jika di Gorontalo khususnya, menampung hasil produksi Jagung.

Untuk wadahnya sudah dikenal melalui koperasi yang sudah memahami karakteristik petani di desa. Keberadaan koperasi ini ke depan dapat memberikan dampak positif bagi para petani, khususnya dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Hal itulah yang menjadi visi awal berdirinya Koperasi Tani Nusantara Mandiri guna memfasilitasi berbagai kebutuhan para petani, sekaligus menghadirkan solusi terhadap persoalan yang selama ini menjadi kendala bagi para petani dalam meningkatkan produksi di sektor pertanian.

Untuk itu, kami berharap, keberadaan Koperasi ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai momentum penting bagi para petani untuk bangkit dan maju bersama.

Di sisi lain, kerjasama Koperasi Tani Nusantara Mandiri dengan Pemerintah Daerah diharapkan dapat terwujud melalui keterlibatan para Penyuluh Pertanian dalam melakukan pendampingan kepada para petani. □



DER

Faroukh Sunge

Tokoh Masyarakat Bandung

Penciptaan Kondisi Kondusif Butuh Kerjasama Semua Pihak



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MASYARAKAT Indonesia, di manapun berada, tentunya sangat mendambakan ketenangan hidup dan kondisi yang kondusif untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama di bidang perekonomian.

Sejak pra pemilu 2024 hingga saat dan setelah penyelenggaraan pemilu masyarakat masih terkotak-kotak, karena perbedaan pilihan. Semestinya sekarang kondisi yang kondusif sudah tercipta dengan baik, sebab bangsa Indonesia sudah terbiasa dengan perbedaan. Seperti di Bandung ini sudah banyak pembauran dengan suku lain, apalagi agama, sampai saat ini hidup rukun.

Namun, penciptaan kondisi yang kondusif perlu kerjasama dan sinergitas yang kuat antarsesama elemen masyarakat dan juga pemerintah. Kami berharap ini akan terjadi. Makanya, tradisi silaturahmi seperti halalbihalal dan lainnya mesti terus dihidupkan dan ditingkatkan.

Jika hal itu terjadi maka akan semakin terbiasalah kita dengan berbagai macam kegiatan seperti pemilu, yang mengharuskan kita untuk berbeda saling mendukung dan terkotak untuk sementara. Di masa depan kontestasi politik akan menjadi sesuatu yang lumrah dan tidak berpotensi konflik. □

DER

Nur Tajiaturrohmah

Cerita Manis Buah dari *Empon-Empon*

NUR Tajiaturrohmah (44) adalah seorang perempuan pengusaha hebat. Buktinya, Dia berjuang sendirian dari bawah atau dari nol, hingga sepuluh tahun kemudian –atau tepatnya tahun 2023— dia berhasil meraih penghargaan Juara Teladan tingkat Nasional untuk kategori Penyuluhan Kehutanan Swadaya Masyarakat dalam Lomba Wana Lestari Tahun 2023.

From zero to hero, sebutan itu layak disematkan pada pejuang lingkungan, Nur Tajiaturrohmah. Bagaimana tidak, Nur –begitulah dia disapa—pada tahun 2013 mulai membuka usaha makanan dan minuman tradisional. Sebenarnya di balik usaha yang dirintisnya itu ada keinginan mulia yang ingin capainya, yaitu membangunkan masyarakat dari kemiskinan.

Dalam membangun usahanya, Nur memegang prinsip, usahanya harus mampu menjaga alam dari kerusakan yang semakin parah. Usaha yang dijalankan oleh Nur adalah mengolah bumbu dapur menjadi cemilan dan minuman sehat, yang tentunya minuman disukai masyarakat. Bahan bakunya berupa tanaman empon-empon, yang dia tanam dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumahnya, di Desa Kebon Agung, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Rupanya, usaha yang dijalankan Nur berkembang pesat. Sampai-sampai dia kekurangan bahan baku (empon-empon). Lalu, dia berinisiatif untuk mengajak warga di sekitar Desa Kebon Agung menanam empon-empon dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumahnya. Jadi, “Saya yang membuat produk, warga yang menanam bahan bakunya, empon-empon. “Empon-empon yang dihasil masyarakat itu akan saya beli dengan harga di atas harga pasaran,” katanya.

Namun, upaya untuk melibatkan warga masyarakat tidaklah mudah. Ajakan tersebut,



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

menurut Nur, tidak mendapat respon dari masyarakat seperti diharapkan. Bahkan, warga memandang sebelah mata ide yang disampaikan Nur itu. Meski begitu, Nur tak sakit hati, apalagi patah arang. Ia tetap melanjutkan usahanya membuat minuman jamu dari bahan bumbu dapur, dengan bahan baku dia tanam sendiri.

Benar saja, setelah tiga tahun berjalan, usaha Nur Tajiaturrohmah mulai membuahkan hasil. Jamu buatannya semakin banyak dilirik warga masyarakat di luar kampungnya. Sejak itu, diawali tiga perempuan, warga Desa Kebon Agung, mulai ikut membudidayakan Tanaman Obat Keluarga (Toga) sebagai bahan jamu untuk dijual





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

kepada Nur.

Setelah empat tahun atau tahun 2017, di tengah geliat usahanya, Nur kembali mengajak serta masyarakat membudidayakan tanaman obat, dan akhirnya berbuah manis. Itu terjadi ketika Kemenkes RI menyelenggarakan Lomba Pemanfaatan Toga dan Akupresure. Oleh Pemkab Blitar, Nur Tajiaturohmah dipilih menjadi peserta mewakili Kabupaten Blitar.

Dengan penuh semangat, waktu itu, Nur membagikan bibit toga kepada warga yang mau atau berminat menanam tanaman obat. Pihak desa juga tidak berpangku tangan, ikut membantu usaha yang dilakukan Nur bersama masyarakat. Pihak desa berperan, menyadarkan warganya akan pentingnya tanaman obat untuk keluarga.

Berkat perjuangan Nur Tajiaturohmah bersama masyarakat, kebun toga Desa Kebon Agung keluar sebagai pemenang

pada Lomba Pemanfaatan Toga dan Akupresure yang diselenggarakan Kemenkes RI. Keberhasilan tersebut disambut sukacita masyarakat. Mereka (masyarakat) juga makin bersemangat mengembangkan tanaman toga hingga menghasilkan produk makanan dan minuman. Seperti, permen jahe, permen pegagan, brownies toga, minuman telang, dan juga minuman es krim temulawak.

Turi Putih

Kini, lahan toga Desa Kebon Agung telah berkembang menjadi wahana wisata edukasi toga, dengan nama Kampung Toga Turi Putih. Selain mampu mengundang wisatawan untuk datang, Kampung Toga Turi Putih semakin banyak menghasilkan produk makanan dan minuman. Sebagian hasilnya dipasarkan kepada wisatawan yang berkunjung ke kampung tersebut.

Nama Turi Putih digunakan, karena mengandung makna yang sangat dalam. Dalam bahasa Jawa, turi berasal dari kata *mituturi* (memberi tahu). Sedangkan putih adalah simbol kebersihan. Sehingga turi putih memiliki makna berbagi kebaikan, atau berbagi motivasi agar bermanfaat untuk sesama. Sebagaimana ajaran Sunan Kalijaga yang gemar menebar kebaikan dan manfaat bagi sesama.

Tak hanya dijual di tempat, produk Turi Putih telah didistribusikan ke seluruh Indonesia. Juga dibawa sebagai buah tangan para pekerja migran yang kembali ke tempat kerjanya, mulai dari Singapura, Jepang, Taiwan, Saudi hingga Malaysia.

Imbas dari kesadaran warga menanam toga, Kampung Kebon Agung makin hijau. Kawasan hutan di sekitarnya juga dimanfaatkan untuk menanam toga, di sela pohon kayu berdiri tegak di sana. Semua itu membuktikan bahwa Nur mampu manfaat hasil hutan yang bukan kayu ini, hingga punya nilai ekonomis tersendiri.

Jalan terjal serta keberhasilan Nur Tajiaturohmah membangun hutan di Desa Kebon Agung berbuah manis, terpilih menjadi Juara Teladan Tingkat Nasional pada Lomba Wana Lestari Kebon 2023 kategori Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Ia juga memperoleh penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Blitar atas dedikasi dan perannya mendukung pelestarian lingkungan di Kabupaten Blitar. Selamat. □

MBO



Presidential Club, Apa Urgensinya?

Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin membentuk 'Presidential Club,' sebuah himpunan beranggotakan mantan presiden. Wacana pembentukan Presidential Club pun menuai berbagai tanggapan, ada yang mendukung, ada pula yang menganggap tidak perlu. Di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya, tradisi seperti itu dibuat dengan tujuan untuk memberi masukan dan saran kepada presiden yang sedang berkuasa.

Lalu bagaimana seharusnya? Berikut pendapat dari para wakil rakyat yang merespon ide Prabowo Subianto itu.

Habiburokhman Anggota MPR Fraksi Partai Gerindra

Presiden Sebelumnya Perlu Diberi Tempat Spesial

SAYA sudah mendengar keinginan Prabowo Subianto untuk membentuk wadah demikian sejak tahun 2014. Dalam diskusi yang ada, Prabowo Subianto mengatakan, saat perubahan kepemimpinan nasional jangan sampai ada perubahan kebijakan yang ekstrim terkait pembangunan. Selama ini dikeluhkan banyak pihak, bila ganti presiden ganti kebijakan. Hal yang demikian, menurut Beliau, kurang tepat.

Banyak negara yang saat ini maju padahal beberapa puluh tahun yang lalu masih di bawah Indonesia. India misalnya, dari negara itu saat ini banyak orang kaya yang masuk dalam jajaran orang kaya di dunia. Ada 50 orang kaya di dunia dari India. Negara yang berada di Asia bagian selatan itu berhasil mencetak orang kaya di dunia, karena di sana ada keberlanjutan pembangunan.

Para pengusaha di India dalam berbisnis mampu melewati waktu yang lama, melewati berbagai pemerintahan dan rezim. Ketika terjadi pergantian pemerintahan, kekuasaan, para pengusaha tidak memulai bisnisnya dari nol lagi, karena tidak ada perubahan kebijakan. Keberlanjutan pembangunan inilah yang menjadi konsen Prabowo Subianto untuk tetap dijaga.

Presiden selanjutnya memerlukan komunikasi, pendapat, saran, dan mengkonfirmasi



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

pada presiden-presiden sebelumnya bagaimana cara yang paling ampuh untuk memahami kebijakan yang pernah ditempuh. Untuk mencapai itu diperlukan komunikasi dengan orang yang paling konsen saat itu, yaitu dengan presiden sebelumnya. Karena itu (*Presidential Club*) semakin kontekstual dengan ide Prabowo Subianto yang ingin mendorong keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya.

Saat ini, ada Megawati Sukarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo yang menjabat presiden pada masa sebelumnya.

Mereka adalah tokoh yang diakui cukup berhasil ketika memimpin negara. Bagus sekali kalau ide Prabowo Subianto yang sejak lama itu sekarang diimplementasikan dengan benar-benar memberikan ruang yang luas kepada tiga tokoh itu untuk memberikan masukan kepada presiden.

Masukan presiden sebelumnya dengan warga yang lain itu berbeda. Harus kita posisikan berbeda, karena memang mereka adalah *top leader*. Mereka harus diberi ruang yang spesial dan istimewa. □

AWG

Al Muzammil Yusuf Anggota MPR Fraksi PKS

Wadah Formal Sudah Ada Wantimpres

MENANGGAPI rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk *Presidential Club* sebagai wadah wadah informal, yang mungkin saja sejenis pertemuan untuk melakukan lobi. Sebagai wadah informal, *Presidential Club* bisa saja menjadi tempat untuk melakukan lobi atau pertemuan informal. Hal ini sah-sah saja dilakukan oleh presiden.

Saya tegaskan bahwa presiden terpilih memiliki hak untuk bertemu dengan siapa pun dan meminta masukan dari berbagai pihak, namun saya juga menekankan bahwa untuk wadah formal sudah ada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang anggotanya secara eksplisit ditunjuk oleh Presiden. Wantimpres menggantikan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada masa Orde Baru yang dinilai kurang fleksibel dalam perannya sebagai mitra penasihat presiden.

Wantimpres menggantikan keberadaan DPA pada masa Orde Baru, karena DPA dinilai



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

kurang fleksibel dalam perannya sebagai mitra penasihat Presiden, Wantimpres dibentuk di bawah kewenangan presiden. Wantimpres berbeda dengan lembaga DPA

yang sebelumnya dianggap setara dengan lembaga kepresidenan dan sering disebut sebagai lembaga tinggi negara. □

AWG



“Tribute to Akbar Tandjung”

Bamsoet Apresiasi **Kiprah** Akbar Tandjung Maestro Aktivistis Indonesia



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

“Saya mengenal Bang Akbar sebagai sosok yang komplit dan paripurna, baik sebagai aktivis, sebagai politisi, sebagai tokoh pemerintahan, maupun sebagai pribadi,” ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Forum Aktivistis Nasional pimpinan Ketua Bursah Zarnubi, serta tokoh politik dan aktivis nasional Maruarar Sirait, menyelenggarakan acara “Tribute to Akbar Tandjung, Maestro Aktivistis Indonesia.” Sebagai wujud apresiasi atas kiprah dan peran Akbar Tandjung, khususnya dalam pembinaan, pengembangan, dan kaderisasi aktivis nasional.

“Bang Akbar adalah mentor dan guru politik terbaik, yang tidak segan memberikan masukan, nasihat, dan wejangan bagi para juniornya. Termasuk memberikan uang jajan bagi para aktivis. Tidak hanya memiliki kontribusi besar bagi Partai Golkar, di mana kami berdua sama-sama bernaung, melainkan juga bagi kehidupan politik di tanah air. Saya mengenal Bang Akbar sebagai sosok yang komplit dan paripurna, baik sebagai aktivis, sebagai politisi, sebagai tokoh pemerintahan, maupun sebagai pribadi,” ujar Bamsoet dalam sambutannya di acara Tribute to Akbar Tandjung, di Gedung Parlemen,

Ahad (19/5/24).

Hadir Akbar Tandjung bersama Istri Nina Akbar Tandjung, dan puterinya Sekar Akbar Tandjung. Turut hadir Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, Ketua Umum Forum Aktivistis Nasional Bursah Zarnubi, Tokoh Politik dan Aktivistis Nasional Maruarar Sirait, Direktur Eksekutif Indo Barometer sekaligus Penasihat Forum Aktivistis Nasional Muhammad Qodari, Ridwan Hisyam, dan Ketua Panitia “Tribute to Akbar Tandjung” yang juga Anggota DPD RI dari Dapil NTT Angelius Wake Kako.

Hadir pula para tokoh senior dan tokoh politik, antara lain Theo Sambuaga, Prof. Bomer Pasaribu, Letjen TNI (Purn.) Budi Harsono, Ibrahim Ambongono, Krissantono, Anthony Zeidra Abidin, Musfithin Dahlan, Anas Urbaningrum, dan Aziz Pane.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sebagai aktivis, pengalaman berorganisasi di kampus dan di luar kampus, telah



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

menempa karakter Akbar Tandjung sebagai sosok yang egaliter dan memiliki jiwa kepemimpinan. Mulai dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Laskar Ampera Arief Rahman Hakim, Organisasi Kemahasiswaan (Senat Mahasiswa, Dewan Mahasiswa, dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kelompok Cipayang, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), hingga Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI).

“Sebagai politisi, Bang Akbar merupakan tokoh yang ulet dan tangguh, yang disegani dan dihormati oleh sesama politisi. Lika-liku perjalanan dan karir politik dengan segala dinamikanya, telah beliau lalui dengan sangat baik. Dari fungsionaris hingga menjadi ketua umum Partai Golkar, dan dari anggota



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

parlemen hingga kemudian menjabat sebagai Ketua DPR RI,” jelas Bamsuet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, sejarah mencatat, bahwa Partai Golkar dapat tetap eksis hingga hari ini, tidak terlepas dari kepiawaian Akbar

Tanjung sebagai seorang politisi. Ketika Partai Golkar dihadapkan masa-masa sulit dan moment-moment krusial pada era reformasi, beliau menjadi sosok sentral yang mampu “menyelamatkan” dan membangun kembali marwah Partai Golkar.

“Ketika menjabat sebagai Ketua DPR, ketokohan Bang Akbar juga dikenal luas

secara global ketika menjabat sebagai Presiden Organisasi Parlemen Negara-negara ASEAN (AIPO, Asean Inter Parliamentary Organization), dan Presiden Persatuan Parlemen Negara-negara OKI (PUOICM, Parliamentary Union of OIC Members),” terang Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Wakil Ketua Umum FKPP/Kepala Badan Bela Negara FKPP ini menambahkan, sebagai tokoh pemerintahan, Akbar Tandjung juga memiliki pengalaman memangku berbagai jabatan strategis. Beliau pernah memimpin beberapa kementerian, antara lain sebagai

Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Menteri Negara Perumahan Rakyat, Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman, dan Menteri Sekretaris Negara.

“Sebagai pribadi, kami para sahabat dan kolega mengenal Bang Akbar sebagai sosok

yang inklusif, terbuka dan mudah bergaul, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan, baik kawan maupun lawan. Beliau juga berpandangan luas, berfikir positif dan tenang dalam menyikapi berbagai persoalan,” pungkas Bamsuet. □

Diskusi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Lestari: Praktik TPPO Berkelanjutan Berpotensi Ganggu Kedaulatan Negara

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus segera ditangani secara serius, karena merupakan praktik perbudakan modern yang bila dibiarkan berpotensi mengganggu kedaulatan negara.

SEJUMLAH diskusi dan kajian menghasilkan sejumlah rekomendasi dan tindakan untuk mengatasi praktik TPPO yang sudah berlangsung lama hingga kini. Penanganan serius harus segera dilakukan, jangan sampai praktik perbudakan di era global ini mengganggu kedaulatan negara,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema Darurat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Pertengahan 2024, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (22/5).

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M., (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Irjen Pol. Drs. I Ketut Suardana M.Si., (Deputi Penempatan & Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Badan Perlindungan Pekerja Migran/BP2MI), Kombes Pol. Bagus Setiyawan, S.H., SIK., M.H., (Direktur Reserse Kriminal Khusus, Polda Sulawesi Tengah), Wahyu Susilo (Direktur Eksekutif Migrant CARE), dan Yahdi Basma, S.H., (Aktivis Demokrasi dan Kemanusiaan Pasila /Palu, Sigi dan Donggala) sebagai narasumber. Serta Eva Kusuma Sundari (Direktur Sarinah Institute) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, praktik TPPO yang terus terjadi menimbulkan kekhawatiran, karena bukan semata jual beli orang, tetapi sudah melanggar hak-hak kemanusiaan. Bila mekanisme perlindungan tidak direalisasikan secara tegas dan menyeluruh, ujar dia, akan muncul seolah-olah terjadi mekanisme pembiaran. Padahal, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, salah satu tugas negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Perlindungan tersebut, tegas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah, semestinya mencakup perlindungan menyeluruh, yang bisa diwujudkan dengan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

kepastian perlindungan hukum. Pada kenyataannya, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, setiap tahun selalu saja terungkap kasus TPPO dengan berbagai rupa dan modus yang berbeda.

Rerie sangat berharap, para pemangku kepentingan di pusat dan daerah secara bersama serius melihat permasalahan secara lebih jernih dalam mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara dari jeratan praktik TPPO.

Direktur Reserse Kriminal Khusus, Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol. Bagus Setiyawan, S.H., SIK., M.H., mengungkapkan, dalam penanganan TPPO pihaknya memiliki komitmen yang tinggi. Menurut Bagus, dalam penanganan sejumlah kasus TPPO itu beberapa modus operasi terungkap, yaitu antara lain rekrutmen pekerja migran Indonesia, dijanjikan bekerja di luar negeri untuk dijadikan pekerja seks komersial, dan eksploitasi anak di bawah umur dengan dokumen palsu.

Meski begitu, Bagus mengakui, dalam proses penanganan sejumlah kasus TPPO kerap menghadapi beberapa kendala. Antara lain, korban TPPO kerap enggan melapor dan saksi pada kasus TPPO tidak datang karena sudah pindah.

Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo, berpendapat, isu TPPO saat ini sudah mengkhawatirkan. Diakui Wahyu, sudah sejak lama Indonesia masuk dalam darurat trafficking dan saat ini muncul dengan modus baru.

Menurut Wahyu, modus lama kasus TPPO disamakan dengan perekrutan dan penempatan pekerja migran di sektor pekerja rumah tangga, pekerja perkebunan dan anak buah kapal.

Pada tiga sektor tersebut, ungkap dia, Indonesia sangat rentan terhadap praktik-praktik TPPO. Kondisi tersebut diperburuk dengan kondisi ketenagakerjaan nasional yang kurang berkembang secara kualitas. “Tata kelola ketenagakerjaan kita belum human rights based approach,” ujarnya.

Modus operandi baru dalam praktik TPPO, menurut Wahyu, didorong oleh kondisi pengangguran yang meningkat dipicu dampak pandemi. Kondisi lapar kerja itu, tegas dia, dimanfaatkan sindikat untuk merekrut tenaga kerja ke luar negeri dengan informasi yang tidak jelas. Bahkan, tambah Wahyu, saat ini orang muda juga menjadi sasaran sindikat perdagangan orang yang memanfaatkan sektor digital seperti scamming dan judi online.

Menurut Wahyu, ketika anak muda, sarjana yang tinggal di perkotaan dan dari keluarga kelas menengah menjadi sasaran sindikat perdagangan orang, kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Karena, tegas dia, generasi muda kita saat ini menjadi tumpuan harapan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Deputi Penempatan & Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, BP2MI, I Ketut Suardana, mengungkapkan, sejatinya BP2MI bekerja berdasarkan amanat UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sejumlah peraturan yang menjadi turunan UU No.18/2017 itu, jelas Ketut Suardana, juga sudah menegaskan tugas dan wewenang sejumlah pihak dalam proses perlindungan pekerja migran Indonesia, serta kelengkapan persyaratan dalam proses menjadi pekerja migran.

Tentu saja, ujar dia, dalam upaya perlindungan dan pengawasan tersebut BP2MI memerlukan dukungan semua pihak. Diakui Ketut Suardana, pihaknya selalu berupaya mempersiapkan calon pekerja migran Indonesia memiliki kompetensi yang memadai untuk siap bekerja di luar negeri.

Dalam menjalankan perannya, Ketut Suardana mengungkapkan, BP2MI memiliki sejumlah program prioritas antara lain pemberantasan sindikat pekerja migran, penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi, menjadikan pekerja migran Indonesia menjadi VVIP, memodernisasi sistem pendataan dan meningkatkan sinergi dengan sejumlah pihak terkait.

Saat ini, menurut Ketut Suardana, terdapat sekitar 9 juta pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, tetapi yang tercatat di sistem BP2MI hanya 4,99 juta orang. Selebihnya, tambah dia, diduga berangkat secara ilegal.

Pada kesempatan itu, Yahdi Basma, aktivis

demokrasi dan kemanusiaan Palu, Sigi dan Donggala, menceritakan pengalamannya saat menggagalkan praktik TPPO yang akan memberangkatkan calon pekerja ke Timur Tengah. Yahdi mengakui, orang dekat para korban, teman sekampungnya, sangat berperan dalam proses rekrutmen calon pekerja dengan iming-iming pendapatan Rp 8 juta per bulan di Saudi Arabia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Para korban yang berasal dari Palu, Sulawesi Tengah itu, menurut Yahdi, sudah sempat dibawa ke Jakarta lalu dibawa ke tempat penampungan di Surabaya, Jawa Timur. Di lokasi penampungan itu, ungkap dia, para korban dari Palu itu mulai menyadari bahwa keberangkatan mereka ke Saudi Arabia bermasalah.

Dalam pemulangan para korban itu ke kampung halaman mereka, jelas Yahdi, terlihat belum ada aturan dan koordinasi yang jelas antar sejumlah pihak, sehingga prosesnya rumit.

Berdasarkan pengalaman pada kasus tersebut, Yahdi menduga, ada keterlibatan sejumlah pihak pada bagian keberangkatan di bandara, karena dokumen perjalanan yang dipakai para calon pekerja migran itu ilegal.

Yahdi sangat berharap, ada aturan turunan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia hingga tingkat provinsi dan kota,

agar proses perlindungan dapat dilakukan secara menyeluruh.

Sementara itu, Direktur Sarinah Institute, Eva Kusuma Sundari, mendorong agar ada tindak lanjut yang jelas terhadap kasus-kasus TPPO yang terungkap saat ini. Di sisi lain, Eva protes mengapa yang ditangani dan diutamakan aparat adalah kasus-kasus TPPO di luar negeri. Padahal, tegas dia, kasus

perdagangan orang juga terjadi di dalam negeri dan marak dialami para pekerja rumah tangga.

Di dalam draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), tegas Eva, sejatinya ada sejumlah pasal yang mewajibkan para penyedia kerja untuk memberikan perlindungan terhadap para pekerja. Sehingga, ujar Eva, bila RUU PPRT yang sekarang pembahasannya terhambat oleh pimpinan DPR, bisa segera dituntaskan menjadi undang-undang, masalah perlindungan pekerja migran Indonesia bisa segera diatasi.

Eva menilai, saat ini ada problem pada komitmen politik yang rendah dalam mengupayakan perlindungan para pekerja migran dan berharap Kepolisian dan BP2MI segera merekomendasikan percepatan pembahasan RUU PPRT untuk menjadi undang-undang. □

PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA, 1 JUNI 2024

Di Lapangan Garuda, Pertamina Hulu Rokan, Kota Dumai, Provinsi Riau, 1 Juni 2024, berlangsung Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila (Harlah Pancasila). Dengan mengusung tema: ‘Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas Tahun 2045,’ upacara ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, para pimpinan lembaga negara, para menteri, unsur TNI dan Polri, pejabat daerah, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat. Wakil Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, dalam upacara itu, membacakan teks Pancasila, dan Ketua DPD RI AA Lanyala Mahmud Mattaliti membacakan teks Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Bambang Soesatyo: Dunia Internasional Kagumi Pancasila



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila sempat melalui proses dan perdebatan yang sangat panjang. Setidaknya, ada tiga peristiwa penting yang dijadikan argumen para pihak sebagai dasar penetapan hari lahir Pancasila.

Pertama, tanggal 1 Juni 1945 di mana Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara di hadapan sidang Badan

Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Kedua, tanggal 22 Juni 1945 saat Panitia Sembilan yang merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, mengemukakan rumusan Piagam Jakarta dalam sebuah rapat informal BPUPKI di kediaman Soekarno. Ketiga, tanggal 18 Agustus 1945 ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan konstitusi negara (UUD NRI Tahun 1945), dan rumusan sila-sila dalam Pancasila tercantum pada bagian

Pembukaan.

“Semua perdebatan panjang mengenai hari lahir Pancasila selesai ketika Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Kepres menetapkan hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni. Dasar pertimbangannya, rumusan Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni. Sementara rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan final tanggal 18



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Agustus 1945 adalah satu kesatuan rangkaian proses kelahiran Pancasila sebagai dasar negara,” ujar Bamsuet usai mengikuti upacara hari lahir Pancasila di Blok Rokan Riau, Sabtu (1/6/24).

Upacara hari lahir Pancasila dipimpin langsung Presiden Joko Widodo dengan komandan upacara Kombes Andri Ananta Yudhistira. Ketua MPR RI Bamsuet membacakan teks Pancasila, dan Ketua DPD RIAA Lanyalla Mahmud Mattalitti membacakan teks Pembukaan UUD NRI 1945.

Hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dan Fadel Muhammad, para menteri Kabinet Indonesia Maju antara lain Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Mensesneg

Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menlu Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala BIN Budi Gunawan.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menegaskan, Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan landasan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Karenanya, nilai-nilai Pancasila harus diterapkan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa.

“Pancasila sejak awal kelahirannya dimaksudkan sebagai dasar negara, ideologi

dan pandangan hidup bangsa yang mempersatukan kemajemukan, dan menjadi sumber jati diri bangsa. Pancasila akan bermakna ketika nilai-nilainya hadir dalam tindakan nyata di tengah masyarakat. Tidak hanya sekedar menjadi hafalan belaka,” kata Bamsuet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, banyak negara di dunia yang mengagumi Pancasila. Presiden Indonesia pertama Soekarno telah memperkenalkan Pancasila kepada negara-negara di dunia sejak lama. Pada tahun 1956, Bung Karno memperkenalkan Pancasila di hadapan Kongres Amerika Serikat dan Universitas Heidelberg Jerman Barat.

“Di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 30 September 1960, Bung Karno dalam pidatonya berjudul: ‘To Build the World A New’ (Membangun Dunia Kembali), mengenalkan dan menawarkan Pancasila sebagai ideologi internasional. Karena, nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat nasional keindonesiaan, tetapi universal dan internasional,” urai Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini memaparkan, Bung Karno menjelaskan sila pertama hingga kelima dari Pancasila memiliki nilai universal. Semisal, Ketuhanan Yang Maha Esa di sila pertama, kemanusiaan di sila kedua, nasionalisme di sila ketiga, demokrasi di sila keempat, dan keadilan sosial di sila kelima merupakan nilai-nilai universal yang dianut oleh negara lain di dunia.

Dalam pidato di Sidang Umum PBB 1960, Bung Karno juga mengusulkan agar Pancasila dimasukkan ke dalam Piagam PBB. Usulan tersebut mendapatkan sambutan meriah dari para pemimpin dunia.

“Pada tahun 1961, pidato Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB ditetapkan sebagai MoW bersama dengan arsip Gerakan Non-Blok Pertama (GNB I) di Beograd. Kemudian, dalam sidang pleno Executive Board UNESCO tanggal 10-24 Mei 2023, pidato Bung Karno di Sidang Umum PBB juga ditetapkan sebagai Memory of the World (MoW) oleh UNESCO. Ini membuktikan pengakuan dunia atas Pancasila,” pungkas Bamsuet. □



Ahmad Basarah Anjurkan ‘Salam Pancasila’ di Forum-forum Resmi

WAKIL Ketua MPR Ahmad Basarah menghormati hasil Ijtima Ulama VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa bahwa pengucapan salam berbagai agama bukan toleransi yang benar. Hanya saja, untuk kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa, dia berpendapat, salam agama-agama semestinya tetap dibenarkan dan ditambah salam persatuan ‘Salam Pancasila’ di forum-forum resmi.

“Negara kita dihuni oleh 1.340 suku bangsa yang menganut selain enam agama yang diakui negara secara sah juga banyak aliran kepercayaan yang masih hidup. Jika kebhinekaan di negara kita tidak kita jaga, tidak kita rawat, dengan toleransi dan semangat kebangsaan yang utuh, sangat mungkin kohesi sosial di antara kita rapuh, semakin tersekat oleh fanatisme promordialisme, maka persatuan bangsa menjadi terancam,” ujar Ahmad Basarah di Riau, Sabtu (1/6/24).

Pernyataan Ahmad Basarah yang disampaikan saat memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024 di Blok Rokan Dumai, Riau, itu juga ditujukan untuk merespon hasil sidang Komisi Fatwa MUI dalam Ijtima Ulama VII di Pesantren Bahrul Ulum Sungai Liat, Provinsi Bangka Belitung (Babel), 28 – 31 Mei 2024. Dalam ijtima yang diikuti 654 peserta secara nasional dan internasional itu, Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, Kamis (30/5/2024), membacakan keputusan bahwa mengucapkan salam yang berdimensi doa, khusus agama lain, yang diucapkan oleh umat Islam hukumnya haram.

Dalam konteks itu, Ahmad Basarah mengajak semua pihak untuk saling menghormati dalam perbedaan, termasuk perbedaan mazhab dalam Islam. Dia berpendapat, dirinya mengikuti mazhab yang menyatakan bahwa mengucapkan salam agama-agama dibolehkan dalam Islam, sesuai spirit hadist Nabi SAW riwayat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Bukhari Muslim “innamal a’maalu bin-niyat” bahwa sesungguhnya setiap perbuatan manusia dinilai Allah tergantung pada niatnya.

“Dalam Alqur’an, khususnya Surat Al-Mumtahanah (60) ayat 8, jelas sekali Allah mengajarkan bahwa Dia yang Maha Suci tidak melarang umat Islam berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi mereka dalam urusan agama dan tidak mengusir mereka dari kampung halaman. Di situ juga ditegaskan Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi, kalau sesuai hadits Nabi SAW, saat mengucapkan salam agama-agama kita berniat baik untuk menjaga persatuan nasional, apakah salah?”

“Saat saya sebagai umat Islam menyampaikan salam agama lain atau memberikan ucapan selamat memperingati hari-hari besar agama lain, niat dalam hati saya hanya untuk menghormati dan menjaga toleransi serta memperkokoh kehidupan kebangsaan Indonesia dan bukan untuk menoleransi apalagi mengompromikan aqidah keislaman saya,” tambah Wakil Ketua Lakpesdam PBNU ini.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu mengaku sangat menghormati kedudukan dan peran

MUI. Apalagi Perpres 151/2014 menyatakan bahwa organisasi ini adalah wadah musyawarah para ulama untuk mengayomi dan meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.

Hanya saja, Ahmad Basarah mengingatkan, karena MUI bukan institusi negara atau merepresentasikan negara, maka sesuai UU No. 15 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, fatwa-fatwa MUI tersebut bukanlah hukum negara yang mempunyai kekuatan memaksa untuk diterapkan pada seluruh rakyat Indonesia.

“MUI tentu saja harus diakui sebagai salah satu kekuatan sosial keagamaan dalam infrastruktur ketatanegaraan. Karena itu, fatwa organisasi ini hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa punya ikatan primordialisme terhadap MUI itu sendiri. Sedangkan umat Islam yang merasa tidak punya ikatan primordial cukup menghormati fatwa MUI itu sebagai pendapat dan pemikiran individu-individu ulama serta ormas-ormas Islam yang boleh diikuti atau tidak,” jelas Doktor bidang hukum ketatanegaraan Universitas

Diponegoro Semarang itu.

Ahmad Basarah yang juga dosen tetap Universitas Islam Malang tersebut, mengajak semua elemen bangsa kembali pada spirit sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pancasila yang bermakna bahwa di negara ini, semua warga negara bertuhan dan menjalankan perintah Tuhannya masing-masing dengan saling hormat-menghormati di antara sesama pemeluk agama dan kepercayaan.

“Islam yang saya pahami adalah agama

damai yang rahmatan lil alami atau rahmat bagi semesta alam sesuai makna Islam itu sendiri, yakni perdamaian. Di tengah kebhinnekaan, wajar saja jika harus ada yang disebut mujaamalah (sopan santun sosial) di antara masyarakat yang majemuk. Di sinilah salam agama-agama itu berperan, yakni melakukan mujaamalah, toleransi, demi kuatnya persatuan nasional,” tegas Sekretaris Dewan Penasihat PP Baitul Muslimin Indonesia ini.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu mengajak

semua pihak, terutama umat Islam, untuk berkaca kepada tokoh-tokoh besar dunia yang berpandangan moderat dalam muamalah. Dia mencontohkan tiga ulama kontemporer, yakni Grand Syekh Al Azhar Mesir Prof Ahmed Thayeb, serta Nasr Farid Washil dan Ali Jum’ah, keduanya mantan mufti Mesir. Mereka adalah tokoh-tokoh Islam dunia yang membolehkan ucapan selamat natal sebagai bentuk mujaamalah dan ‘berlaku baik dan adil’ sebagaimana dalam Alqur’an surat Al-Mumtahanah ayat 8. □

Fadel Muhammad: Kita Gelorakan Semangat Pancasila dari Daerah Riau



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad yang mengikuti secara langsung upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Garuda, Pertamina Hulu Rokan, Kota Dumai, Provinsi Riau. 1 Juni 2024, mengatakan, dirinya bergembira bisa mengikuti Peringatan Harlah Pancasila.

“Saya gembira sekali, alhamdulillah, hari ini bisa berkesempatan bersama Presiden Joko Widodo memperingati Harlah Pancasila,” ujarnya kepada wartawan selepas acara itu. “Hadir juga Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua MPR lainnya, Ahmad Basarah,” tambahnya.

Menurut anggota MPR dari Kelompok DPD itu, ada tiga makna besar dalam Harlah Pancasila tahun ini. Pertama, peringatan Harlah Pancasila merupakan momen untuk mengenang proses lahirnya dasar negara yang dicituskan pada 1 Juni 1945 sebelum Indonesia merdeka. “Dengan peringatan ini, kita menghargai spirit dari Presiden Soekarno”, ungkapny.

Kedua, Pemerintah memilih peringatan Harlah Pancasila di Dumai untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa ini memiliki lahan minyak yang besar dengan produksinya hampir 200.000 barel. Dari produksi sebanyak itu, lebih dari 160.000 barel mampu dikelola

oleh putera-putera bangsa sendiri. “Melalui Peringatan Harlah Pancasila tahun ini, Presiden ingin menunjukkan semangat kebangsaan yang perlu terus dikembangkan,” tutur alumni ITB itu.

Fadel Muhammad yang saat upacara menggunakan pakaian *takowa*, khas Gorontalo, itu lebih lanjut mengatakan, dirinya mengapresiasi langkah Presiden yang menggelorakan semangat kebangsaan dari daerah yang disebut Bumi Lancang Kuning itu.

Makna ketiga dari Harlah Pancasila digelar di Provinsi Riau, menurut pria yang pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan itu, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Pancasila merupakan milik bersama. “Jadi peringatan Harlah Pancasila mesti digelar di berbagai daerah, nanti bisa diadakan di Papua, Gorontalo, dan daerah lainnya,” paparnya. “Digelar di berbagai daerah untuk menunjukkan dasar negara ini dimiliki bangsa Indonesia,” tambahnya.

Seperti ideologi lainnya, Pancasila menurut pria yang pernah menjabat Gubernur Gorontalo dua periode itu, ke depannya akan mendapat tantangan yang besar. Disebut kemajuan teknologi salah satu tantangan yang ada. Teknologi informasi diakui telah mengubah gaya hidup anak-anak muda. “Untuk itu, kita harus memasyarakatkan Pancasila dengan pola-pola baru agar bisa diresapi Generasi-Y dan Generasi-Z”, ucapnya.

Ditambahkan, Pancasila merupakan salah

satu pilar dari Empat Pilar MPR yang disosialisasikan secara massif, selain UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Di sela-sela kunjungan kerja di Riau, Fadel Muhammad menerima Ketua Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Riau, Albeny

Yuliandra. Dalam pertemuan, Albeny menyampaikan, capaian kinerja lembaga yang dipimpinnya baik yang berjangka panjang maupun pendek. Dia mengungkapkan, kemajuan koperasi yang dikelolanya itu dicapai selama beberapa tahun ini.

Fadel Muhammad yang juga sebagai

Ketua Umum Induk Koperasi Karyawan (Inkopkar) antusias mendengar kemajuan Puskopkar Riau. Disebutkan, Puskopkar provinsi itu aktif mengelola koperasinya. Prinsip koperasi sebagai sokoguru perekonomian didorong bisa berkembang di Riau lewat Puskopkar. □

Hidayat Nur Wahid: Pemuda Pancasila Agar Tetap Terdepan Laksanakan Pancasila



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, Lc., MA., jelang peringatan Hari Lahir Pancasila, menerima Delegasi Pimpinan MPC Pemuda Pancasila Jakarta Selatan di Ruang Kerjanya, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (31/5/2024). Dalam pertemuan itu, Hidayat Nur Wahid mengingatkan Pemuda Pancasila agar semakin terdepan melaksanakan Pancasila dengan aktif di tengah masyarakat, dan dengan itu terus tetap komit dengan kesepakatan nasional dalam ideologi bangsa. Sehingga Pemuda Pancasila tidak gamang dan tetap percaya diri di tengah perkembangan dan gejolak yang ada di masyarakat.

“Dengan Pancasila yang diamalkan oleh para pemuda yang semakin aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana para pemuda menjadi solusi bagi

masalah yang dihadapi mereka sendiri seperti masalah ekonomi dan sebagainya. Pemuda Pancasila akan makin memberikan kontribusi besar untuk menyemangati warga bangsa ini agar tidak menjadi gamang, tidak bingung, dan tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila seperti korupsi, merusak lingkungan, intoleran, radikalisme, dan lain-lain,” kata Hidayat Nur Wahid dalam pertemuan itu.

Dalam pertemuan itu, Delegasi Pimpinan MPC Pemuda Pancasila Jakarta Selatan dipimpin Ketua MPC PP Kota Jakarta Selatan R.H. Yedidiah Soerjosoemarno, SH., ST., didampingi Dendy Jauhari Kurniawan (Sekretaris MPC PP Jakarta Selatan), Abudul Hasyim (Wakil Ketua), Novianto (Wakil Ketua), Hj. Nabila Abubakar Al Habsyi, S. Si, M.Si (Sekretaris DPC Srihandi, Jakarta Selatan).

HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid,

mengungkapkan, di era sekarang ini sedang terjadi transisi yang tidak sederhana. Misalnya, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membawa berbagai dampak ikutannya. Bahkan, kantor-kantor pusat organisasi kemasyarakatan pun juga ikut pindah. “Tetapi apapun ibukotanya, Pancasila akan tetap sama. Komitmen mengamalkan Pancasila juga harus sama, bahkan seharusnya dengan terjadinya pemindahan ibukota pengamalan ke-lima sila Pancasila harusnya semakin kuat, untuk memastikan NKRI tetap jaya dan digdaya,” ujar Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS ini.

Menurut HNW, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara masih menunggu Keppres tentang pemindahan itu. DPR bersama pemerintah memang telah mengesahkan UU tentang DKI Jakarta yang diubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Pun sudah ada UU tentang IKN. Tetapi dalam kedua UU itu ada satu klausul bahwa kepindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara harus berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres). “Sampai hari ini Presiden belum mengeluarkan Keppres. Jadi, secara de facto, ibu kota negara masih Jakarta,” katanya.

Dalam konteks geopolitik dan geostrategis, lanjut HNW, masih banyak kalangan yang mengkritisi IKN. “Namun, apapun hasilnya, pemindahan ibukota sudah diputuskan dan sudah ada UU-nya walaupun belum ada Keppres-nya. Tapi, Pancasila tidak akan menjadi kehilangan orientasinya hanya karena ibu kota negara pindah. Pemindahan ibukota yang tujuannya untuk pemerataan pembangunan itu seharusnya semakin

memperkuat pemahaman tentang kenegaraan dan kebangsaan, serta kesatuan NKRI,” imbuh HNW yang juga Ketua Dewan Pakar Pemuda Pancasila Jakarta Selatan.

Selain soal pemindahan ibukota, HNW juga menyoroti kasus korupsi yang sangat luar biasa, yaitu korupsi Timah yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun. “Padahal kalau kita melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dengan benar, tidak mungkin terjadi korupsi, apalagi sebesar itu,” tandasnya.

HNW menambahkan, kondisi-kondisi transisi di era sekarang ini bisa menimbulkan adanya kegamangan dan polemik di masyarakat. Karena itu, kesatupaduan

nasional perlu dirawat dengan cara yang lain, seperti upaya organisasi Pemuda Pancasila yang semakin aktif di masyarakat dan membuktikan bahwa Pancasila itu tetap eksis. “Sehingga Pemuda Pancasila tidak perlu gamang dengan perkembangan yang ada, dan tetap komit dengan kesepakatan nasional kita, dalam ideologi bangsa, mengamalkan Pancasila secara benar dan menyeluruh,” jelas HNW.

Dalam pertemuan itu, Yedidiah Soerjosomarno mengungkapkan, MPC Pemuda Pancasila Jakarta Selatan sedang mengupayakan anggota PP menjadi wirausaha untuk meningkatkan kesejahteraan. “Ada bantuan program wirausahawan sosial dari

Kementerian Sosial. Bantuan wirausaha itu diberikan kepada kelompok, bukan perorangan, sehingga ada tanggung jawab bersama untuk mengelola usaha. Setiap ranting diharapkan memiliki kelompok usaha, semacam warung,” katanya.

HNW mendukung program wirausaha kepada anggota PP Jakarta Selatan. Menurut HNW, perlu adanya pelatihan dan contoh kelompok anggota PP yang berhasil mengelola usaha. “Perlu adanya contoh usaha yang berhasil sehingga bisa mendorong anggota PP lainnya untuk berwirausaha dan mendapat kepercayaan dari pihak Kementerian Sosial dan pihak lain yang memberikan bantuan,” pungkasnya. □

Lestari Moerdijat: Proses Pembangunan Butuh Gerak Bersama Dilandasi Nilai-Nilai Pancasila



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyatakan, proses pembangunan butuh gerak bersama anak bangsa yang dilandasi nilai-nilai Pancasila, tingkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila setiap warga negara sebagai landasan untuk mewujudkan persatuan setiap anak bangsa dalam merealisasikan tujuan pembangunan nasional.

“Dalam mewujudkan sejumlah target pembangunan, kita membutuhkan gerak bersama dengan landasan berpikir dan berperilaku nilai-nilai kebangsaan yang telah

diwarisi oleh para pendiri bangsa di dalam sila-sila Pancasila,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat pada keterangan tertulisnya, Sabtu (1/6), dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni.

Pada peringatan Hari Lahir Pancasila yang mengusung tema: “Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”, menurut Lestari, adalah upaya agar setiap anak bangsa bisa menjiwai dan mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam setiap sila pada Pancasila, harus menjadi prioritas bangsa dalam mewujudkan sumber

daya manusia (SDM) yang tangguh dan berdaya saing.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bila diamalkan dalam keseharian bisa menjadi dasar setiap anak bangsa untuk berperan aktif dalam proses mewujudkan sejumlah target pembangunan. Dengan negara yang terdiri dari ribuan pulau, beragam suku, dan sejumlah target pembangunan yang dicanangkan, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, bangsa Indonesia memerlukan gerak bersama dalam upaya mewujudkan target pembangunan itu.

Menurut Rerie, dengan kemampuan memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti antara lain nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah untuk mufakat, dan keadilan sosial, dapat diciptakan gerak bersama setiap anak bangsa dalam proses merealisasikan tujuan pembangunan nasional.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dijadikan momentum oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat di negeri ini untuk terus meningkatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian. □

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di SMA Labschool Kebayoran

Bamsoet Ingatkan **Ancaman** Kemajuan Teknologi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama OSIS SMA Labschool menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dalam rangkaian acara Sky Nation 2024 SMA Labschool Kebayoran, Jakarta. Penyelenggaraan Sky Nation 2024, sebuah ajang lomba ketangkasan baris-berbaris, yang diikuti oleh Tim PASKIBRA (Pasukan Pengibar Bendera) dari SMA dan SMP se-Jabodetabek, adalah manifestasi dari pembangunan karakter dan jati diri pelajar yang dapat menggugah semangat nasionalisme, serta memupuk rasa cinta tanah air.

“Pelatihan PASKIBRA adalah ibarat ‘kawah candradimuka’, tempat di mana para pelajar ditempa dan digembleng, mengenai kekompakan, kedisiplinan, serta jiwa kepemimpinan. Muaranya jelas, yaitu terwujudnya generasi muda bangsa yang memiliki kepribadian unggul dan berdaya saing, berjiwa Pancasila, dan berhati Indonesia,” ujar Bamsoet dalam



Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di SMA Labschool Kebayoran, Jakarta, Sabtu (4/5/24).

Hadir, antara lain Kepala Sekolah SMA Lab School Kebayoran Risang Dinar Dana, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Doni Handrisanyah, Kepala Pengelola Sekolah Lab School UNJ Totok Bintoro, serta para guru dan siswa SMA Labschool Kebayoran.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, mewujudkan pribadi-pribadi dengan karakter kepribadian unggul dan berdaya saing,

berjiwa Pancasila, dan berhati Indonesia, akan selalu menghadirkan tantangan. Tantangan itu akan mewujudkan pada beragam fenomena, salah satunya yang bangsa Indonesia hadapi saat ini, khususnya bagi generasi muda bangsa, adalah berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.

“Lompatan kemajuan teknologi informasi ini ditopang dengan hadirnya gadget yang semakin



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

canggih dengan fitur-fitur yang memanjakan penggunaannya. Sebagai gambaran, pada tahun 2023, jumlah handphone aktif di Indonesia mencapai 354 juta, padahal jumlah penduduknya hanya 278 juta. Senada

dengan melimpahnya jumlah gadget yang beredar, jumlah pengguna internet pun hampir mencapai 80 persen dari total jumlah penduduk Indonesia," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPi dan Wakil Ketua

Umum Pemuda Pancasila serta Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga berpotensi menghadirkan 'sisi gelap' kemajuan peradaban. Kewaspadaan terhadap 'sisi gelap' kemajuan teknologi informasi, terutama dampaknya bagi generasi muda, menjadi penting untuk kita kemukakan. Misalnya kita dapat bercermin dari catatan Badan Intelijen Negara (BIN), bahwa remaja dan generasi muda adalah elemen masyarakat yang paling rentan terpapar oleh paham radikalisme.

"Rujukan lain, hasil survei indeks keadaban digital (Digital Civility Index) yang dilakukan Microsoft tahun 2020, menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling 'tidak sopan' di kawasan Asia Tenggara. Faktor yang memengaruhi buruknya indeks keadaban digital, antara lain hoax dan penipuan (47%), ujaran kebencian (27%), dan diskriminasi (13%)," pungkas Bamsoet. □

Delegasi Madrasah Bai Mahdi Sholeh Ma'mun Serang

Yandri Susanto: Indonesia Butuh Generasi Penerus Yang Handal



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI H Yandri Susanto menyatakan bahwa Indonesia butuh generasi penerus yang handal menyongsong Indonesia Emas 2045. Selain bekal ilmu pengetahuan dibutuhkan juga bekal ilmu agama untuk menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

"SDM yang handal serta memiliki pondasi

pengetahuan agama dibutuhkan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila, generasi muda Indonesia diharapkan memiliki bekal ilmu pengetahuan dan ilmu agama, sehingga tercipta keseimbangan antara bekal untuk memajukan bangsa serta bekal untuk di akhirat," jelas Yandri

Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR

RI Yandri Susanto saat menerima kunjungan delegasi Madrasah Bai Mahdi Sholeh Ma'mun Serang hari Senin, 6 Mei 2024, di Gedung Nusantara V Komplek MPR/DPR Senayan, Jakarta.

Turut hadir, ketua Yayasan Bai Mahdi Sholeh Ma'mun Ratu Rachmatuzakiyah, Pengasuh Ponpes Al Qur'an Bai Mahdi Sholeh Ma'mun Ratu Qori Muqoronatur Rohmah, Kepala MTs Al Mahdi Devi Anggara Heriansyah, Kepala MAAI Mahdi Ade Arsiah, dan Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR Marisun.

Untuk menjadi SDM yang handal, menurut Yandri, dibutuhkan keseriusan dalam belajar dengan menghormati guru. "Karena melalui bapak dan ibu gurulah ilmu pengetahuan dan ilmu agama dapat diteruskan kepada anak murid," tegas Yandri.

Lebih lanjut, Yandri menegaskan, keseriusan dalam menimba ilmu dapat diawali dengan menghormati bapak/ibu guru. Karena adab dalam belajar salah satu yang utama adalah menghormati guru. "Dengan menghormati guru maka akan lahir keridhaan, sehingga murid akan mudah menerima ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang diberikan," tutup Yandri. □



Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Bersama FKPPi DKI Jaya

Bamsoet Ajak Sukseskan Pilkada Serentak 2024



KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum FKPPi/Kepala Badan Bela Negara FKPPi Bambang Soesatyo mengingatkan kepada seluruh kader FKPPi, setelah berhasil melalui Pemilu 2024 dengan baik, kini waktunya FKPPi kembali menjadi lokomotif dalam menjaga persaudaraan kebangsaan dalam menghadapi Pilkada 2024. Jangan sampai karena perbedaan

pilihan politik, membuat perpecahan di daerah.

Pilkada Serentak 2024 akan diikuti sebanyak 37 provinsi, serta 508 kabupaten/kota. Hampir seluruh provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Indonesia, termasuk Papua, menyelenggarakan Pilkada Serentak. Kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak menyelenggarakan Pilgub, serta DKI Jakarta yang tidak menyelenggarakan Pilbup/

Pilwakt. Karena proses kepemimpinannya sudah diatur dalam UU No.13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta UU No.29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

"Persaingan dan tensi politik di Pilkada Serentak bisa jadi tidak kalah sengit dibandingkan Pilpres. Karena itu, seluruh elemen bangsa harus kembali mawas diri.





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Kesuksesan Pemilu 2024 harus dijadikan pegangan agar Pilkada Serentak yang tinggal beberapa bulan lagi, tidak menorehkan luka perpecahan di masing-masing daerah. Para pemimpin di daerah harus meniru pemimpin di pusat sebagaimana yang sudah dicontohkan Prabowo - Gibran, Anies - Muhaimin, dan Ganjar-Mahfud, bahwa ada kalanya kita bertanding ada kalanya kita bersanding,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama FKPPi DKI Jaya, di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, Selasa (7/5/24).

Turut hadir antara lain, Ketua FKPPi DKI Jaya Bambang Dirgantoro, dan Sekretaris FKPPi DKI Jaya Novri Yasda Putra.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan

Keamanan ini menjelaskan, terkait kondisi di Papua, pada prinsipnya penyelesaian persoalan di Papua harus mendahulukan cara-cara damai melalui musyawarah, dialog, dan pendekatan humanis sebagai pilihan pertama dan utama. Pendekatan humanis tidak kemudian dimaknai mengabaikan perlunya langkah tegas dan terukur, khususnya ketika nyawa dan kehidupan rakyat yang menjadi taruhannya.

Negara harus hadir memastikan hak rakyat Papua untuk hidup aman, tenteram, dan damai, sebagaimana diamanatkan Konstitusi, tidak tercederai oleh aksi kekerasan yang menghantui kehidupan mereka. Karena, mustahil membangun Papua jika intensitas dan eskalasi aksi kekerasan tak kunjung usai. Dukungan perlu diberikan

kepada TNI-Polri untuk mengambil tindakan tegas dan terukur dalam memastikan Papua tetap aman dan damai. Sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua bisa terus ditingkatkan,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, arah kebijakan politik nasional yang semakin baik dalam penyelesaian persoalan Papua, telah dimanifestasikan melalui beberapa kebijakan. Misalnya, penetapan UU. No.2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dilatarbelakangi semangat mendorong keberlanjutan pemberian dana Otsus dan perbaikan tata kelolanya, serta pemekaran wilayah Papua dalam rangka pemerataan akses pembangunan.

“Pada tahun 2024, dana otsus Papua mencapai Rp 9,62 triliun. Meningkat jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp 8,91 triliun. Besarnya dana otsus ini harus diimbangi dengan mekanisme evaluasi untuk mengukur efektivitas dan akuntabilitasnya. Bentuk keberpihakan lain yang diimplementasikan untuk memajukan masyarakat Papua, misalnya juga tercermin dari ketentuan yang memberikan keistimewaan bagi Orang Asli Papua untuk menduduki jabatan Gubernur/Wakil Gubernur di wilayah Papua,” pungkas Bamsoet. □

Delegasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia

Bamsoet Dorong Peningkatan Peran Politik Perempuan

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) akan bekerjasama meningkatkan edukasi politik bagi perempuan. Baik melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Focus Group Discussion, dan berbagai kegiatan lainnya. Hal ini untuk mendukung kemajuan peran

perempuan dalam perpolitikan Indonesia.

KPPI juga concern menyuarakan pentingnya perbaikan sistem politik dalam penyelenggaraan Pemilu agar senantiasa sesuai jati diri bangsa yang bebas dari politik uang dan berbagai pelanggaran lainnya. Serta pentingnya partai politik mereformasi diri agar senantiasa menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.

“Kritik terhadap sistem Pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak sudah banyak disuarakan, baik oleh akademisi hingga praktisi politik itu sendiri. Tidak heran jika kini mulai disuarakan kembali penerapan sistem proporsional tertutup. Sebetulnya diluar sistem proporsional terbuka atau tertutup, ada satu alternatif lain, yakni campuran terbuka



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dengan tertutup. Jika bisa dielaborasi lebih jauh melibatkan para aktifis, akademisi serta praktisi, sistem campuran terbuka dan tertutup ini bisa menjadi solusi dalam mewujudkan Pemilu demokratis yang tetap menguatkan fungsi partai politik sekaligus tetap membuat Caleg dekat dengan rakyat,” ujar Bamsuet usai menerima DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), di Jakarta, Senin (6/5/24)

Hadir jajaran Kaukus Perempuan Politik Indonesia, antara lain Dewan Kehormatan Ratu Dian Hatifah, Presidium Kanti W. Janis, dan Sekjen Lis Dedeh. Hadir pula

Nurikasari, Ammy Amalia Fatma Surya, dan Jeane IB.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sejauh ini, peran perempuan dalam politik memang sudah meningkat, namun potensinya masih sangat besar untuk terus ditingkatkan. Kajian Perludem memperkirakan, Pemilu 2024 memberikan hasil signifikan bagi perempuan. Jumlah sementara perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR RI meningkat dari 20,5% pada Pemilu 2019 menjadi 22,1% pada Pemilu 2024.

“Jumlah perempuan di DPR diprediksi mencapai 128 orang, dari sebelumnya 118 orang. Jumlah tersebut masih harus menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, angkanya diprediksi tidak akan terlalu turun signifikan. Peningkatan keterpilihan perempuan dalam Pemilu 2024, walaupun belum seperti yang diharapkan, namun telah membuktikan bahwa keberpihakan terhadap perempuan sebagaimana tertuang dalam UU Pemilu telah memberikan hasil signifikan,” terang Bamsuet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (salah satu dari tiga Ormas pendiri Golkar/ Trikarya) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, di balik fakta meningkatnya keterpilihan perempuan di DPR RI, tetap tidak bisa menutup mata terhadap berbagai sengkaret penyelenggaraan Pemilu 2024 yang masih banyak merugikan perempuan.

Selain masih maraknya politik uang, hasil kajian Netgrit terhadap daftar calon tetap DPR RI menunjukkan masih adanya partai politik yang belum memenuhi keterwakilan 30% perempuan di semua daerah pemilihan.

“Jikapun kuota perempuan terpenuhi, rata-rata Caleg perempuan tidak mendapatkan nomor urut 1. Sistem pemilu memang menggunakan proporsional terbuka suara terbanyak, namun posisi nomor urut 1 tetap memiliki privilege tersendiri didalam masyarakat,” pungkas Bamsuet. □



Sosialisasi Empat Pilar MPR Bersama PERGUBI

Syarief Hasan: Implementasi Nilai-nilai Empat Pilar Harus Ditingkatkan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

RATUSAN profesor atau guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, Kamis (23/05/2024), berkumpul di Jakarta. Kehadiran mereka yang terhimpun dalam PERGUBI (Persatuan Profesor/Guru Besar Indonesia) di Jakarta itu guna mengikuti Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih populer disebut Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Di sela acara sosialisasi itu juga digelar pameran dan seminar tentang koperasi, usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM). Hadir dalam sosialisasi dan pameran itu, Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan MM., MBA. Dan, acara diawali dengan pengantar dan pemaparan oleh Prof. Dr. Gunawan Tangkilisan selaku Ketua Panitia Acara, dan Ketua DPP PERGUBI Prof. Gimbal Dolaksaribu.

Dalam sosialisasi yang bertema: 'Menuju Indonesia Emas dalam Sistem Ekonomi Pancasila,' Sjarifuddin Hasan memaparkan seputar pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintah, khususnya yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

(SBY), dalam waktu 20 tahun terakhir.

Strategi pembangunan di era Presiden SBY, menurut Syarief Hasan, begitu dia biasa disapa, ada empat strategi, yaitu: Pertama, pertumbuhan yang berdasarkan pemerataan. Secara geografis, katanya, bangsa ini terdiri dari beribu pulau sehingga pembangunan harus merata. "Jangan sampai pembangunan, misalnya, hanya di

Pulau Jawa," tutur Syarief Hasan, yang di masa Presiden SBY menjabat Menteri Koperasi dan UMKM.

Strategi kedua, pembangunan ekonomi yang orientasinya menurunkan tingkat kemiskinan. Bila pembangunan ekonomi tinggi, tetapi angka kemiskinan tidak berubah, itu bukan visi dari pemerintahan Presiden SBY. "Visi Presiden SBY adalah



pembangunan tinggi tetapi kemiskinan harus turun,” ujar pria yang menjadi Guru Besar di Universitas Negeri Makassar itu.

Ketiga, visi pembangunan Presiden SBY adalah mengurangi pengangguran. “Kalau pembangunan tidak menciptakan lapangan kerja maka apa yang dilakukan tidak bermanfaat bagi rakyat,” ujar anggota DPR yang duduk di Komisi I itu. Dan, keempat, pembangunan harus berpihak pada lingkungan. “Mengapa lingkungan sangat diperhatikan, karena untuk kepentingan jangka panjang,” tuturnya.

Jadi, selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden SBY (2004-2014), papir Syarif Hasan, pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 5,79%, bahkan 6,5%. “Setelah

Gibran. “Semakin banyak informasi diberikan kepada pemerintah dan itu juga bermanfaat bagi para pelaku usaha UMKM dan koperasi”, tegasnya.

Dalam sosialisasi yang dilakukan mulai pukul 09.00 WIB itu, Syarif Hasan menegaskan, pembangunan ekonomi penting namun bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa juga harus diperhatikan. “Implementasi nilai-nilai Empat Pilar harus ditingkatkan di masyarakat,” harapnya. Dirinya yakin, para guru besar paham akan nilai-nilai kebangsaan.

Menurut Syarif Hasan, tantangan Sosialisasi Empat Pilar adalah di satu sisi kita ingin nilai-nilai kebangsaan bisa diamalkan masyarakat, namun di sisi yang



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

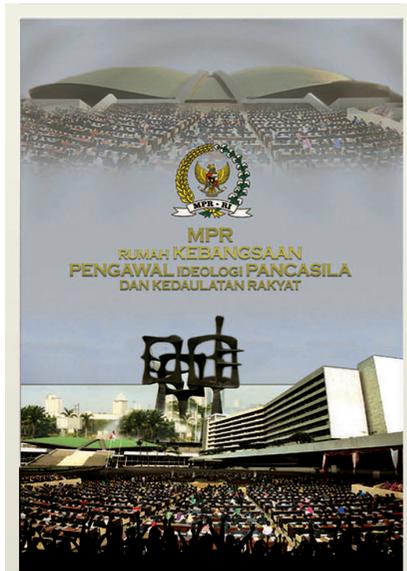
pemerintahan Presiden SBY, atau pada pemerintahan berikutnya, capaian pertumbuhan ekonominya rata-rata hanya 4,11%, yang tertinggi 5,1%”, ungkap pria asal Sulawesi Selatan itu..

Menjelang pergantian kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto, ia berharap, PERGUBI berkontribusi kepada pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan, bahkan sampai tahun 2045. “Saya telah memberikan pandangan dan pengalaman bagaimana membangun perekonomian dan prestasi-prestasi yang pernah dicapai maupun yang belum,” ujarnya.

Hasil dari pertemuan para guru besar hari itu didorong untuk dianalisa dan diformulasikan untuk menjadi masukan dari PERGUBI kepada pemerintahan Prabowo-

lain masih ada masyarakat yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. “Bila kebutuhan dasar belum tercukupi maka susah menjelaskan nilai-nilai Empat Pilar pada masyarakat yang kebutuhan dasarnya terpenuhi ini,” ujarnya. “Saat sosialisasi mereka hadir, namun setelah itu tidak memikirkan lagi apa yang disampaikan,” tambahnya.

Untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa di masyarakat maka kebutuhan dasar mereka harus terlebih dahulu terpenuhi. Untuk itu, Syarif Hasan berharap, pemerintah harus hadir di tengah kebutuhan rakyat dan kepada para pelaku UMKM dan koperasi. “Pemerintah bertanggung jawab terhadap kebutuhan rakyat dan apa yang diinginkan oleh pelaku UMKM dan koperasi,” tegasnya. □



Implementasi Sila-sila Pancasila

- Sila 1 (Yellow Star):**
 - Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
 - Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
 - Berhenti takabur, mulailah bersyukur
- Sila 2 (White Chain):**
 - Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
 - Berhenti memaki, mulailah memakai hati
 - Berhenti curiga, mulailah menyapa.
- Sila 3 (Green Tree):**
 - Berhenti berseteru, mulailah bersatu
 - Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
 - Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan
- Sila 4 (Red Bull):**
 - Berhenti silang pendapat, mulailah mencari muafakat
 - Berhenti besar kepala, mulailah berlapang dada
 - Berhentilah bersilat lidah, mulailah bermusyawarah
- Sila 5 (Green Rice):**
 - Berhenti malas, mulailah bekerja keras
 - Stop diskriminasi, mulailah toleransi
 - Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi



Setjen MPR dan Universitas Pancasila Teken MoU Sosialisasi Empat Pilar MPR



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PELAKSANA Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah SE., MM., bersama Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Setjen MPR dan Universitas Pancasila (UP) Jakarta.

Presesi penandatanganan MoU itu berlangsung di Ruang Nusantara, Fakultas Hukum UP, Rabu (08/05/2024), bersamaan dengan digelarnya Focus Group Discussion (FGD) dengan tema: 'Peran MPR Sebagai Rumah Kebangsaan.' Kegiatan ini adalah salah satu cara atau metode dilakukan oleh MPR dalam upaya mengajak para mahasiswa untuk tidak bosan mempelajari dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Siti Fauziah, yang biasa disapa Bu Titi, di awal sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Universitas Pancasila yang telah menandatangani nota

kesepahaman, khususnya menyangkut program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

"MPR merasa perlu mengajak semua pihak untuk bekerjasama menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI, karena MPR sadar bahwa Empat Pilar MPR harus disosialisasikan kepada seluruh bangsa Indonesia sedini mungkin," ungkapnya.

Ibu Titi selanjutnya menjabarkan bahwa pengamalan Pancasila bukanlah sesuatu yang mudah, dan perlu perjuangan. Siti Fauziah mencontohkan, mengerjakan soal ujian dengan jujur, tidak menyontek atau minta bantuan orang lain, misalnya, adalah sikap yang sesuai dengan Pancasila. Tetapi, acap kali mahasiswa dihadapkan pada kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal ujian.

"Bisa tidak, kita berperilaku sesuai Pancasila, meskipun resikonya tidak lulus ujian. Inilah sebagian tantangan yang dihadapi dalam menerapkan sila-sila Pancasila. Di satu sisi menghadapi resiko

tak lulus, di sisi lain kita harus berlaku jujur, adil, dan bertanggung jawab," ujarnya.

Selanjutnya, Siti Fauziah juga meminta para mahasiswa untuk ikut mempertahankan jatidiri bangsa Indonesia, sekalipun harus berinteraksi dengan budaya asing. Jangan sampai, karena intens berinteraksi dengan bangsa lain, membuat mahasiswa melupakan jatidiri bangsa Indonesia. "Boleh saja kita mengenal dan hafal lagu-lagu asing, termasuk Korea, tapi jangan sekali-kali melupakan lagu-lagu kita sendiri, apalagi lagu-lagu nasional," tegasnya.

Sebelumnya, Rektor Universitas Pancasila Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU., menyambut baik terlaksananya penandatanganan MoU dengan MPR. Menurut Marsudi, saat ini Pancasila tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dalam hal demokrasi, Pancasila telah menyeleweng menjadi demokrasi NPWP (nomer piro wani Piro).

"Kita negara mayoritas muslim, kita senang disebut Pancasilais, tapi korupsinya tinggi. Kita negara religius, tetapi pencurian banyak terjadi di tempat ibadah. Kita cinta Pancasila, tapi banyak dosen tidak bertugas sebagaimana mestinya. Sementara mereka dari negara lain yang tidak berdasar Pancasila lebih aman. Dosen mengajar sesuai waktunya dan tidak terjadi korupsi besar-besaran. Ini adalah sebagian bukti bahwa Pancasila baru sebatas bahan hafalan, belum menjadi praktik keseharian dalam hidup bangsa Indonesia," kata Marsudi. □

DER



Sekretaris Jenderal MPR Terima Delegasi Sekretariat Parlemen Korea Selatan



PELAKSANA tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, SE, MM menerima kunjungan Park Tae-hyung Sekretaris Parlemen Korea Selatan dan delegasi. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Jakarta, Senin (01/4/2024).

Dalam pertemuan itu, Park Tae-hyung mengucapkan terima kasih atas penyambutan yang diberikan oleh Setjen MPR kepada rombongan delegasi yang dipimpinnya. Ia berharap, kunjungan tersebut bisa mempererat hubungan kedua negara,

terutama Sekretariat Jenderal Parlemen Indonesia dan Korea Selatan.

Untuk lebih mempererat kerjasama sekretariat parlemen kedua negara, Park Tae-hyung mengundang Plt. Sekretaris Jenderal MPR berkunjung ke Korsel. Park Tae-hyung menyatakan, dia akan sangat senang, jika undangan tersebut benar-benar bisa dipenuhi.

Kepada Siti Fauziah, Park Tae-hyung mengajukan sejumlah pertanyaan terkait sistem ketatanegaraan Indonesia. Antara lain, soal tugas dan kewenangan MPR, syarat amandemen konstitusi hingga

masalah pemakzulan Presiden. Park Tae-hyung juga bertanya menyangkut organisasi Setjen MPR yang saat ini dipimpin Siti Fauziah.

Terhadap undangan untuk kunjungan balasan, Siti Fauziah — yang akrab disapa Ibu Titi—mengatakan, akan mempertimbangkan matang-matang undangan tersebut. Karena, saat ini Setjen MPR tengah mempersiapkan berbagai agenda penting yang harus dilaksanakan dalam waktu dekat.

Menurut Ibu Titi, Setjen MPR sudah pernah menerima kunjungan delegasi Sekretariat Parlemen Korsel. “Saat itu mereka juga menyampaikan undangan kunjungan balasan, tetapi kunjungan balasan tersebut tak kunjung terlaksana,” ujarnya.

Menyangkut organisasi Setjen MPR, Ibu Titi menyampaikan bahwa Sekretariat Jenderal MPR terdiri dari Aparatur Sipil Negara. Untuk bisa menjadi ASN di Setjen MPR, seseorang harus mendaftar dan mengikuti tes masuk ASN, dan lulus tes masuk selanjutnya mereka ditempatkan di MPR. Saat ini jumlah ASN di lingkungan MPR sekitar 700 orang.

“Ini sedikit berbeda dengan Sekretariat Parlemen di Korsel. Di sana, pegawai sekretariat bisa berasal dari kalangan parlemen yang merekomendasikan sejumlah nama untuk diterima menjadi pegawai di Sekretariat Parlemen Korsel,” ungkap Siti Fauziah.

Sedangkan menyangkut tugas dan wewenang MPR, Ibu Titi menyampaikan bahwa MPR memiliki wewenang, antara lain: Mengubah dan menetapkan konstitusi, melantik presiden dan wakil presiden, memberikan keputusan terhadap usulan DPR untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden.

Sedangkan tugas MPR, lanjutnya Ibu Titi, adalah memasyarakatkan Empat Pilar MPR, menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga, terkait pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menyelenggarakan sidang dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas.

Pertemuan diakhiri dengan tukar-menukar cinderamata dan foto bersama. □



Pelantikan Empat Pejabat Tinggi Pratama Setjen MPR

Siti Fauziah : Junjung Tinggi Kejujuran dan Integritas



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PELAKSANA Tugas (Pit) Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, SE., MM., melantik dan mengambil sumpah/janji empat Pejabat Tinggi Pratama dan 14 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Sekretariat Jenderal MPR di Ruang Delegasi, Komplek Parlemen Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Keempat Pejabat Tinggi Pratama yang dilantik adalah Herry Putra, S.H., sebagai Kepala Biro Umum; Agus Subagyo, S.S., M.IR., sebagai Kepala Biro Sekretariat Pimpinan; Anies Mayangsari Muningsari, S.IP., ME., sebagai Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi; dan Wachid Nugroho, S.IP., M.IP., sebagai Kepala Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi.

Dalam sambutannya, Siti Fauziah mengungkapkan, pelantikan para kepala biro ini merupakan hasil seleksi terbuka yang cukup panjang, mulai dari seleksi

administrasi, tes kompetensi, pembuatan makalah, wawancara, penilaian rekam jejak,

melakukan medical check up, dan terakhir mendapatkan rekomendasi dari Komisi





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Aparatur Sipil Negara atas hasil seleksi yang dilakukan Panitia Seleksi.

“Dari laporan yang disampaikan Panitia Seleksi, seluruh calon memiliki kompetensi yang baik, dan seluruhnya layak menduduki jabatan sebagai Kepala Biro. Sayangnya jabatan yang tersedia jumlahnya terbatas, sehingga saya harus memilih masing-masing satu orang untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Biro dari sekian banyak calon yang baik-baik tersebut,” katanya.

Kepada Pejabat Tinggi Pratama dan 14 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilantik, Siti Fauziah menggarisbawahi agar senantiasa menjunjung tinggi kejujuran, integritas, profesionalitas, loyalitas, dan komitmen

terhadap kepercayaan, tugas dan tanggungjawab. “Sengaja saya menempatkan nilai kejujuran pada urutan pertama, diikuti oleh integritas, dan seterusnya, karena saya ingin mengajak untuk selalu menjunjung tinggi kejujuran sebagai nilai organisasi yang paling pertama dan utama,” tuturnya.

“Kejujuran adalah aspek moral kehidupan yang harus kita pegang teguh. Sikap jujur akan melahirkan kepercayaan, dan integritas muncul dari sebuah kejujuran ketika kita bekerja. Kejujuran dan integritas adalah dua hal yang sangat penting dan diperlukan. Bisa dikatakan keduanya adalah modal utama untuk meraih keberhasilan,” imbuhnya.

Siti Fauziah juga mengingatkan kepada

Empat Pejabat Tinggi Pratama yang dilantik untuk langsung siap bekerja mempersiapkan agenda dalam waktu dekat, yaitu agenda rangkaian sidang yang diselenggarakan tahun 2024 ini, yaitu Sidang Tahunan MPR, Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan, Sidang Paripurna MPR Pelantikan Anggota MPR periode 2024 – 2029, serta Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum 2024.

“Pada Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD pada 30 Mei 2024 yang lalu telah disepakati beberapa hal, antara lain, Rancangan Tata Tertib MPR yang telah disusun oleh Badan Pengkajian MPR perlu dilakukan penyesuaian terhadap wewenang dan tugas MPR dalam UU MD3, dan akan dibahas serta diambil persetujuan untuk ditetapkan dalam Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan,” jelas wanita yang akrab disapa Ibu Titi ini.

Siti Fauziah juga meminta kepada Empat Pejabat Tinggi Pratama yang dilantik untuk menyiapkan berbagai panduan sidang untuk persidangan dan rapat-rapat MPR, menyusun laporan kinerja MPR tahun 2023 – 2024, dan laporan kinerja MPR selama lima tahun masa keanggotaan, yaitu tahun 2019 – 2024.

Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Empat Pejabat Tinggi Pratama dan 14 PPPK di lingkungan Setjen MPR ini dihadiri Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Hentoro Cahyono, para Kepala Biro dan Inspektorat, Kabag di lingkungan Setjen MPR, serta undangan lainnya. □





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH, Anggota MPR Fraksi Partai Gerindra

Jumlah Kementerian Harus Mempertimbangkan Efisiensi dan Efektivitas

BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR. Persetujuan itu dicapai setelah mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI di Ruang Baleg, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 16 Mei 2024. Dalam rapat pleno itu, delapan fraksi di Baleg DPR RI menyatakan setuju, dan satu fraksi, yakni Fraksi PKS menyatakan setuju dengan catatan.

Materi muatan revisi UU Kementerian Negara yang diputuskan secara musyawarah mufakat, yaitu (1). Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara mengenai pengangkatan wakil menteri dihapus; (2). Perubahan Pasal 15 UU Kementerian Negara mengenai jumlah Kementerian paling banyak 34, menjadi “ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memerhatikan efektivitas penyelenggaraan

pemerintahan,” dan (3). Penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan undang-undang di Ketentuan Penutup.

Sebelumnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 menyatakan, Pasal 10 dalam UU Kementerian Negara mengenai pengangkatan wakil menteri dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sebelumnya penjelasan Pasal 10 dalam UU Kementerian Negara menyebutkan, “Yang dimaksud dengan Wakil Menteri adalah pejabat karier dan bukan anggota kabinet.” Dengan dihapusnya Pasal 19 maka Wakil Menteri juga dapat dianggap sebagai anggota kabinet, sesuai putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011.

Dalam penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Kementerian Negara, Tim Ahli Baleg DPR menyampaikan muatan materi usulan agar Pasal 10 tersebut dihapus agar sesuai dengan ketentuan MK. Tim Ahli juga memasukkan usulan agar Pasal 15 tentang jumlah kementerian pun

direvisi. Namun, di sisi lain, banyak kalangan yang mempertanyakan “timing” revisi UU Kementerian Negara yang bergulir di Baleg DPR RI saat ini bersamaan dengan wacana penambahan jumlah Kementerian menjadi 40 pada pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang Revisi UU Kementerian Negara ini, berikut penuturan anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Dr. Supratman Andi Agtas, SH., MH., yang juga Ketua Baleg DPR RI. Kutipannya.

Baleg DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sebanyak delapan fraksi setuju dan satu fraksi, yaitu Fraksi PKS setuju dengan catatan. Bisa dijelaskan lebih lanjut?

Kita (Baleg DPR RI) sudah mengambil

keputusan dalam rapat pleno Baleg, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR RI. Jadi, revisi UU Kementerian Negara sudah diputuskan di Baleg untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR. Kami bersyukur semua fraksi setuju dengan RUU ini dengan berbagai macam catatan yang ada. Pada dasarnya, semua menghargai perubahan UU ini dalam rangka memperkuat sistem presidensial. Siapa pun presidennya, terkait dengan angka baik jumlah Kementerian maupun nomenklatur Kementerian, tidak boleh dikunci.

Setelah disetujui di Baleg, segera kami akan serahkan ke Pimpinan DPR untuk diajukan dalam sidang paripurna supaya menjadi draf RUU resmi usulan DPR. Setelah itu, nanti Pimpinan DPR akan mengirim draf RUU ini ke presiden atau pemerintah. Kita berharap, siapapun yang ditunjuk oleh Presiden bisa melakukan pembahasan RUU ini lebih mendalam dalam pembicaraan tingkat I yang akan datang.

Apa inti revisi dari UU Kementerian Negara ini? Apakah menyangkut jumlah dan nomenklatur Kementerian?

Pembahasan RUU Kementerian Negara ini salah satu fokusnya adalah menghapus atau menghilangkan angka 34 jumlah kementerian. Dalam sistem presidensial, kita serahkan kepada presiden untuk menentukan jumlah kementerian yang dibutuhkan. Dengan menghapus ketentuan 34 jumlah kementerian, bisa diartikan jumlahnya bisa berkurang dan boleh bertambah, juga boleh tetap. Jadi, kita tidak mengunci (jumlah dan nomenklatur Kementerian). Itu inti dari sistem presidensial yang kita anut. Meskipun demikian, kita memberi penegasan bahwa jumlah kementerian itu tetap harus memerhatikan dari sisi efisiensi dan efektivitas.

Pembahasan RUU Kementerian Negara ini seiring dengan wacana penambahan jumlah Kementerian dari 34 kementerian menjadi 40 kementerian pada pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana tanggapan Bapak?

Itu hanya soal *timing* saja. Sebab, kami di Badan Legislasi sudah menginventarisir semua UU yang terkait dengan putusan

Mahkamah Konstitusi (MK). Di antara UU yang saat ini sedang dibahas di Baleg, yaitu UU Keimigrasian dan UU Kementerian Negara. Jadi, soal revisi UU Kementerian Negara ini hanya kebetulan saja bersamaan dengan adanya wacana belakangan ini terkait dengan perubahan jumlah dan nomenklatur Kementerian menjadi 40 kementerian. Itu hanya soal kebetulan saja.

Perubahan UU Kementerian ini terkait dengan putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011. Revisi UU Kementerian untuk menyesuaikan dengan putusan MK tersebut. Padahal MK memutuskan judicial review UU Kementerian Negara ini pada tahun 2011. Mengapa Baleg DPR RI baru membahas revisi UU Kement



terian Negara sekarang ini (lebih dari 13 tahun setelah MK mengeluarkan putusan)?

Persoalannya, UU yang diputuskan oleh MK baik UU yang dibatalkan atau lainnya, banyak sekali. Kami diberi daftar UU (yang diputuskan MK), dan kami menugaskan kepada Badan Keahlian untuk mengkaji daftar UU itu. Tenaga Ahli kami tugaskan untuk melihat dan mengkaji daftar UU (yang diputuskan MK) itu. Salah satunya adalah UU Kementerian Negara.

Jadi, revisi UU Kementerian Negara ini hanya kebetulan saja bersamaan dengan wacana penambahan jumlah Kementerian menjadi 40 kementerian?

Iya kebetulan saja menyangkut soal

bersamaan dengan wacana itu. Tapi, yang jelas, semua UU yang merupakan putusan judicial review di MK, maka Badan Legislatif sesegera mungkin untuk menindaklanjutinya supaya UU itu bisa menyesuaikan dengan putusan MK.

Apakah revisi UU Kementerian Negara ini menjadi prioritas segera cepat diselesaikan mengingat UU ini akan digunakan untuk pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka?

Kalau kita di DPR tentu ingin mempercepat penyelesaian pembahasan RUU ini. Tetapi kita juga tergantung pada pemerintah. Setelah dari Badan Legislasi, RUU ini kita bawa ke sidang paripurna, lalu kita kirimkan draf RUU Kementerian Negara ini ke pemerintah. Apakah presiden setuju atau tidak tergantung pada presiden dan pemerintah. Presiden kita hari ini masih Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi setuju dengan draf yang kita kirimkan, umpamanya menyangkut soal jumlah Kementerian, pembahasan bisa dipercepat. Tetapi kita serahkan semuanya kepada presiden atau pemerintah.

Apakah jumlah dan nomenklatur Kementerian nanti juga akan dibahas? Bukankah penambahan jumlah Kementerian membawa pengaruh pada anggaran pemerintah?

Saya kira pasti nanti akan dibahas karena ini baru usulan RUU inisiatif dari DPR. Nanti kita bahas dengan pemerintah. Kita menunggu. Nanti Presiden bisa mengirimkan Surpres-nya, dan wakil pemerintah yang ditunjuk untuk membahas RUU Kementerian Negara ini. Kita juga akan melihat sikap-sikap dalam pembahasan nanti. Fraksi-fraksi akan tetap memberikan pendapat dan pandangan.

Tetapi saya meliha bahwa poin penting dalam revisi UU Kemententerian Negara ini bukan pada soal jumlah dan nomenklatur kementerian, tetapi menyangkut soal efisiensi dan efektivitas sebuah pemerintahan sehingga kabinet yang akan datang bisa berjalan. Kita berharap dan saya yakin, pada prinsipnya, siapa pun pemerintahnya, termasuk presiden terpilih, tentu akan mempertimbangkan berbagai macam aspek dan menyesuaikan dengan visi misi presiden terpilih. □

Debut Pertama Sebagai Produser Film

Pahlawan Bangsa



Maudy Ayunda

SELEBRITAS Indonesia Ayunda Faza Maudya atau biasa disapa **Maudy Ayunda** memang termasuk artis serba bisa. Berbagai predikat kerja seni dan film disandangnya, seperti artis film, model, penyanyi, penulis lagu, penulis naskah, dan lainnya. Kini, perempuan kelahiran Jakarta, 19 Desember 1994, ini mulai merambah profesi sebagai Produser Film.

Sebagai produser film, debut perdananya, menggarap film yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terutama di bidang pendidikan. Tak main-main, sebuah film biopic (gabungan biografi dan gambar) berjudul 'Ki Hadjar Dewantara.' Dan, di film ini, Maudy hanya mengambil peran sebagai produser.

Film ini diinisiasi oleh rumah produksi sinema Wahana Kreator bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berperan sebagai sutradara Gina S. Noer. Rencananya, film ini akan rampung dan tayang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, tahun 2026 mendatang. □

DER



Salting Ketemu Fadel Muhammad

DI KALANGAN seigram, putera kelahiran Gorontalo, 2007, ini dikenal dengan nama **Fajar Sadboy**. Fajar Labatjo, nama lahirnya, menjadi viral karena unggahan di Tiktok yang tampil dengan ekspresi sedih.

Beda dengan dunia maya, di dunia nyata tak ada ekspresi sedih itu, yang ada salah tingkah. Itulah yang terjadi ketika Fajar bertemu dan bersalaman dengan tokoh nasional asal Gorontalo, Fadel Muhammad, dan istrinya, Hana Hasanah, di Bandung, Jawa Barat, baru-baru ini.

Saat itu berlangsung acara halalbihalal warga Gorontalo yang dihadiri Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dan istri, Hana Hasanah. Begitu Fajar Sadboy hadir, dan mendapat giliran bersalaman dengan Fadel. Ketika bersalaman, mantan Gubernur Gorontalo dua periode itu langsung nyeletuk: "Loh, ini seperti yang ada di tv. Ini yang suka sedih-sedih itu ya."

Mendengar seloroh Fadel itu, dia jadi salah tingkah. "Ya Bapak, saya mau minta maaf lahir batin," ujar Fajar seraya menunduk dan mencium tangan Fadel Muhammad.

Ketika ditanya, kenapa begitu gugup bertemu Pak Fadel, dia pun menjawab singkat: "Aduh...ya guguplah, beliau kan tokoh daerah kita," katanya usai acara. □

DER



Fajar 'Sad Boy'



Charissa dan Hanindya

Dua Anak Indonesia Sabet Juara di Olimpiade Matematika

MEMBANGGAKAN. Dua siswi sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) Indonesia berhasil meraih gelar juara diajang Olimpiade Matematika. Pertama, **Charissa Devina Aurelia**, siswi kelas VIII SMP Warga Surakarta, Jawa Tengah, berhasil meraih juara I Olimpiade Siswa Indonesia kategori Matematika. "Puji Tuhan, usaha saya ternyata tidak mengkhianati hasil. Saya berhasil memenangkan olimpiade kali ini," kata Devina.

Tak kalah kerennya prestasi yang diraih **Hanindya Laily Azzahra**. Di ajang Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) 2024 di Chao Prhaya Grand Hall, Bangkok World (26-28 April 2024), siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Pati ini berhasil meraih juara kedua, Perak.

Pengumuman pemenang dilaksanakan Ahad (28/4/2024) di Bangkok World. Ini bukan hanya menjadi momen kebanggaan bagi peserta, tetapi juga kebanggaan bagi seluruh warga Kabupaten Pati khususnya dan Indonesia pada keseluruhan. "Saya bahagia bisa membanggakan orangtua, sekolah, dan negara saya," ujar Hanindya. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Benteng Fort Rotterdam Dulu Mengerikan Kini Menyenangkan

SORE hari di Benteng Fort Rotterdam Makassar tak ubahnya seperti berada di taman rumput nan indah lagi mempesona. Di tempat itu, rumput menghijau tumbuh dengan subur dan terawat. Membentang, membentuk permadani nan tebal dan mengisi ruang-ruang kosong di setiap jengkal taman di Benteng Fort Rotterdam.

Pemandangan tersebut akan terlihat semakin indah saat matahari semakin mendekati peraduan di ufuk barat. Pohon cemara yang sebelumnya sempat lesu terkena teriknya sinar matahari, seketika tampak segar kembali. Tanaman ini tampak tegak bertenaga, melayang-layang, bergerak mengikuti arah angin sore yang berhembus sepoi. Demikian pula tanaman perdu yang tumbuh berkelompok dengan pohon sejenisnya.

Setiap menit waktu berlalu, sengatan matahari yang sebelumnya membakar area benteng, pelan tapi pasti, akan terus berkurang sengatannya. Dan, itu berarti, suhu di dalam benteng akan terus turun, hanya menyisakan buaian kehangatan. Saat



seperti ini, menjadi waktu yang sangat nyaman untuk menikmati suasana Benteng Fort Rotterdam

Tampak oleh kami puluhan mahasiswa tengah berasyik-masyuk bersama keluarganya. Mereka adalah mahasiswa yang baru diwisuda oleh almatemnya. Mereka memanfaatkan waktu yang senggangnya mengunjungi lokasi benteng yang memang

ramah bagi semua usia. Senyum mereka mengembang, cantik seindah sinar matahari sore.

Itulah kehangatan yang dirasakan *Majelis* ketika berkesempatan melewati suatu sore di Benteng Fort Rotterdam di awal Mei lalu. Sore itu, Benteng Fort Rotterdam terasa sangat tenang. Semakin senja, tiupan angin terasa semakin kuat. Mampu menggerakkan pepohonan yang tumbuh di tempat tersebut, dan membuatnya seolah menari-nari. Pemandangan tersebut menjadi pemanis tersendiri, dari suasana benteng yang terkesan sangat angkuh.

Tak cukup itu saja, kecantikan yang ditawarkan Benteng Fort Rotterdam. Beberapa muda-mudi yang tengah memadu kasih membuat suasana Fort Rotterdam semakin romantis. Sebagaimana layaknya sepasang kekasih, mereka saling berpegangan, seakan tak mau terpisahkan.

Pangeran Diponegoro

Benteng Fort Rotterdam tidak lagi menjadi tempat yang mengerikan seperti yang pernah tertulis dalam sejarah. Sebaliknya, saat ini,



Fort Rotterdam sudah menjadi destinasi pariwisata sejarah yang diminati masyarakat. Posisinya yang berada di tengah Kota Makassar, membuat Fort Rotterdam menjadi tujuan wisata favorit, termasuk pelancong dari luar Sulawesi. Apalagi, lokasinya sangat strategis, dekat dengan beberapa tempat wisata lainnya.

Benteng Fort Rotterdam merupakan peninggalan Kerajaan Gowa-Tallo. Masyarakat setempat, memiliki nama lain untuk menyebut Fort Rotterdam. Yaitu, Benteng Jumpandang, Benteng Ujung Pandang atau Benteng Panyyu.

Benteng ini terletak di pinggir pantai sebelah barat Kota Makassar. Tepatnya Jl. Ujung Pandang, Bulu Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Fort Rotterdam pertama dibangun tahun 1545 oleh Raja Gowa ke-9 yang bernama Daeng Matanre Karaeng Tumapa'risi' Kallonna.

Benteng Jumpandang menyimpan jejak sejarah Kota Makassar sejak zaman Kerajaan Gowa-Tallo, pendudukan VOC, hingga kini. Benteng Jumpandang dibangun sebagai salah satu rangkaian benteng pertahanan di sepanjang pesisir pantai barat Kerajaan Gowa.

Meski begitu kolonialis Belanda mampu menaklukkan Kerajaan Gowa-Tallo lewat Perang Makassar. Sejak dikuasai Belanda,



benteng ini diberi nama Fort Rotterdam yang diambil dari nama kota kelahiran pimpinan VOC yang berhasil menaklukkan Kerajaan Gowa-Tallo, yaitu Cornelis J. Speelman.

Benteng Fort Rotterdam terdiri dari 16 bangunan, yang kesemuanya bertingkat. Benteng ini memiliki dua pintu. Terdiri dari pintu gerbang utama di sebelah barat benteng, terbuat dari kayu. Sementara pintu gerbang kedua, berupa pintu kecil yang terdapat di sebelah timur bangunan.

Benteng Fort Rotterdam berada di areal lahan seluas 2,5 hektar dengan luas bangunan 11.605,85 meter persegi. Awalnya, Kerajaan Gowa-Tallo menggunakan Benteng Jumpandang sebagai basis pertahanan di sepanjang pantai barat Makassar. Lokasinya yang berada di dekat pantai memudahkan pengawasan adanya kedatangan musuh Kerajaan Gowa-Tallo dari arah perairan.

Pada masa pemerintahan Sultan

Hasanuddin, benteng ini menjadi pusat persiapan perang dalam menghadapi gempuran dari tentara Belanda. Setelah diambil alih oleh pemerintahan kolonial Belanda, benteng ini berfungsi sebagai markas komando pertahanan, pusat perdagangan, dan pusat pemerintahan pemukiman pejabat-pejabat Belanda. Sebagian benteng ini juga difungsikan sebagai penjara atau rumah tahanan bagi orang-orang yang menentang Belanda. Salah seorang pahlawan Indonesia yang ditahan di sini adalah Pangeran Diponegoro.

Fort Rotterdam cocok bagi semua kalangan wisatawan. Apalagi, pengunjung bisa masuk ke lokasi ini secara cuma-cuma, kecuali jika mereka ingin mengunjungi museum yang terdapat dalam benteng. Itupun harganya sangat terjangkau, sekitar Rp. 5000- Rp. 10000,-. □

MBO

Hj. Anna Ruswan Latuconsina, SH.,SI.Kom.

Senator Berdarah Biru Mengabdikan Untuk Rakyat



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SEJAK usia belia, Anna Latuconsina sudah mengenal dunia politik, pelayanan publik, dan organisasi. Karena, memang, pemilik nama lengkap Anna Ruswan Latuconsina yang akrab disapa Ibu Anna, ini dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang biasa berkiprah dalam persoalan politik, birokrasi, organisasi, kemasyarakatan, pendidikan, dan pariwisata di Maluku.

Bagaimana tidak, ayahandanya, H. Roestam Hafiedz, lahir di Tenggara, Kalimantan Timur, 27 September 1930, adalah seorang birokrat, tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Maluku. Setelah 26 tahun berkarier di Maluku (1950-1976), H. Roestam pindah tugas ke Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Di daerah kelahirannya itu, dalam kurun waktu 1984 hingga 1990, H. Roestam pernah menjabat Kadis Bangdes, Asisten I, dan Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwil) Provinsi Kalimantan Timur, dan setelah itu purna tugas. Sedangkan sang ibundanya, Hj. Sien Ely, adalah seorang aktivis yang aktif di eranya.

Jadi, benar apa kata peribahasa: 'buah jatuh tak jauh dari pohonnya.' Begitulah Anna Latuconsina. Tak mengherankan kalau Ibu Anna kemudian memilih berkecimpung di organisasi dan politik sebagaimana pernah dilakukan oleh kedua orangtuanya.

"Memang dunia politik dan organisasi bukanlah hal baru bagi beta. Jauh sebelum mencalonkan diri sebagai calon wakil rakyat, baik di DPRD atau DPD RI, beta sudah berada dalam keluarga yang biasa berkiprah dengan persoalan politik, birokrasi, organisasi,

kemasyarakatan, pendidikan dan pariwisata di Maluku," cerita Ibu Anna yang kini anggota DPD RI dari Provinsi Maluku.

Apalagi setelah menikah dengan Ruswan Latuconsina, politisi senior Partai Golkar, aktivitas Ibu Anna semakin bertambah. Aktivitasnya fokus pada kegiatan sosial, pariwisata daerah, pemberdayaan perempuan, serta kesehatan ibu dan anak. Waktu itu, Ibu Anna menjabat sebagai Ketua P2TPA (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak) Provinsi Maluku, dan Ketua Village Development Foundation (VIDEF) Provinsi Maluku. Sementara suaminya, Ruswan Latuconsina, menjabat Ketua DPD Golkar Maluku dan Ketua DPRD Provinsi Maluku selama tiga periode, sejak 1982 hingga tahun 1997 (menjelang era reformasi).

Jadi, dua elemen pelayanan publik dan organisasinya itulah memantapkan Ibu Anna untuk terus berkiprah di jalur politik dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan di bidang pariwisata, misalnya, dijalaninya jauh sebelum terjun menjadi politisi atau senator. Ibu Anna dikenal sangat pintar mendeteksi beberapa lokasi di daerah yang berpotensi bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata, terutama dalam hal keindahan daerah pesisir laut atau pantai dan pulau.

"Waktu itu, sejak akhir tahun 1990-an, beta dan tim sudah survei beberapa lokasi dan pulau eksotik di Maluku Utara (kalah itu masih salah satu kabupaten di Provinsi Maluku). Namun, tahun 1999 terjadi pemekaran, Maluku Utara menjadi provinsi tersendiri, maka rencana



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

mendirikan destinasi wisata pantai dialihkan ke Maluku,” ungkap Ibu Anna, yang masih saudara kandung dengan Ridho Hafieds, musisi dan anggota band ‘Slank’ ini.

Waktu itu, menurut cerita Ibu Anna, dia memilih dua lokasi, untuk berinvestasi sekaligus memajukan pariwisata di Maluku, yaitu di Pulau Ambon dan Pulau Seram. Kedua lokasi itu adalah Baguala Beach Resort di kawasan Waitatiri Negeri Suli, dan Ora Beach Resort di Desa Saleman, Seram Utara, Maluku Tengah.

Terakhir, Ibu Anna juga membuka destinasi wisata baru, lokasinya masih di Pulau Ambon. Yaitu Ume Ata Resort di Tial, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Tapi, Ora Beach Resort di Seram Utara-lah yang fenomenal, bukan saja dikenal di dalam negeri namun juga populer hingga ke luar negeri, dan menjadi salah satu destinasi wisata favorit wisatawan manca negara. Bahkan, Ora Beach Resort sempat dikategorikan sebagai salah satu resort pantai terindah di dunia.

“Beta bangun Ora Beach Resort dengan biaya sendiri. Investasinya sesuai dengan kemampuan saja. Beta tidak berani

gunakan investasi besar, misalnya pinjam dana dari bank. Namun demikian, hasilnya Ora Beach diakui secara nasional dan internasional,” ujar Ibu Anna.

Terjun ke Politik

Karier politik Ibu Anna mulai menggeliat saat bergabung di Himpunan Wanita Karya (HWK) Provinsi Maluku, salah satu sayap Partai Golongan Karya (Golkar), dan dia menjabat Ketua II HWK Provinsi Maluku (1992-1997). Lalu, menjabat Ketua PP Kesatuan Perempuan Partai Golkar (2005-2010), Ketua Pokja Pariwisata DPP Partai Golkar (2005-2010), Pengurus Bidang Kerohanian DPP Partai Golkar (2009-2014), dan Anggota Dewan Penasihat SOKSI (2009-2014)

Ibu Anna untuk pertama kali menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku, tapi hanya berlangsung 1997 sampai 1999. Lalu, pada Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2009, Ibu Anna tercatat sebagai calon anggota DPD RI mewakili Provinsi Maluku. Ternyata dia berhasil memperoleh kepercayaan rakyat, menjadi anggota DPD RI dan sekaligus anggota



MPR RI periode 2009-2014. Dan, pada Pileg 2014, dia kembali terpilih menjadi anggota DPD dapil Maluku periode 2014-2019, dengan meraih 108.876 suara. Dan, terpilih untuk ketiga kalinya menjadi anggota DPD RI pada Pemilu 2019 (periode 2019-2024) dengan memperoleh 119.091 suara.

Sebagai anggota DPD dari Maluku, Ibu Anna dikenal sangat memerhatikan rakyat yang ada di dapilnya. Salah satunya, saat wilayah Maluku terpapar cuaca ekstrim pada tahun 2021 lalu. Pada saat cuaca ekstrim itu, hasil tangkapan nelayan pasti menurun, dan bahkan ada nelayan yang tidak melaut sehingga mengakibatkan hilangnya penghasilan harian.

Untuk menghadapi dampak cuaca ekstrim pada nelayan itu, Ibu Anna mengusulkan agar diadakan pelatihan yang baik bagi nelayan, seperti pelatihan pemanfaatan hasil tangkap bagi nelayan. “Saya minta untuk mencatat semua nama nelayan di sini untuk diberikan pelatihan di balai perikanan agar kemampuan mereka tidak stagnan,” katanya, waktu itu.

Begitu pula saat pandemi melanda Indonesia, Ibu Anna juga sangat menaruh perhatian kepada warga masyarakat di daerah yang terdampak. Dia mendukung dan mendorong berbagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi berlangsung. Salah satunya mendorong program padat karya yang diinisiasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Program padat karya ini dilaksanakan untuk menanggulangi permasalahan ekonomi yang melanda masyarakat Kota Ambon, karena terdampak wabah Virus Corona.

Lalu, sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) dari Kelompok DPD RI, Anna Latuconsina ditempatkan di Badan Pengkajian MPR RI. Kiprahnya di MPR juga tak bisa dinilai kecil, terutama dalam menjalankan dan menyukseskan program-program MPR RI, seperti melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu contoh kegiatan Anna Latuconsina sebagai anggota MPR RI adalah menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR di Maluku Tengah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh MPR bekerjasama



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dengan SMA 47 Maluku Tengah. Kegiatan yang berlangsung Maret 2024 itu diikuti

100 orang pelajar dan 50 dewan guru. Dalam acara itu, Ibu Anna membawakan materi pemahaman Empat Pilar kepada para pelajar dan guru. Di akhir kegiatan, Ibu Anna memberikan bantuan berupa beasiswa kepada beberapa siswa, juga sertifikat dan notebook.

“Pada intinya, beta mengabdikan, berjuang untuk daerah, juga secara luas untuk bangsa dan negara. Keterpanggilan ini saya rasakan, saya laksanakan, dan saya bahagia untuk itu. Mudah-mudahan kiprah beta ini bermanfaat untuk masyarakat,” tandasnya

Miliki Darah Bangsawan

Suatu hal yang juga perlu diketahui dari perempuan politisi yang sangat luwes berkiprah di dunia politik ini bahwa dia bukan perempuan dari kalangan biasa. Anggota DPD RI dari Maluku ini keturunan bangsawan, alias berdarah biru. Adalah Sien Ely, ibunda Anna Latuconsina, seorang nona Ambon, Puteri Raja Negeri Asilulu,



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

di Pulau Ambon. Sementara sang ayahnya juga punya hubungan dekat dengan Kesultanan Kutai Kartanegara ke-19. Sebab ibunda sang ayah (nenek Anna Latuconsina) adalah adik dari Adji Ratu Purboningrat, Permaisuri Sultan Aji Muhammad Parikesit, Sultan terakhir Kesultanan Kutai Kartanegara.

Ibu lima orang anak, yaitu Sonya Rosalany, Alvin Muhammad Sajid, Radinal Rachman, Samsul Arifin, dan Alyssa Chalida ini, lahir dan tumbuh serta dibesarkan memang dari keluarga pelayan publik, politik dan organisatoris. Sinergitas didikan yang luar biasa diperoleh dari ayah dan ibunya yang kemudian membuat karakteristik dan jiwanya begitu kuat.

Ibu Anna lahir di Ambon, Maluku, 15 Februari 1956. Pendidikan dasar hingga menengah atas diselesaikan di tanah kelahirannya, Ambon. Sedangkan Pendidikan Tingginya di tempuh di Jakarta.

"Masa kecil saya kebanyakan di desa kelahiran saya. Memang dari dulu saya ingin seperti orang tua saya, banyak berkisah untuk kepentingan rakyat banyak. Itulah yang membuat beta aktif berkecimpung untuk masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan dan pariwisata," katanya.

Untuk mewujudkan keinginannya itu, Ibu Anna terjun dalam

kegiatan organisasi kemasyarakatan. Dia aktif di pengurus PKK Provinsi Maluku (1977-1992), terus menjadi Ketua DPD Al-Hidayah Provinsi Maluku (1987-1997), Pengurus ASITA Provinsi Maluku (1992-1997), Sekretaris Jenderal DPP Al-Hidayah (1997-2010), dan Ketua Yayasan Jantung Hati Maluku (2003-2018). □

DER

Biodata

Nama Lengkap : **Hj. Anna Latuconsina, SH, SI.Kom.**
 Agama : Islam
 Tempat/Tgl Lahir : Maluku, 15 Februari 1956
 Suami : Ruswan Latuconsina

Pendidikan

- SD Katolik Bintang laut (1963-1969)
- SMP Katolik Cor Yesu (1969-1971)
- SMA Xaverius Ambon (1971-1974)
- Universitas Bung Karno (2011-2015)

Organisasi

- Pengurus PKK Provinsi Maluku (1977-1992)
- Ketua DPD Al-Hidayah Provinsi Maluku (1987-1997)
- Pengurus ASITA Provinsi Maluku (1992-1997)
- Ketua II Himpunan Wanita Karya Provinsi Maluku (1992-1997)
- Sekretaris Jenderal DPP Al-Hidayah (1997-2010)
- Ketua Yayasan Jantonghati (2003-2018)
- Ketua PP Kesatuan Perempuan Partai Golkar (2005-2010)
- Ketua Pokja Pariwisata DPP Partai Golongan Karya (2005-2010)
- Pengurus Bidang kerohanian DPP Partai Golongan Karya (2009-2014)
- Anggota Dewan Penasehat SOKSI (2009-2014)

Karier

- Area Representatif National Travel Beuro Maluku (1989-1999)
- Direktur Maluku Wisata Marine (1992-1999)
- Direktur Radio Pesona FM (1993-1999)
- Anggota DPRD Provinsi Maluku (1997-1999)
- Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Maluku (2007-2013)
- Anggota DPD RI (2009-2019)
- Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Maluku (2017-2020)



Merawat Demokrasi Pasca Pemilu

SATU-SATUNYA cara untuk merawat konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan adalah dengan menempatkan demokrasi sebagai *the only game in town*, model yang disepakati bersama. Kredo politik yang digariskan oleh Juan J. Linz, profesor emeritus ilmu sosial dan ilmu politik dari Yale University Amerika Serikat tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam merawat demokrasi Indonesia pasca Pemilu 2024.

Betul bahwa perhelatan Pilpres dan Pileg 2024 sudah usai. Betul bahwa pemenang Pilpres dan wakil rakyat sudah ditetapkan oleh KPU. Namun Pemilu dalam sejarah Indonesia selalu menyisakan residu politik negatif apabila diposisikan oleh para pihak yang berkontestasi sebagai sekedar pertarungan untuk merebut kekuasaan (*pursuing power*), bukan diletakkan dalam kerangka demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi dan daulat rakyat (*people sovereignty*).

Kita perlu melihat kembali gelaran Pemilu 2014, satu dekade yang silam. Kontestasi yang tajam di antara dua pasangan di Pilpres berdampak pada polarisasi sosial di masyarakat. Polarisasi sosial ini tidak langsung selesai begitu saja ketika pemenang sudah diumumkan, tapi masih mengendap sebagai residu politik yang tetap terbawa pada gelaran Pemilu selanjutnya, Pilpres 2019.

Dampak negatifnya sungguh banyak. Kohesi sosial

masyarakat melemah akibat perbedaan pilihan politik. Kemajemukan menyempit menjadi pengerucutan sosial berbasis identitas. Ruang maya menjadi pengap oleh hoaks dan ujaran kebencian. Situasi yang lebih kompleks berhasil dihindarkan ketika pandemi Covid-19 melanda pada awal 2020. Semacam *blessing in disguise*, berkah di balik musibah. Rakyat dan elit Indonesia seakan menemukan momentum untuk bersatu kembali, melupakan sekat-sekat perbedaan politik pasca Pemilu.

Peluang dan Tantangan

Pemilu 2024 sejatinya memberikan banyak peluang bagi penguatan demokratisasi di Indonesia. Pertama, dari sisi sistem dan rezim Pemilu yang bersifat serentak antara Pilpres dan Pileg. Rezim keserentakan ini menjadi tantangan bagi partai politik untuk menguji kekuatan party id mereka secara sosial politik di masyarakat, menakar linieritas antara visi misi yang diusung pada Pilpres dan Pileg di semua level. Partai politik yang cakap dalam situasi ini tentu akan mendapatkan *coattail effect* yang optimal sebagai dampak positif dari rezim keserentakan Pemilu ini.

Kedua, dari sisi Pilpres. Muncul tiga pasangan calon sehingga polarisasi sosial yang tajam seperti Pilpres 2014 dan 2019 berhasil dihindarkan. Sikap politik PKB, Nasdem, dan PKS, yang merupakan tiga partai yang lahir dari rahim reformasi perlu diapresiasi karena berani mengusung Anies-Muhaimin sebagai alternatif pilihan bagi

Oleh:
Dr. K.H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A.
Wakil Ketua MPR RI



masyarakat.

Ketiga, dalam konteks Pileg. Besarnya jumlah pemilih muda pada DPT Pemilu cukup responsif disikapi oleh partai politik dengan mengusung caleg-caleg muda untuk menangkap aspirasi dan kebutuhan pemilih dari generasi milenial dan z. Artinya, ada 2 kepekaan sosial politik yang kuat dari partai politik peserta Pemilu dalam melihat dinamika yang berkembang di masyarakat.

Selain peluang, tantangan juga selalu hadir dalam dinamika sosial politik bernegara. Dan, tantangan ini memiliki magnitudo paling besar pasca Pemilu digelar. Pertama, ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan Pemilu berpotensi memengaruhi soliditas persatuan dan kesatuan bangsa, baik di level akar rumput maupun elit.

Kedua, proses pergantian kekuasaan pada periode pasca Pemilu menuju pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih berpotensi menciptakan kondisi “bebek lumpuh” yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi program-program kerja yang sudah dicanangkan.

Ketiga, arah sentripetal (mendekat) dan sentrifugal (menjauh) partai politik terhadap pemenang Pemilu akan berdampak pada soliditas pembangunan lima tahun ke depan, model checks and balances, serta potensi pencapaian visi-misi yang sudah dicanangkan.

Ketiga potensi tantangan ini sejatinya sudah terlihat. Di banyak media, sudah hiruk pikuk narasi tentang siapa yang akan berkoalisi

dan beroposisi, revisi terhadap beberapa undang-undang politik, serta proyeksi-proyeksi tentang power politics pada struktur politik pemerintahan pada kabinet selanjutnya.

The only game in town

Berbagai peluang yang hadir pada Pemilu lalu perlu dikelola dan diperkuat lebih lanjut untuk menebalkan kerangka demokrasi Indonesia. Yang paling krusial tentu saja adalah persoalan bagaimana para pihak, baik elit maupun masyarakat menyikapi tantangan-tantangan ke depan pasca Pemilu. Apapun tantangan yang ada, sebaiknya semua diletakkan dalam kerangka demokrasi yang mengindahkan daulat rakyat, menjunjung tinggi hak politik dan kebebasan sipil warga negara, serta tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan efisien.

Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini perlu dikawal agar bisa menyelesaikan janji-janjinya kepada rakyat sebelum berakhir. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga selainya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar program-program yang diusung pada kampanye bisa berjalan cepat dan tepat pasca dilantik. Kita hargai mereka yang hendak berkoalisi, sebagaimana kita menghargai mereka yang berada di barisan oposisi. Semuanya memiliki derajat dan level yang sama selama semuanya menyepakati bahwa demokrasi adalah the only game in town dengan menjunjung setinggi-tingginya kemaslahatan rakyat. □

Buku Penataan Wewenang dan Tugas MPR

Sumbang **Pikiran** dari Akademisi Kalimantan Timur

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (FH Unmul) bekerjasama dengan MPR menerbitkan hasil kajian berupa buku terkait dengan penataan wewenang dan tugas MPR. Kajian yang dibukukan tersebut untuk memberikan masukan dalam proses ketatanegaraan yang obyektif dan terukur.

SEBAGAI perguruan tinggi yang sangat populer di Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman (Unmul) telah berkontribusi berupa gagasan terkait proses ketatanegaraan di Indonesia. Untuk itu, kampus yang berdiri pada tahun 1962 di Samarinda, bekerja sama dengan Badan Pengkajian MPR, melakukan kajian akademik dengan bahasan: *Penataan Wewenang dan Tugas MPR*. Hasil kerjasama MPR dan Unmul tersebut selanjutnya dibukukan dengan judul yang sama, yaitu: 'Penataan Wewenang dan Tugas MPR.'

Buku setebal xiv + 192 halaman itu terbagi dalam enam bab. Di halaman ix, Ketua Badan Pengkajian MPR, Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S., mengatakan, untuk menghasilkan kajian yang mendalam tentang penataan kewenangan MPR perlu menghimpun dan memberikan ruang pemikiran, serta gagasan akademis dari para pakar, penyelenggara negara, dan praktisi dalam bidang tertentu untuk merumuskan materi kajian tentang penataan kewenangan MPR yang memungkinkan, khususnya dalam rangka penguatan MPR sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan tertinggi dalam mengubah, menetapkan, menafsirkan undang-undang dasar, dan memberikan arah kebijakan kepada lembaga-lembaga negara lainnya.

Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, buku yang diterbitkan tahun 2020 menempatkan kegiatan kajian akademik merupakan salah satu metode untuk mendapatkan bahan masukan berupa hasil yang obyektif dan terukur yang dibuat oleh para akademisi secara ilmiah, sesuai dengan bidang keilmuan. Hasil dari kajian akan dipergunakan sebagai referensi bagi MPR dalam menentukan rumusan yang ideal dalam hal penataan kerwenangan MPR.

Dalam bab-bab yang ada, pembaca disajikan teori dan pemikiran yang runut dari para pakar (penulis). Ada latar belakang, pokok permasalahan, metodologi, dan kajian teoritis serta dipaparkan urgensi penataan kewenangan dan tugas MPR.

Dari kajian itu diambil beberapa kesimpulan, di antaranya (1). Dinamika pengaturan kewenangan dan tugas MPR dalam sistem ketatanegaraan setidaknya dapat dipotret ke dalam empat fase, yaitu: *pertama* pada fase di awal pembentukannya; *kedua*, pada fase pasca dikeluarkannya Dekrit Presiden; *ketiga*, pada fase kelembagaan MPR

hasil Pemilu Orde Baru (1971-1997); dan *keempat*, pada fase kelembagaan MPR hasil dari setiap perubahan UUD Tahun 1945.

Terhadap dinamika pada fase awal pembentukan hingga tahun 1997 (Orde Baru), pada prinsipnya kewenangan dan tugas MPR diatur secara tegas dalam UUD Tahun 1945 dan undang-undang organik lainnya. Kewenangan dan tugas tersebut dinilai sejalan dengan *filosofis* pembentukan kelembagaan MPR. Hanya saja dalam tataran implementasi, kewenangan, dan tugas MPR justru tidak dijalankan sebagaimana tujuan hadirnya kewenangan dan tugas tersebut. Sementara pada fase kelembagaan MPR hasil perubahan

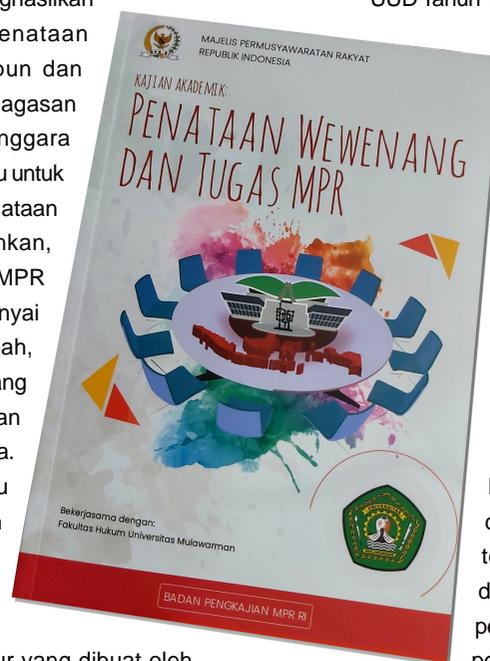
UUD Tahun 1945, dekonstruksi terjadi terhadap kewenangan dan tugas MPR. Di awal kelembagaan dekonstruksi tersebut memberi dampak positif, namun kini dekonstruksi tersebut justru menimbulkan persoalan lain dalam ketatanegaraan.

(2). Penataan kewenangan dan tugas MPR memiliki urgensi, baik secara *filosofis*, *historis*, *sosiologis*, *yuridis*, maupun *politik*. Dalam perspektif *filosofis*, penataan kewenangan dan tugas MPR dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan hakikat MPR sebagaimana *filosofis* pembentukannya. Dilihat dalam kacamata *historis*, penyelewengan terhadap kewenangan dan tugas MPR terjadi bukan karena desain kewenangan dan tugas MPR ketika itu, tetapi oleh karena belum berjalannya sistem demokrasi secara baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara ketika itu. Secara *sosiologis*, penataan kewenangan dan tugas dilakukan untuk

menyudahi persoalan ketatanegaraan berkenaan dengan kelembagaan MPR. Sementara dalam hal *yuridis-politik*, peluang untuk melakukan penataan sangat terbuka melalui Pasal (1) ayat (23) dan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 serta konstelasi politik saat ini.

Buku ini tidak hanya berisi kesimpulan, namun juga saran. Saran yang diajukan: (1). Rencana penataan kewenangan dan tugas MPR yang akan dilakukan melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945 disarankan untuk mempertimbangkan hasil kajian yang telah peneliti lakukan; (2). Rencana penataan kewenangan dan tugas MPR harus benar-benar dapat mempertimbangkan kebutuhan ketatanegaraan saat ini terhadap kelembagaan MPR dan harus terbebas dari anasir-anasir politik praktis. □

AWG



MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MAJELIS



INI BARU INDONESIA
DARI MPR RI UNTUK NKRI





MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI